

**PRAKTIK POLITIK UANG DAN PENGARUHNYA PADA PERILAKU
PEMILIH DI PILKADA KABUPATEN PURBALINGGA 2020: STUDI DI
KELURAHAN BANCAR**

SKRIPSI

Program Studi S-1 Ilmu Politik



Disusun Oleh:

ENDING SELASIH

1706016036

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2021

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada.

Yth. Ibu Dekan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

UIN Walisongo Semarang

di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi dari mahasiswa:

Nama : Ending Selasih

NIM : 1706016036

Jurusan : Ilmu Politik

Judul Skripsi : PRAKTIK POLITIK UANG DAN PENGARUHNYA PADA PERILAKU PEMILIH DI PILKADA KABUPATEN PURBALINGGA 2020: STUDI DI KELURAHAN BANCAR

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 13 Desember 2021

Pembimbing

Bidang Substansi Materi

Bidang Metodologi & Tata Tulis



Dr. H. Muhyar Fanani, M.Ag



Muhammad Mahsun, M.A

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**PRAKTIK POLITIK UANG DAN PENGARUHNYA PADA PERILAKU PEMILIH DI
PILKADA KABUPATEN PURBALINGGA 2020: STUDI DI KELURAHAN BANCAR**

Disusun Oleh:

Ending Selasih

1706016036

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi pada tanggal 29 Desember 2021 dan dinyatakan lulus.

Susunan Dewan Penguji



Dr. Hrolkhatul Khoir, M.Ag

Sekretaris

Dr. H. Muhyar Fanani, M.Ag

Penguji I

Rofiq, M.Si

Penguji II

Masrohatun, M.Si

Pembimbing I

Dr. H. Muhyar Fanani, M.Ag

Pembimbing II

Muhammad Mahsun, M.A

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 (S1) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
2. Semua sumber yang menjadi referensi dan rujukan dalam penulisan skripsi ini telah saya sertakan dan cantumkan.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Semarang, 13 Desember 2021

Yang membuat pernyataan



Ending Selasih

1706016036

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan segala nikmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PRAKTIK POLITIK UANG DAN PENGARUHNYA PADA PERILAKU PEMILIH DI PILKADA KABUPATEN PURBALINGGA 2020: STUDI DI KELURAHAN BANCAR”**. Shalawat dan salam tak lupa penulis junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan kita sepanjang zaman.

Banyak kesulitan dan hambatan yang ditemui dalam proses penyusunan skripsi ini, namun penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari pertolongan Allah SWT, bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.
2. Ibu Dr. Misbah Zulfa Elizabeth M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Adib Fathoni M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Politik FISIP UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Muhammad Mahsun M.A selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Politik FISIP UIN Walisongo yang juga merupakan Dosen Pembimbing Skripsi, atas segala ilmu, arahan, dukungan, dan juga motivasi yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi.
5. Bapak Dr. H. Muhyar Fanani M.Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi, atas segala ilmu dan arahan yang diberikan selama bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Drs. Nur Syamsudin M.Ag selaku Dosen Wali Akademik.
7. Dosen-dosen FISIP UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu serta pengalaman baru selama masa perkuliahan.

8. Segenap jajaran tenaga pendidikan dan civitas akademika FISIP UIN Walisongo yang telah membantu dan mempermudah segala keperluan penulis selama masa perkuliahan dan juga selama masa penyusunan skripsi.
9. Ayahanda Susilo Dwijo Martoyo dan Ibunda Siti Miswati sebagai orang tua penulis yang telah memberikan kasih sayang, doa, dan juga dukungan sehingga penulis bisa sampai pada titik ini.
10. Kakak dan adik penulis, Tunggal Budi Santoso, Ratih Nurfitri S.Hum, dan Candy Fatima yang telah memberikan dukungan material dan dukungan moral sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi.
11. Segenap warga Kelurahan Bancar yang telah menjadi responden dan memberikan informasi yang dibutuhkan penulis.
12. Teman-teman Ilmu Politik angkatan 2017 yang telah melewati masa perkuliahan bersama-sama.
13. Seluruh pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Penulis menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Kritik dan saran sangat dibutuhkan agar menjadi perbaikan untuk penulis. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sekian.

Semarang, 13 Desember 2021

Penulis



Ending Selasih

1706016036

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmannirrahim

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan daya dan upaya kepadaku tanpa henti

*Dan tak luput shalawat dan salam saya panjatkan kepada junjungan baginda Nabi
Muhammad SAW*

*Saya persembahkan karya ini untuk kedua orang tua saya Ayahanda Terkasih Susilo Dwijo
Martoyo dan Ibunda Tercinta Siti Miswati yang telah memberikan doa, dukungan, dan telah
banyak berkorban baik tenaga maupun pikiran untuk saya*

MOTTO

“ Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak “

(Q.S Al-Baqarah ayat 216)

“ Usaha tidak akan mengkhianati hasil “

(Anonim)

ABSTRAK

Perubahan sistem pilkada yang dipilih oleh DPRD di Indonesia pasca reformasi menjadi pilkada langsung yang dipilih oleh rakyat adalah untuk meminimalisir terjadinya praktik politik uang. Namun fakta menunjukkan bahwa politik uang dapat terjadi bahkan dalam pilkada secara langsung. Tidak bisa dipungkiri bahwa pilkada serentak 2020 juga terdapat praktik-praktik politik uang. Bawaslu Jateng menemukan dugaan adanya praktik politik uang selama pilkada serentak berlangsung di empat kabupaten. Diantaranya adalah Kabupaten Pekalongan, Purworejo, Pemalang, dan Purbalingga. Kabupaten Purbalingga memiliki jumlah kasus dugaan praktik politik uang terbanyak diantara ketiga kabupaten lain, yaitu 14 kasus. Fenomena ini menjadi menarik untuk diteliti, yaitu untuk mengetahui apa saja bentuk praktik politik uang, faktor penyebab, dan bagaimana pengaruh politik uang terhadap perilaku pemilih di Kabupaten Purbalingga khususnya di Kelurahan Bancar pada pilkada 2020.

Dengan menggunakan teori patronase politik dan perilaku pemilih yang dibantu dengan metode penelitian kuantitatif korelasional, hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: *Pertama*, bentuk praktik politik uang yang terjadi di Kelurahan Bancar berupa uang, barang, dan jasa/fasilitas. Dalam bentuk uang dikategorikan dalam bentuk *vote buying*, kemudian dalam bentuk barang dikategorikan menjadi *individual gifts* dan *club goods*, dan dalam bentuk jasa/fasilitas dikategorikan dalam bentuk *services & activities* dan *pork barrel projects*. *Kedua*, Faktor yang melatarbelakangi terjadinya politik uang adalah faktor ekonomi, faktor pengetahuan politik, dan faktor kebiasaan/kebudayaan. Faktor yang paling berpengaruh adalah faktor ekonomi. *Ketiga*, pengujian hipotesis menunjukkan bahwa ada pengaruh antara politik uang terhadap perilaku pemilih. Dimana 88% variabel perilaku pemilih dipengaruhi oleh variabel politik uang, sisanya ($100\% - 88\% = 12\%$) dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis perilaku pemilih dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, dan pendekatan pilihan rasional. Untuk pendekatan sosiologis menunjukkan bahwa agama dan usia cukup berpengaruh dalam menentukan pilihan pemilih, sedangkan jenis kelamin hanya sedikit berpengaruh dalam menentukan pilihan pemilih. Kemudian untuk pendekatan psikologis, cukup berpengaruh dalam menentukan pilihan pemilih, sedangkan orientasi kandidat hanya sedikit berpengaruh dalam menentukan pilihan pemilih. Selanjutnya untuk pendekatan pilihan rasional, pemberian ongkos pengganti memiliki pengaruh yang kecil terhadap pilihan pemilih, justru rekam jejak dan visi & misi lah yang memberikan pengaruh terhadap pilihan pemilih di Kelurahan Bancar pada pilkada 2020.

Kata Kunci: Politik Uang, Patronase Politik, Perilaku Pemilih, Pilkada

ABSTRACT

The change of the electoral system selected by the DPRD in Indonesia after the reform to a direct election are chosen by the people is to minimize the occurrence of money politics. But the fact shows that the money politics can happen even in direct elections. It cannot be denied that simultaneous elections in 2020 also have practices of money politics. Bawaslu Jateng found alleged practices of money politics during the simultaneous elections in four districts. Among them are Pekalongan, Purworejo, Pemalang, and Purbalingga regencies. Purbalingga Regency has the highest number of cases of money politics practices among the three other districts, which is 14 cases. This phenomenon becomes interesting to research, to find out what are the forms of money politics practices, the causes, and how the influence of money politics on voter behavior in Purbalingga Regency, especially in Bancar Village in the 2020 election.

By using the theory of political patronage and voter behavior assisted with correlational quantitative research methods, the results of this study showed that: First, the forms of money politics practices that occur in Bancar Village are in the form of money, goods, and services/facilities. In the form of money, it is categorized in the form of vote buying, then in the form of goods it is categorized into individual gifts and club goods, and in the form of services/facilities it is categorized in the form of services & activities and pork barrel projects. Second, the factors behind the occurrence of money politics are economic factors, political knowledge factors, and habit/cultural factors. The most influential factor is the economic factor. Third, hypothesis testing shows that there is an influence between money politics on voter behavior. Where 88% of the variable of voter behavior is influenced by money politics, the rest ($100\% - 88\% = 12\%$) is influenced by other variables not examined in this study. The approach used to analyze voter behavior in this study is a sociological approach, a psychological approach, and a rational choice approach. For the sociological approach, it shows that religion and age are quite influential in determining voter choices, while gender has little influence in determining voter choices. Then for the psychological approach, it is quite influential in determining voter choices, while candidate orientation has little effect in determining voter choices. Furthermore, for the rational choice approach, the provision of replacement costs has little effect on voter choice, it is the track record and vision & mission that have an influence on voter choice in Bancar Village in the 2020 Pilkada.

Keywords: Money Politics, Political Patronage, Voter Behavior, Election

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
1. Manfaat Teoritis.....	6
2. Manfaat Praktis	6
E. Tinjauan Pustaka	6
1. Pengaruh Politik Uang	7
2. Perilaku Pemilih.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	13
2. Definisi Konseptual.....	14
3. Definisi Operasional	15

4. Sumber dan Jenis Data	17
5. Populasi dan Sampel	17
6. Teknik Pengumpulan Data	18
7. Uji Kualitas Data	19
8. Uji Asumsi Klasik.....	20
9. Teknik Analisis Data.....	20
10.Sistematika Penulisan.....	21
BAB II LANDASAN TEORI.....	23
A. Politik Uang	23
B. Perilaku Pemilih	27
1. Pendekatan Sosiologis.....	28
2. Pendekatan Psikologis.....	29
3. Pendekatan Pilihan Rasional	30
C. Hipotesis	31
BAB III DESKRIPSI WILAYAH DAN UJI KUALITAS DATA	32
A. Deskripsi Singkat Objek Penelitian.....	32
1. Kondisi Geografis	32
2. Topografi	34
3. Demografi.....	34
B. Uji Kualitas Data.....	37
1. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Data	37
2. Hasil Uji Asumsi Klasik.....	39
BAB IV BENTUK PRAKTIK POLITIK UANG DI KELURAHAN BANCAR KABUPATEN PURBALINGGA.....	41
A. Praktik Politik Uangdalam Bentuk Uang	41
B. Praktik Politik Uang dalam Bentuk Barang.....	43
1. <i>Individual Gifts</i>	43

2. <i>Club Goods</i>	46
C. Praktik Politik Uang dalam Bentuk Jasa/Fasilitas.....	48
1. <i>Services and Activities</i>	48
2. <i>Pork Barrel Projects</i>	51
BAB V FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI TERJADINYA POLITIK UANG DI KELURAHAN BANCAR KABUPATEN PURBALINGGA.....	55
A. Faktor Ekonomi.....	55
B. Faktor Pendidikan Politik	58
C. Faktor Kebudayaan atau Kebiasaan	63
BAB VI PENGARUH POLITIK UANG TERHADAP PERILAKU PEMILIH DI KELURAHAN BANCAR KABUPATEN PURBALINGGA.....	67
A. Analisis Data dan Pengujian Hipotesis.....	67
B. Pengaruh Politik Uang Terhadap Perilaku Pemilih.....	69
1. Pendekatan Sosiologis.....	69
2. Pendekatan Psikologis.....	76
3. Pendekatan Pilihan Rasional	80
BAB VII PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN	92
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	115

DAFTAR TABEL

TABEL 1. 1 DEFINISI OPERASIONAL.....	15
TABEL 1. 2 BOBOT PENILAIAN KUESIONER	19
TABEL 3. 1 JARAK DARI PURBALINGGA KE BEBERAPA KOTA SEKITARNYA	32
TABEL 3. 2 LUAS WILAYAH ADMINISTRASI PURBALINGGA DIRINCI TIAP KECAMATAN.....	32
TABEL 3. 3 JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN DAN <i>SEX RATIO</i>	34
TABEL 3. 4 JUMLAH PENDUDUK ANGKATAN KERJA DAN BUKAN ANGKATAN KERJA.....	35
TABEL 3. 5 JUMLAH PENDUDUK PER KECAMATAN MENURUT AGAMA.....	36
TABEL 3. 6 HASIL UJI VALIDITAS VARIABEL X	37
TABEL 3. 7 HASIL UJI VALIDITAS VARIABEL Y	38
TABEL 3. 8 HASIL UJI RELIABILITAS	38
TABEL 3. 9 HASIL UJI NORMALITAS	39
TABEL 4. 1 STATISTIK DESKRIPTIF DARI VOTE BUYING (SKOR 1-5).....	42
TABEL 4. 2 STATISTIK DESKRIPTIF DARI INDIVIDUAL GIFTS	44
TABEL 4. 3 STATISTIK DESKRIPTIF DARI INDIVIDUAL GIFTS (B)	45
TABEL 4. 4 STATISTIK DESKRIPTIF DARI CLUB GOODS.....	46
TABEL 4. 5 STATISTIK DESKRIPTIF DARI SERVICES & ACTIVITIES	48
TABEL 4. 6 STATISTIK DESKRIPTIF DARI SERVICES & ACTIVITIES (B).....	49
TABEL 4. 7 STATISTIK DESKRIPTIF DARI PORK BARREL PROJECTS	51
TABEL 4. 8 STATISTIK DESKRIPTIF DARI PORK BARREL PROJECTS (B).....	53
TABEL 5. 1 PEKERJAAN RESPONDEN	56
TABEL 5. 2 STATISTIK DESKRIPTIF DARI FAKTOR EKONOMI	57
TABEL 5. 3 PENDIDIKAN TERAKHIR RESPONDEN	59
TABEL 5. 4 STATISTIK DESKRIPTIF DARI FAKTOR PENGETAHUAN POLITIK	61
TABEL 5. 5 STATISTIK DESKRIPTIF DARI FAKTOR PENGETAHUAN POLITIK (B).....	62
TABEL 5. 6 STATISTIK DESKRIPTIF DARI FAKTOR KEBIASAAN/KEBUDAYAAN	64
TABEL 6. 1 REGRESI POLITIK UANG TERHADAP PERILAKU PEMILIH	67
TABEL 6. 2 UJI T	68
TABEL 6. 3 KOEFISIEN DETERMINASI.....	68
TABEL 6. 4 USIA RESPONDEN	70
TABEL 6. 5 STATISTIK DESKRIPTIF DARI USIA	70
TABEL 6. 6 JENIS KELAMIN RESPONDEN	72
TABEL 6. 7 STATISTIK DESKRIPTIF DARI JENIS KELAMIN	72
TABEL 6. 8 STATISTIK DESKRIPTIF DARI AGAMA	74
TABEL 6. 9 STATISTIK DESKRIPTIF DARI IDENTIFIKASI PARTAI.....	77
TABEL 6. 10 STATISTIK DESKRIPTIF DARI ORIENTASI KANDIDAT	79
TABEL 6. 11 STATISTIK DESKRIPTIF DARI PENDEKATAN PILIHAN RASIONAL	81
TABEL 6. 12 STATISTIK DESKRIPTIF DARI PENDEKATAN PILIHAN RASIONAL (B)	83
TABEL 6. 13 STATISTIK DESKRIPTIF DARI PENDEKATAN PILIHAN RASIONAL (C)	84

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 3. 1 PETA ADMINISTRASI PURBALINGGA	33
GAMBAR 4. 1 VOTE BUYING.....	42
GAMBAR 4. 2 INDIVIDUAL GIFTS	44
GAMBAR 4. 3 INDIVIDUAL GIFTS (B).....	46
GAMBAR 4. 4 CLUB GOODS.....	47
GAMBAR 4. 5 SERVICES & ACTIVITIES.....	49
GAMBAR 4. 6 SERVICES & ACTIVITIES (B)	50
GAMBAR 4. 7 PORK BARREL PROJECTS.....	52
GAMBAR 4. 8 PORK BARREL PROJECTS (B)	53
GAMBAR 5. 1 FAKTOR EKONOMI.....	58
GAMBAR 5. 3 FAKTOR PENGETAHUAN POLITIK.....	62
GAMBAR 5. 4 FAKTOR PENGETAHUAN POLITIK (B).....	63
GAMBAR 5. 5 FAKTOR KEBUDAYAAN/KEBIASAAN.....	65
GAMBAR 6. 1 PENDEKATAN SOSIOLOGIS (USIA).....	71
GAMBAR 6. 3 JENIS KELAMIN.....	73
GAMBAR 6. 4 FAKTOR AGAMA.....	75
GAMBAR 6. 5 IDENTIFIKASI PARTAI.....	78
GAMBAR 6. 6 ORIENTASI KANDIDAT	80
GAMBAR 6. 7 PEMBERIAN POLITIK UANG	82
GAMBAR 6. 9 VISI DAN MISI KANDIDAT	84
GAMBAR 6. 10 REKAM JEJAK KANDIDAT.....	85

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 KUESIONER PENELITIAN.....	92
LAMPIRAN 2 SURAT IJIN PENELITIAN.....	95
LAMPIRAN 3 DOKUMENTASI KEGIATAN.....	98
LAMPIRAN 4 KOEFISIEN KORELASI SEDERHANA (R TABEL)	99
LAMPIRAN 5 TITIK PERSENTASE DISTRIBUSI (T TABEL)	100
LAMPIRAN 6 TABULASI JAWABAN RESPONDEN.....	103
LAMPIRAN 7 <i>OUTPUT</i> SPSS.....	108

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu alasan perubahan sistem pilkada yang dipilih oleh DPRD di Indonesia pasca reformasi menjadi pilkada langsung yang dipilih oleh rakyat adalah untuk meminimalisir terjadinya praktik politik uang, dengan pertimbangan bahwa kandidat yang bersaing nantinya tidak memiliki kemampuan untuk melakukan *vote buying* dikarenakan jumlah rakyat yang sangat banyak. Namun fakta menunjukkan bahwa politik uang dapat terjadi bahkan dalam pilkada secara langsung, walaupun dengan biaya yang tinggi karena melibatkan pemilih di daerah pemilihan. Pada pilkada yang dipilih oleh DPRD, politik uang juga kerap ditemukan, namun dalam pilkada langsung justru semakin mengemuka (Fitriyah, 2011). Hal tersebut merupakan sebuah tantangan dalam pilkada, yaitu kecenderungan maraknya praktik politik uang yang terjadi hampir di setiap lapisan masyarakat. Setiap orang mengetahui jika kasus praktik politik uang adalah sesuatu yang jamak dalam pelaksanaan pilkada pasca reformasi. Walaupun semua calon kandidat jika diberikan pertanyaan akan selalu mengatakan kalau mereka tidak terlibat atas praktik politik uang tersebut, warga akan segera dapat memberi tahu bagaimana para calon kandidat menggunakan uang untuk melakukan *vote buying* pada daerah pemilihan mereka (Sholikin, 2019).

Tindakan politik uang memang sulit untuk menentukan dengan pasti karena masyarakat menganggap politik uang dengan pendapat yang berbeda-beda membuat pengertian dari politik uang masih belum dipastikan secara jelas. M Abdul Kholiq berpendapat bahwa politik uang adalah tindakan pendistribusian uang maupun materi lainnya yang berasal dari milik pribadi politisi (caleg/capres dan cawapres, calon kepala daerah) maupun milik partai politik untuk mempengaruhi perolehan suara dalam pemilu. Selain itu, politik uang merupakan salah satu bentuk pemberian yang berupa uang maupun materi lainnya (contohnya sembako) maupun pemberian janji yang menjadi suatu upaya dalam mempengaruhi pemilik suara. Jadi politik uang adalah usaha mempengaruhi orang lain melalui penggunaan imbalan materi dalam proses politik dan juga kekuasaan bernama pemilu (Kholiq, 2014).

Lebih lanjut lagi, Edward Aspinall dan Mada Sukmajati memberikan pengertian bahwa politik uang adalah istilah untuk menjelaskan praktik yang terkait pada pembagian uang (ada pula dalam bentuk barang) oleh calon kepada pemilih pada saat pemilu. Tidak hanya itu, untuk menghindari ambiguitas arti dari istilah tersebut, Aspinall dan Sukmajati menitikberatkan politik uang dalam konsep patronase dan juga klientelisme. Keduanya menjelaskan, patronase adalah pendistribusian uang tunai, barang, maupun jasa dan manfaat ekonomi lainnya (contohnya kontrak kerja ataupun proyek) yang diberikan oleh politisi, termasuk manfaat ekonomi bagi individu (seperti amplop yang berisi uang tunai) maupun bagi kelompok/komunitas (seperti lapangan sepak bola yang baru dan ditujukan kepada para pemuda di desa). Sebaliknya, klientelisme adalah hubungan kekuasaan yang bersifat personalistik, dan keuntungan serta manfaat material tersebut dipertukarkan dengan bentuk dukungan politik (Aspinall & Sukmajati, 2015).

Fenomena praktik politik uang disebabkan oleh terjadinya hukum *supply and demand*, kemudian terjadi hampir di semua daerah, terutama daerah terpencil yang relatif sulit terjangkau sehingga tidak terawasi oleh pengawas pemilihan umum. Pelaku utama atas terjadinya praktik uang adalah calon, tim sukses, kemudian juga pengurus/kader partai, maupun tokoh masyarakat. Bentuk praktik politik uang dilakukan melalui pemberian amplop secara langsung yang berisi uang, pendistribusian barang (sembako, jilbab, pakaian, dan sebagainya), memberikan perbaikan infrastruktur, menawarkan pulsa atau keanggotaan kredit atau asuransi, *door prize*, dan sebagainya. Metode pemberian dapat dilakukan melalui pemberian langsung ataupun sembunyi-sembunyi dan dilakukan ketika calon diresmikan sebagai kandidat, sepanjang masa kampanye berlangsung, masa tenang, dan bahkan ketika malam/pagi hari sebelum pemungutan suara atau yang sering disebut sebagai serangan fajar (Akbar, 2016).

Praktik politik uang yang marak terjadi biasanya dilatarbelakangi oleh beberapa faktor seperti: *Pertama*, kurangnya pendidikan politik. Seseorang dengan pendidikan politik rendah dapat dengan mudah menerima pemberian dari para tim sukses calon karena menganggap bahwa politik uang adalah sesuatu yang tidak masalah bagi mereka. *Kedua*, faktor ekonomi. Seseorang dengan kelas ekonomi bawah cenderung ingin mendapatkan uang dengan cara apapun untuk memenuhi kebutuhannya, jadi tidak heran jika mereka menerima uang dari tim sukses calon tanpa memikirkan konsekuensi yang akan terjadi. *Ketiga*, faktor kebiasaan. Ini terjadi

karena praktik politik uang yang terjadi selama ini terus dibiarkan sehingga menjadi sebuah kebiasaan, masyarakat beranggapan ketika menjelang pemilu/pilkada maka pada saat itu pula kebiasaan tersebut harus ada (Monintja, Lopian, & Tulung, 2019).

Data dari hasil riset Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) yang dilakukan pada Januari hingga Maret 2020 ini melibatkan 400 responden di Sumatera, Kalimantan, dan Jawa menyebutkan bahwa lebih dari 60% responden mengatakan jika ada seseorang yang memberikan politik uang, maka mereka akan menerimanya. Dari 60% lebih responden yang mengaku mau menerima politik uang, 64%-76% memilih pemberian uang ketimbang barang, 23%-35% mengaku lebih tertarik dengan sembako, bibit, pupuk, peralatan untuk pertanian, dan sebagainya yang berbentuk barang. Dengan alasan yang bervariasi, mulai dari alasan tidak mau menolak rejeki, sebagai pengganti karena pada hari pemungutan suara mereka libur bekerja, sebagai tambahan untuk kebutuhan dapur maupun untuk keperluan sehari-hari, dan alasan-alasan lainnya (Salabi, 2020).

Tidak bisa dipungkiri bahwa pilkada serentak 2020 juga terdapat praktik-praktik politik uang. Bawaslu Jateng menemukan dugaan adanya praktik politik uang selama pilkada serentak berlangsung di empat kabupaten. Diantaranya adalah Kabupaten Pekalongan, Purworejo, Pemalang, dan Purbalingga (Liputan6.com, 2020). Di Kabupaten Pekalongan terjadi satu kasus, Kabupaten Purworejo satu kasus, Kabupaten Pemalang empat kasus, dan Kabupaten Purbalingga dengan kasus terbanyak yaitu 14 kasus (Farasonalia, 2020). Dari sini dapat kita lihat Kabupaten Purbalingga memiliki kasus politik uang terbanyak. Padahal, Pemerintah Kabupaten Purbalingga bersama jajaran Forkopimda setuju untuk melaksanakan pesta demokrasi secara bersih, sehat, berintegritas, serta bermartabat dengan ditanda tangannya Perbup nomor 98 tahun 2020 yang berisi tentang pemberian penghargaan untuk masyarakat. Dimana penghargaan tersebut senilai Rp. 2,5 juta untuk pelapor politik uang serta disertai dengan bukti adanya politik uang (Diskominfo, 2020). Tetapi pada kenyataannya Kabupaten Purbalingga malah memiliki kasus politik uang terbanyak dibandingkan dengan daerah lain. Ketua Bawaslu Kabupaten Purbalingga, Imam Nurhakim menyampaikan bahwa ada 11 kasus dugaan politik uang yang ditangani oleh Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Sebanyak 11 kasus tersebut dilaporkan oleh tim kuasa hukum paslon nomor urut dua. Dari 11 kasus tersebut, empat kasus dilaporkan langsung ke Bawaslu Kabupaten Purbalingga sedangkan sisanya dilaporkan ke tingkat Panwascam (Asadillah, 2020). Dari sekian

banyak kasus yang telah dilaporkan penulis ingin mengetahui bagaimana bentuk, faktor penyebab, dan pengaruh yang ditimbulkan oleh praktik politik uang tersebut. Oleh karena itu, studi ini tertarik untuk mengkaji praktik politik uang yang terjadi di daerah ini.

Pada Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Purbalingga terdapat dua paslon. Pasangan nomor urut 1 adalah Muhammad Sulhan Fauzi-Zaini Makarim Supriyanto (Oji-Jeni) yang diusung oleh lima partai politik diantaranya PPP, PKB, Gerindra, Demokrat, dan NasDem. Sedangkan paslon nomor 2 adalah Dyah Hayuning Pratiwi-Sudono (Tiwi-Dono) yang diusung oleh PDIP, Golkar, PKS, dan PAN. Tim kuasa hukum dari paslon Tiwi-Dono, yang bernama Endang Yuliati, mengatakan pihaknya menemukan 13 kejadian dugaan politik uang di sembilan kecamatan, diantaranya adalah Kecamatan Bojongsari, Mrebet, Karangmoncol, Kemangkon, Kejobong, Kaligondang, Kalimanah, Padamara, dan Purbalingga (Anugrah, 2020). Dikarenakan Kabupaten Purbalingga memiliki cakupan wilayah yang cukup luas dan juga memerhatikan keterbatasan waktu, penulis tidak akan meneliti praktik politik uang dalam skala luas setingkat Kabupaten, tetapi akan dilihat dalam ruang yang lebih kecil pada skala Kelurahan, yaitu Kelurahan Bancar.

Kelurahan Bancar merupakan suatu kelurahan di Kecamatan Purbalingga. Jika pada tingkat kecamatan terjadi praktik-praktik politik uang, maka bisa dipastikan hal ini juga terjadi pada lingkup kelurahan, bahkan rukun warga (RW) ataupun rukun tetangga (RT) karena ini adalah tingkat akar rumput (Aspinall & Berenschot, 2019). Di Kelurahan Bancar ini terdapat sebuah posko pemenangan paslon nomor dua yaitu Tiwi-Dono yang memenangkan suara terbanyak pada pilkada 2020 di Kabupaten Purbalingga. Posko ini menjadi ramai dan sering digunakan menjelang pilkada serta banyak pula kegiatan yang diselenggarakan untuk warga sekitar, dan terkadang setelah kegiatan itu selesai warga yang hadir dalam kegiatan tersebut pulang dengan membawa 'buah tangan' berupa makanan ataupun barang. Hal ini tentu saja bisa dikategorikan sebagai praktik politik uang akan tetapi warga sekitar tidak menyadari hal tersebut. Tidak bisa dipastikan berapa banyak warga yang menerima hal ini karena biasanya yang hadir dalam kegiatan tersebut adalah orang-orang yang sudah terpilih diberi undangan dan sasarannya adalah warga dengan ekonomi menengah kebawah.

Dalam penelitian ini, perhatian akan difokuskan pada masalah praktik politik uang yang berupa bentuk politik uang, faktor penyebab, serta pengaruhnya terhadap perilaku pemilih. Untuk mengetahui bentuk serta faktor penyebab dari politik uang,

penulis membatasinya dengan menggunakan teori patronase politik. Yang mana politik uang yang dimaksud adalah segala bentuk transaksi dalam bentuk uang, barang, atau jasa dari calon kandidat kepada pemilih pada saat sebelum atau menjelang pemilu berlangsung. Bentuk politik uang yang terjadi di Kelurahan Bancar yaitu berupa pembelian suara (*vote buying*), pemberian-pemberian pribadi (*individual gifts*), pelayanan dan aktivitas (*services and activities*), barang-barang kelompok (*club goods*), dan proyek-proyek gentong babi (*pork barrel projects*). Kemudian faktor yang melatarbelakangi terjadinya politik uang adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan politik, dan faktor kebiasaan/kebudayaan. Faktor yang paling berpengaruh adalah faktor pendidikan politik. Kemudian setelah mengetahui bentuk dan juga faktor penyebab terjadinya politik uang, yang selanjutnya adalah mencari tahu bagaimana pengaruh politik uang tersebut terhadap perilaku pemilih. Untuk menganalisisnya, penulis menggunakan teori perilaku pemilih dengan pendekatan sosiologis, psikologis, dan pilihan rasional (*rational choice*). Pendekatan sosiologis menunjukkan bahwa agama dan usia cukup berpengaruh dalam menentukan pilihan pemilih, sedangkan jenis kelamin hanya sedikit berpengaruh dalam menentukan pilihan pemilih. Kemudian untuk pendekatan psikologis, cukup berpengaruh dalam menentukan pilihan pemilih, sedangkan orientasi kandidat hanya sedikit berpengaruh dalam menentukan pilihan pemilih. Selanjutnya untuk pendekatan pilihan rasional, pemberian ongkos pengganti memiliki pengaruh yang kecil terhadap pilihan pemilih, justru rekam jejak dan visi & misi lah yang memberikan pengaruh terhadap pilihan pemilih di Kelurahan Bancar pada pilkada 2020.

Dari keseluruhan latar belakang yang telah diuraikan, sangat menarik untuk mengetahui apa saja bentuk politik uang yang terjadi. Selain itu juga akan dilakukan analisis terhadap faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab praktik politik uang, serta bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku pemilih di Kelurahan Bancar pada pilkada 2020. Dengan berdasarkan ketertarikan itulah penulis mengangkat tema ini untuk dikaji lebih dalam pada skripsi yang akan penulis tulis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang yang sudah disebutkan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apa saja bentuk praktik politik uang yang terjadi di Kelurahan Bancar pada Pilkada 2020 di Kabupaten Purbalingga?

2. Apa saja faktor yang melatarbelakangi terjadinya politik uang di Kelurahan Bancar pada Pilkada 2020 di Kabupaten Purbalingga?
3. Bagaimana pengaruh politik uang terhadap perilaku pemilih di Kelurahan Bancar pada Pilkada 2020 di Kabupaten Purbalingga?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, jadi tujuan atas penelitian ini adalah:

1. Mengetahui apa saja bentuk praktik politik uang yang terjadi di Kelurahan Bancar pada Pilkada 2020 di Kabupaten Purbalingga?
2. Mengetahui apa saja faktor yang melatarbelakangi terjadinya politik uang di Kelurahan Bancar pada Pilkada 2020 di Kabupaten Purbalingga?
3. Mengetahui bagaimana pengaruh politik uang terhadap perilaku pemilih di Kelurahan Bancar pada Pilkada 2020 di Kabupaten Purbalingga?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan. Khususnya terhadap Ilmu Politik yang mengkaji masalah politik uang.
 - b. Sebagai bahan bacaan dan literatur tambahan bagi mahasiswa dan masyarakat luas pada umumnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Masyarakat
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang apa itu politik uang dan bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku pemilih dalam Pilkada.
 - b. Bagi Lembaga Pemerintahan
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengantisipasi terjadinya praktik politik uang dalam Pilkada.

E. Tinjauan Pustaka

Kajian mengenai politik uang dan perilaku pemilih telah banyak dilakukan oleh para ahli. Hasil penelusuran kajian pustaka ini akan dibagi menjadi dua bagian kajian, yaitu pertama mengenai pengaruh politik uang dan bagian kedua mengenai perilaku pemilih. Penulis mengelompokkan tulisan penulis terdahulu ini berdasarkan

metode penelitian yang digunakan. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi serta menambah referensi. Berikut ini hasil penelusuran tinjauan pustaka yang dilakukan penulis.

1. Pengaruh Politik Uang

Artikel pertama adalah artikel yang ditulis oleh Revi Kazali, Dr. Endang Rochmiatun, dan Nico Oktario Adytyas (2020) “Pengaruh *Money Politics* Terhadap Pilihan Masyarakat Pada Pilkades Serentak di Kabupaten Muara Enim Tahun 2017 (Studi Kasus di Desa Teluk Limau Kecamatan Gelumbang)”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Penelitian dalam artikel jurnal ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh politik uang pada saat pilkades, hasil analisis data membuktikan bahwa pengaruh politik uang sangat besar yaitu 84%. Terdapat empat orang yang maju dalam pilkades. Yaitu Nomor Urut 1 adalah Tri Sutrisno, selanjutnya Nomor Urut 2 adalah Ahmad Redi, kemudian Nomor Urut 3 adalah Didi Sarkini, dan yang terakhir Nomor Urut 4 adalah Muhammad Amin. Diketahui calon kepala desa dengan nomor urut 1 dan 4 melakukan politik uang berdasarkan hasil kuesioner yang telah disebar. Karena sebesar 35,5% responden mengaku menerima politik uang dari calon kepala desa nomor urut 1, dan sebesar 52,7% responden menerima politik uang dari calon kepala desa nomor urut 4. Tidak heran jika pada hasil perhitungan suara calon kepala desa nomor urut 4 memenangkan pilkades dengan perolehan 409 suara. Dari sini dapat kita lihat bahwa semakin banyak penggunaan politik uang, maka peluang untuk memenangkan pemilihan pun semakin besar.

Artikel penelitian yang ditulis oleh Faris Nadisa Rahman, Drs. Turtiantoro M.Si, dan Drs. Susilo Utomo M.Si (2011) dengan judul “Persepsi Pengaruh *Money Politic* Dan Jaringan Sosial Terhadap Perilaku Pemilih Pada Kemenangan Pasangan Calon dr. Hj. Widya Kandi Susanti, MM dan Wakilnya H. Mukh Mustamsikin, S.Ag, M.Si, (YAKIN) Studi Kasus Pemilukada Kab. Kendal Tahun 2010”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode kuantitatif. Tulisan ini terfokus pada strategi politik uang dan strategi jaringan sosial yang digunakan oleh paslon tersebut. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, terdapat 66 orang dari total sampel 139 orang atau sebesar 47,5% menilai bahwa politik uang mempunyai peran yang cukup penting dalam pemenangan pasangan ini. Dengan persentase sebesar itu maka menjadi hal wajar jika paslon ini meraih kemenangan dalam pilkada. Selain menggunakan politik uang, paslon ini juga memanfaatkan jaringan sosialnya. Dari

data yang di dapatkan, paslon ini memiliki jaringan sosial yang cukup baik dibuktikan dengan data yang menunjukkan bahwa 55 orang atau sebesar 39,6% mengakui hal tersebut. Dengan memanfaatkan jaringan sosial yang baik, pasangan ini menjalin hubungan kerja sama atau timbal balik dengan tokoh/kelompok masyarakat yang memiliki pengaruh yang cukup kuat di masyarakat dengan harapan tokoh/kelompok masyarakat tersebut dapat mempengaruhi massanya untuk memilih paslon ini. Kerja sama yang dilakukan bukan hanya berupa materi atau uang, ada pula dalam bentuk bantuan tenaga dalam memobilisasi massa.

Kajian dari skripsi yang ditulis oleh Erin Malindra Ramadhani (2016) dengan judul “Pengaruh *Money Politic* Terhadap Perilaku Pemilih Pemula Masyarakat Kecamatan Candi Di Kabupaten Sidoarjo Dalam Pemilihan Presiden 2014”. Penulisan skripsi ini menggunakan metode kuantitatif, dengan jumlah sampel sebanyak 99 orang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh politik uang terhadap perilaku pemilih pemula. Penulis membagi bentuk politik uang menjadi tiga bagian, yaitu dalam bentuk uang, barang, dan berupa perbaikan infrastruktur/fasilitas umum. Sebanyak 48% orang mengaku menerima uang dalam pilpres, 29% orang menerima politik uang dalam bentuk barang, dan sisanya menerima perbaikan infrastruktur/fasilitas umum. Sebagian besar pemilih pemula sebanyak 37 orang atau sekitar 37,4% mengaku sering menjumpai ataupun menerima politik uang pada saat masa kampanye. Tetapi, pengaruh politik uang terhadap perilaku pemilih di Kecamatan Candi tergolong rendah. Dibuktikan dengan koefisien korelasinya berada pada angka 0,293 yang termasuk ke dalam kategori rendah jika mengacu pada tabel pedoman interpretasi nilai r (koefisien korelasi). Tidak hanya sampai disini, selanjutnya penulis melakukan uji determinasi dengan hasil 0,086 yang artinya pengaruh politik uang terhadap perilaku pemilih pemula hanya 8,6% dan 91,4% disebabkan oleh faktor lainnya.

Artikel yang ditulis oleh Merry Anggraini (2019) yang dimuat dalam jurnal Menara Ilmu dengan judul “Pengaruh Politik Uang Terhadap Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Dharmasraya Pada Pilkada Serentak 2015”. Penelitian ini menganalisis bagaimana pengaruh politik uang pada masyarakat Kabupaten Dharmasraya. Penulis menggunakan metode kuantitatif bertipe *explanatory research*. Dari data yang telah dianalisis, pengaruh politik uang memiliki hubungan positif yang lemah dengan koefisien korelasi sebesar 0,223 artinya di Kabupaten Dharmasraya banyak masyarakat yang menolak pemberian segala bentuk politik uang yaitu sebesar

41%. Korelasi menunjukkan bahwa semakin tinggi politik uang maka semakin besar pula pengaruhnya. Selain itu masyarakat juga menolak pemberian politik uang ketika kampanye sebanyak 88%, menjelang pilkada sebesar 73%, dan pada saat hari H pilkada sebanyak 100%, dengan persentase sebanyak itu lebih dari setengah populasi yang berjumlah 100 orang memiliki integritas dan kejujuran yang cukup tinggi. Masyarakat Kabupaten Dharmasraya sejumlah 49% mengakui bahwa politik uang terjadi pada saat pilkada, tetapi 51% lainnya mengatakan bahwa pilkada berjalan jujur dan adil. Penelitian ini juga menyebutkan bahwa politik uang bukan hanya mempengaruhi masyarakat yang berada pada ekonomi menengah kebawah tetapi juga masyarakat yang tingkat kesejahteraannya bisa dikatakan sangat baik, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa politik uang mempengaruhi hampir disetiap lapisan sosial dan ekonomi masyarakat.

Artikel jurnal penelitian yang ditulis oleh Hardianto Hawing, Besse Nurul Fadillah, Hafiz Elfiansya Parawu (2020) yang diterbitkan oleh *JSPG: Journal of Social Politics and Governance* dengan judul “Pengaruh Politik Uang Terhadap Partisipasi Pemilih Pemilukada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2018”. Dengan menggunakan metode kuantitatif, penulis meneliti seberapa besar pengaruh politik uang terhadap perilaku pemilih pada saat pilbup. Yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah pemilih pemula dalam rentang usia 17-21 tahun seperti kajian pustaka yang telah dibahas sebelumnya. Penulis menganalisis data menggunakan analisis regresi linear sederhana secara parsial dan simultan. Uji parsial pengaruh politik uang menghasilkan koefisien determinasi R^2 sebesar 0,46 yang artinya pengaruh politik uang sebesar 46%. Kemudian hasil analisis secara simultan ditemukan R^2 sebesar 0,53 hal ini berarti 53% menunjukkan politik uang berpengaruh terhadap partisipasi pemilih pemula. Hasil analisis data berbanding terbalik dengan kajian pustaka sebelumnya dimana pengaruh politik uang rendah. Dalam penelitian ini justru politik uang mempunyai pengaruh yang signifikan, sangat disayangkan hal ini terjadi pada pemilih pemula yang mana seharusnya justru pemilih pemula adalah pemilih yang kritis. Jika pemilih pemula bisa dipengaruhi oleh politik uang dalam memilih, hal ini dikhawatirkan akan dianggap menjadi hal yang wajar hingga mereka memasuki kategori pemilih dewasa. Praktik politik seperti ini yang menyebabkan lunturnya nilai-nilai demokrasi.

Masih dalam tema yang sama, kajian pustaka selanjutnya adalah skripsi milik Agustian (2020) dengan judul “Pengaruh Politik Uang Terhadap Partisipasi Pemilih

Pada Pemilu Kepala Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2019”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana politik uang berpengaruh terhadap partisipasi pemilih dengan menggunakan metode kuantitatif. Dari hasil analisis data, ditemukan hasil bahwa politik uang berpengaruh dalam memengaruhi partisipasi pemilih di Desa Mudung. Ini terjadi karena praktik politik uang menjadi kebiasaan yang harus ada ketika pemilu, pengaruh ekonomi, tingkat pendidikan politik yang cenderung rendah, dan kepercayaan terhadap calon pemimpin. Para pemilih menganggap pemilu merupakan syarat bagi mereka dan juga elit politik untuk saling berbagi sekaligus mencapai konsensus atas keuntungan yang diterima kedua belah pihak. Masyarakat dengan keadaan ekonomi menengah kebawah dengan terpaksa juga menerima pemberian politik uang dalam bentuk apapun untuk mencukupi kebutuhan mereka. Selain itu pendidikan politik yang rendah menyebabkan masyarakat menjadi acuh dengan pemilu dan bahkan terkadang menerima praktik-praktik politik uang tanpa mereka tahu bahwa hal tersebut merupakan sebuah pelanggaran dalam pemilu. Pada saat ini pula masyarakat kesulitan untuk mencari seorang pemimpin yang jujur dan mensejahterakan masyarakat, kebanyakan hal tersebut hanyalah janji-janji manis pada saat kampanye. Kenyataannya sangat berbanding terbalik, sehingga masyarakat mulai kehilangan kepercayaan dan menjadi malas untuk berpartisipasi dalam pemilihan dan lebih memilih menerima pemberian politik uang.

2. Perilaku Pemilih

Kajian yang pertama adalah skripsi milik Andi Akbar (2016) yang berjudul “Pengaruh *Money Politics* Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada 2015 Di Kabupaten Bulukumba (Studi Kasus Desa Barugae Kec. Bulukumpa)”. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan teori perilaku pemilih. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi mengapa pemilih di masyarakat Desa Barugae menerima politik uang pada saat pilkada, diantaranya adalah kebiasaan dalam pemilu. Para pemilih menganggap pemilu merupakan syarat bagi mereka dan juga elit politik untuk saling berbagi sekaligus mencapai konsensus atas keuntungan yang diterima kedua belah pihak. Kemudian faktor selanjutnya adalah pengaruh ekonomi, tingkat pendidikan politik yang cenderung rendah, kepercayaan pada calon pemimpin, dan kesepakatan kerja seperti kajian-kajian yang telah disebutkan sebelumnya. Masyarakat yang menerima pemberian uang juga dengan sukarela datang ke TPS untuk memilih karena mereka merasa tidak enak

kepada seseorang telah memberikan uang jika tidak datang ke TPS. Tidak sedikit pula masyarakat yang menerima politik uang dari beberapa kandidat sekaligus, menurut penulis sikap ganda dalam memilih menjadikan politik uang menjadi kurang efektif. Ada juga masyarakat yang hanya mau menerima politik uang tanpa mau repot-repot datang ke TPS pada saat pilkada berlangsung.

Kajian dari skripsi yang ditulis oleh Yusuf Humaidi (2017) dengan judul “Politik Uang dan Perilaku Politik: Studi Terhadap Perilaku Pemilih dalam Pemilihan Umum Legislatif 2014 di Kelurahan Bangka, Jakarta Selatan”. Tulisan ini melihat pengaruh politik uang atas pilihan politik masyarakat dalam pemilu legislatif 2014. Dengan memakai teori perilaku pemilih dan menggunakan tiga pendekatan yang terdapat pada teori perilaku pemilih yakni sosiologis, psikologis, dan juga pilihan rasional penulis mengidentifikasi jika perilaku memilih warga yang menjadi objek penelitian tidak dapat dipisahkan dengan maraknya bentuk politik uang yang berupa bingkisan barang-barang pribadi (berupa sembako, kalender, dll), *vote buying*, serta jasa dan aktivitas. Dalam tulisan ini pendekatan rasional memiliki peran yang besar terhadap perilaku pemilih masyarakat selain pendekatan sosiologis dan psikologis. Pada pendekatan sosiologis, keputusan seseorang untuk memilih calon legislatif berdasarkan pada karakteristik sosiologis pemilih dan yang terutama adalah kelas sosial, agama, serta kelompok etnis. Masyarakat di Kelurahan Bangka cenderung memilih caleg yang memiliki agama yang sama dengan mereka. Pada pendekatan psikologis, pemilih memilih caleg yang berasal dari suatu partai yang dianggap memiliki keterikatan emosional dengan dirinya sendiri. Identitas partai merupakan salah satu elemen keterlibatan politik yang dianggap berpengaruh positif terhadap perilaku pemilih. Identitas partai merupakan keadaan psikologis, yaitu perasaan kedekatan, dukungan, atau loyalitas, atau identifikasi diri dengan partai politik tertentu. Pada pendekatan rasional, masyarakat memilih caleg berdasarkan keuntungan yang diperoleh dalam bentuk barang ataupun jasa.

Artikel jurnal milik Erna Febriani (2018) dengan judul “Analisis Perilaku Memilih (*Voting Behavior*) Pemilih Pemula Wilayah Jakarta Barat Menjelang Pemilihan Umum 2019”. Artikel ini mencari tahu bagaimana faktor sosiologis, faktor psikologis, dan faktor pilihan rasional mempengaruhi perilaku pemilih pemula pada pemilu 2019, dan berfokus pada pemilih rentang usia 17-21 tahun. Dengan menggunakan metode kuantitatif dan mengambil sampel sebanyak 500 orang pemilih pemula, penulis mengolah data secara parsial dan simultan. Secara parsial ditemukan

hasil bahwa faktor pilihan rasional adalah faktor yang memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku pemilih pemula, sementara faktor sosiologis dan psikologis berlaku sebaliknya. Sedangkan secara simultan menunjukkan bahwa ketiga faktor tersebut berpengaruh signifikan terhadap perilaku pemilih pemula. Karakteristik faktor sosiologis meliputi ciri sosial seperti pekerjaan, agama, pendidikan, usia, jenis kelamin, dan lain-lain. Hasil penelitian diketahui bahwa perilaku pemilih pemula tidak dipengaruhi oleh kesamaan agama, umur, ras/suku, dan tingkat pendidikan maupun gender calon kandidat. Pada faktor sosiologis perilaku pemilih dipengaruhi oleh identitas partai politik dan orientasi kandidat, dan hasilnya ditemukan bahwa perilaku pemilih pemula tidak dipengaruhi oleh hal itu. Sedangkan untuk faktor pilihan rasional memiliki efek positif dan berpengaruh atas perilaku pemilih pemula yang artinya perilaku pemilih pemula dipengaruhi oleh faktor rasional atau memilih atas dasar *track record*, visi dan misi calon, serta memilih dengan mempertimbangkan biaya dan manfaat yang akan diperoleh.

Kajian dari jurnal artikel yang ditulis oleh Ferdian, Asrinaldi, dan Syahrizal (2019) yang diterbitkan dalam jurnal Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial yang berjudul “Perilaku Memilih Masyarakat, Malpraktik Pemilu Dan Pelanggaran Pemilu”. Dengan menggunakan mazhab sosiologis oleh Lazarsfeld, mazhab psikologis oleh Angust Campbel, dan mazhab rasional yang dicetuskan oleh Anthony Downs, penulis menganalisis bagaimana perilaku pemilih menimbulkan terjadinya terjadinya kecurangan dan pelanggaran pemilu terutama pembelian suara atau politik uang. Mazhab sosiologis mengelompokkan variabel yang dapat mempengaruhi perilaku pemilih yakni seperti agama, ras, daerah, dan suku. Sedangkan pada mazhab psikologis yakni orientasi kepada kandidat dan identifikasi partai politik. Dan pada mazhab rational atau ekonomi adalah kepentingan ekonomi. Artikel dengan metode *library research* ini menunjukkan bahwa perilaku pemilih khususnya di Indonesia apapun alasannya untuk memilih, praktik pembelian suara akan selalu ada pada setiap pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Padahal rasionalitas pemilih sangat diperlukan agar mendapatkan hasil yang baik dari pemilihan umum yang diselenggarakan. Pemilih diharapkan agar memilih calon berdasarkan visi dan misinya, dan juga dampak jangka panjang pada saat memilih calon kandidat tersebut, sehingga calon kandidat yang terpilih adalah calon yang berkualitas. Pemilih yang menyerahkan suara mereka dengan sukarela untuk dibeli, memutuskan untuk menjual suaranya kepada partai atau calon melalui sistem patron-klien, dikategorikan sebagai

pemilih irasional, karena hanya mengutamakan keuntungan ekonomi pribadi daripada keperluan ekonomi nasional dalam suatu sistem guna memperoleh keuntungan atas pemberian suara tersebut.

Dan yang terakhir adalah artikel jurnal milik Rifaldy Sangkoy, Marlien Lopian, Ronny Gosal (2019) dengan judul “Perilaku Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 (Studi Di Desa Ranomea Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan)” yang diterbitkan oleh FISIP Universitas Sam Ratulangi dalam Eksekutif: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana perilaku pemilih di Desa Ranomea dalam pemilihan Bupati dan wakilnya. Melalui tiga pendekatan yakni sosiologis, psikologis, serta pendekatan rasional. Dari hasil analisis menunjukkan kalau pendekatan psikologis merupakan cara yang efektif untuk mendapatkan suara dari masyarakat setempat, kedekatan seseorang dengan calon menjadi bahan kampanye untuk kandidat tersebut, melihat *figure* dari calon kandidat kepala daerah, disamping itu hubungan psikologis antara organisasi atau partai politik mempengaruhi pemikiran masyarakat untuk menggunakan hak pilih. Selain itu pendekatan rasional juga adalah sebuah pendekatan yang menjadi hal penting bagi masyarakat modern yang membuat lebih pragmatis dan memprioritaskan keuntungan dengan memperoleh uang ataupun sembako.

Berdasarkan hasil kajian pustaka diatas, dapat disimpulkan bahwa praktik politik uang memiliki pengaruh yang signifikan perilaku atau pemilih. Hal ini karena ada beberapa faktor yang melatarbelakanginya. Disini para penulis terdahulu terfokus pada permasalahan penelitian yang hampir sama yakni mengenai apa itu politik uang, bagaimana bentuknya, apa faktor yang melatarbelakanginya, dan bagaimana politik uang itu berpengaruh terhadap partisipasi politik para pemilih. Untuk menambah referensi dari penelitian-penelitian yang telah dikaji sebelumnya, penulis akan melakukan penelitian dengan topik yang sama tetapi dengan lokasi yang berbeda.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat. Hal penting dari jenis penelitian ini adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk

mengadakan pengamatan langsung tentang suatu fenomena yang terjadi (Usman & Akbar, 2006, hal. 5).

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif korelasional. Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang didasarkan pada filsafat positivis, dipakai untuk meneliti populasi maupun sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada biasanya dilakukan secara acak, mengumpulkan data memakai instrumen penelitian, dan analisis data sifatnya kuantitatif atau statistik untuk menguji hipotesis (Sugiyono, 2015, hal. 15). Penelitian korelasional adalah penelitian yang menyelidiki ada tidaknya hubungan/korelasi antara dua atau lebih variabel. Hubungan itu dinyatakan dengan koefisien korelasi (r) yang sekaligus menunjukkan besar dan arah hubungan. Besarnya koefisien korelasi minimal -1 dan maksimal $+1$. Arah hubungan mungkin positif, yaitu apabila variabel X naik maka variabel Y turun, dan sebaliknya (J, Zen, & Darmansyah, 2018, hal. 12).

2. Definisi Konseptual

Penelitian ini berjudul “Praktik Politik Uang dan Pengaruhnya Pada Perilaku Pemilih di Pilkada Kabupaten Purbalingga 2020: Studi di Kelurahan Bancar”. Untuk lebih mudah menjelaskan maksud dari penelitian ini maka berikut ini adalah penjelasan serta penegasan singkatnya:

Politik Uang: Politik uang adalah praktik yang merujuk pada distribusi uang (uang tunai dan terkadang dalam bentuk barang) dari kandidat kepada pemilih di saat pemilu (Aspinall & Sukmajati, 2015, hal. 2). Artinya, politik uang adalah upaya untuk mempengaruhi keputusan seseorang dalam memilih atau dalam hal lain dengan memberikan imbalan berupa uang atau barang.

Perilaku Pemilih: Perilaku memilih adalah aktivitas memilih yang erat kaitannya dengan keputusan memilih atau tidak memilih (*to vote or not to vote*) dalam pemilihan umum. Jika pemilih memutuskan untuk memilih (*to vote*) maka, pemilih akan memilih atau mendukung kandidat tertentu (Surbakti, 2010, hal. 186).

Pilkada 2020: Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah atau biasa disebut dengan Pilkada atau Pemilukada adalah pemilihan umum untuk memilih pasangan calon kepala daerah yang diusulkan oleh partai politik (parpol) atau gabungan parpol dan perseorangan (Simkada, 2020). Pilkada 2020 dilaksanakan pada tanggal 9 Desember tahun 2020 kemarin untuk masa bakti 2020-2024.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat kita simpulkan bahwa apa yang dimaksud dengan “Praktik Politik Uang dan Pengaruhnya Pada Perilaku Pemilih di

Pilkada Kabupaten Purbalingga 2020: Studi di Kelurahan Bancar” adalah bagaimana pengaruh politik uang baik yang berbentuk uang ataupun dalam bentuk lain, terhadap perilaku pemilih yang ada di Kelurahan Bancar pada saat pemilihan kepala daerah tahun 2020 lalu.

3. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan suatu batasan peneliti pada variabel penelitiannya agar variabel penelitian bisa diukur. Maka dari itu, definisi operasional merupakan definisi penjelas, karena hasil dari definisi yang diberikannya, membuat sebuah variabel penelitian menjadi lebih jelas (Syahrudin & Salim, 2012, hal. 108).

Pada penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu Variabel Independen (Variabel X) dan Variabel Dependen (Variabel Y). Sesuai dengan judul skripsi yang dipilih yaitu “Praktik Politik Uang dan Pengaruhnya Pada Perilaku Pemilih di Pilkada Kabupaten Purbalingga 2020: Studi di Kelurahan Bancar”, maka variabel penelitian yaitu:

- a. Politik Uang – X
- b. Perilaku Pemilih – Y

Untuk memudahkan dalam melihat dan memahami variabel penelitian yang akan digunakan, maka penulis membaginya ke dalam bentuk operasionalisasi variabel seperti yang dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 1 Definisi Operasional

Variabel	Dimensi	Indikator	No. Pernyataan
Variabel Independen			
Politik Uang	<i>Vote Buying</i>	Pemberian uang menjelang hari pemungutan suara	1
	<i>Individual Gifts</i>	-Pemberian sembako pada saat kampanye	2
		-Pemberian barang/souvenir yang terdapat nama/ <i>image</i> calon kandidat	3
	<i>Services & Activities</i>	-Membiayai acara yang diselenggarakan oleh masyarakat -Mengadakan pelayanan umum	4 12

		seperti pengobatan gratis ataupun yang lainnya	
	<i>Club Goods</i>	Pemberian perlengkapan ibadah untuk masjid ataupun hal serupa lainnya	6
	<i>Pork Barrel Projects</i>	-Proyek-proyek skala kecil yang ditujukan untuk kelompok masyarakat tertentu -Janji calon kandidat terhadap program-program baru jika mereka menang dalam pemilihan	10 8
	Faktor Ekonomi	Menerima pemberian dari calon kandidat untuk memenuhi desakan kebutuhan	5
	Faktor Pendidikan Politik	Tidak tahu jika menerima politik uang adalah hal yang salah	7,9
	Faktor Kebudayaan/Kebiasaan	Menerima pemberian dari calon kandidat setiap ada pemilihan umum	11
Variabel Dependen			
Perilaku Pemilih	Pendekatan Sosiologis	-Memilih kandidat dengan melihat usianya	1
		-Memilih kandidat dengan melihat jenis kelaminnya	2
		-Memilih kandidat dengan melihat agamanya	3
	Pendekatan Psikologi	-Memilih kandidat yang berasal dari partai yang disukai	4
		-Memilih kandidat yang dirasa dekat dengannya	5
	Pendekatan Pilihan Rasional	-Memilih kandidat uang memberikan uang ataupun barang	8

		-Memilih kandidat dilihat dari visimisinya	6
		-Memilih kandidat dilihat dari <i>track-record</i> -nya	7

4. Sumber dan Jenis Data

a) Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari responden melalui alat pengambilan data pada subjek penelitian (Syaifuddin, 2010, hal. 91). Data primer pada penelitian ini adalah para pemilih di Kelurahan Bancar pada pilkada 2020.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat dari sumber kedua alias diluar lokasi penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa artikel, jurnal, media *online*, dan berbagai literatur lainnya yang berkaitan dengan politik uang dan perilaku pemilih.

Penelitian ini memakai jenis data kuantitatif. Yang artinya adalah data yang berhubungan dengan angka dan dapat dihitung dengan cara perhitungan statistika atau matematika. Data kuantitatif dalam penelitian adalah hasil sebaran dari kuesioner yang akan dibagikan nantinya kepada para pemilih di Kelurahan Bancar pada pilkada 2020 lalu.

5. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang meliputi: obyek/subyek dengankualitas dan karakteristik eksklusif yang diambil oleh peneliti untuk diteliti dan ditarik kesimpulannya. Oleh karena itu, yang menjadi populasi tidak hanya orang saja, obyek dan juga benda alam bisa termasuk kedalam populasi. Populasi bukan hanya jumlah obyek/subyek penelitian, tetapi meliputi semua karakteristik/sifat yang ada pada subyek/obyek itu (Sugiyono, 2013, hal. 80).

Populasi pada penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Bancar yang telah terdaftar dalam data rekap per TPS yaitu sebanyak 3.000 orang (Purbalingga K. K., 2020).

Sampel merupakan sebagian kecil populasi yang di survei (sampel secara harfiah artinya contoh). Untuk menentukan sampel populasi, ada beberapa aturan, yaitu sampel harus mewakili populasi (Syahrums & Salim, 2012, hal. 113).

Dikarenakan jumlah populasi dalam objek penelitian sangat banyak, serta terbatasnya waktu penelitian, maka penulis menggunakan sampel penelitian dengan harapan penelitian dapat lebih akurat dan efisien waktu. Untuk menghitung berapa minimal sampel yang dibutuhkan, penulis menggunakan rumus *Slovin* dengan taraf kesalahan 10% sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

$$n = \frac{3.000}{1 + 3.000(10\%)^2} = 96,774 \text{ dibulatkan menjadi } 97 \text{ responden}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

e^2 = Presisi (ditetapkan 10% dengan tingkat kepercayaan 95%)

Dengan demikian maka jumlah sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 97 responden.

Adapun teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *probability sampling* dengan menggunakan pendekatan *simple random sampling* (sampling acak sederhana). Alasan penulis menggunakan teknik ini dikarenakan anggota populasi dalam penelitian ini dianggap homogen karena sampel yang ditetapkan merupakan masyarakat Kelurahan Bancar yang telah terdaftar dalam daftar rekap per TPS.

6. Teknik Pengumpulan Data

Metode atau teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Kuesioner, adalah metode pengumpulan data melalui beberapa pertanyaan tertulis untuk memperoleh informasi atau data melalui responden. Artinya, kuesioner adalah lembaran yang berisi beberapa pertanyaan yang menurut pertanyaannya terdiri atas dua bentuk, yaitu yang pertama adalah kuesioner dengan pertanyaan tertutup dan yang kedua adalah kuesioner dengan pertanyaan terbuka (Syahrudin & Salim, 2012, hal. 135). Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan kuesioner dengan pertanyaan tertutup. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada kuesioner merupakan hasil turunan indikator-indikator variabel yang telah dijelaskan di definisi operasional. Untuk menentukan nilai dari kuesioner tersebut,

penulis menggunakan skala likert dengan ukuran nilai 1-5 untuk dapat menjumlahkan berapa skor yang dihasilkan tiap responden. Nilai skala likert tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 2Bobot Penilaian Kuesioner

No.	Alternatif Jawaban	Skor
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Netral (N)	3
4	Tidak Setuju (TS)	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

b) Dokumentasi, adalah teknik pengumpulan data dengan cara megalir atau mengambil mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti (Nasution, 2003, hal. 143). Penggunaan dokumentasi dari penelitian ini dimaksudkan guna memperoleh data sekunder atau pendukung berbentuk dokumen, arsip, jurnal, dan lain sebagainya.

7. Uji Kualitas Data

a) Uji Validitas

Sebuah hasil penelitian dikatakan valid bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2013, hal. 121). Uji validitas dihitung menggunakan korelasi *pearson*. Setelah diukur pada *software* SPSS, akan ditampilkan tingkat signifikansi dari semua pertanyaan. Jika jumlah korelasi yang didapatkan lebih besar dari angka kritik ($r \text{ hitung} > r \text{ table}$) maka instrumen tersebut dapat dikatakan valid atau signifikan.

b) Uji Reliabilitas

Kemudian hasil penelitian dikatakan reliabel bila terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan

menghasilkan data yang sama (Sugiyono, 2013, hal. 121). Teknik statistik yang digunakan untuk pengujian tersebut adalah *cronbach's alpha* dengan bantuan *software SPSS*. *Cronbach's alpha* merupakan uji reliabilitas untuk alternatif jawaban lebih dari dua (Ashari, 2011, hal. 34). Secara umum suatu instrumen dikatakan reliabel jika memiliki koefisien *cronbach's alpha* $> 0,6$.

8. Uji Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, suatu variabel independen dan dependen ataupun keduanya berdistribusi normal atau tidak. Hasil uji statistik akan mengalami penurunan apabila suatu variabel tidak berdistribusi normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan pengujian grafik atau dengan uji statistik *One Sample Kolmogorv-Smirnov*, yaitu dengan ketentuan apabila nilai signifikansi diatas 5% atau pada taraf 0,05 maka data memiliki distribusi normal, dan sebaliknya apabila nilai signifikansi dibawah 5% atau 0,05 maka data tidak berdistribusi normal.

9. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah tahap kritis didalam penelitian, berawal dari penarikan sampel dan pengumpulan data maka diperoleh data kasar yang masih harus diolah pada tahapan selanjutnya yaitu menginterpretasikan data kasar tersebut agar dapat diperoleh hasil penelitian (Ramadhani, 2016, hal. 61).

Tahapan analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Teknik Analisis Regresi Linear

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana digunakan apabila variabel dependen hanya dipengaruhi oleh satu variabel independen. Adapun rumus analisis regresi linear sederhana yaitu sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Keterangan:

Y = Variabel dependen

X = Variabel independen

a = Konstanta (intersep)

b = Konstanta regresi (slop)

b) Pengujian Hipotesis

(1) Koefisien Determinasi (*R-Square*)

Koefisien determinasi merupakan ukuran untuk mengetahui kesesuaian atau ketepatan antara nilai dugaan atau garis regresi dengan data sampel. Apabila nilai koefisien korelasi sudah diketahui, maka untuk mendapatkan koefisien determinasi dapat diperoleh dengan mengkuadratkannya.

c) Uji t

Uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Apabila nilai probabilitas signifikan lebih kecil dari 0,05 (5%) maka suatu variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Adapun kriterianya yaitu:

Jika $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$, maka H_a ditolak dan H_o diterima

Jika $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$, maka H_a diterima dan H_o ditolak.

10. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian dan metode penelitian, dan sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memaparkan teori, tinjauan pustaka, dan juga hipotesis yang digunakan penulis untuk melakukan penelitian.

BAB III DESKRIPSI WILAYAH DAN PENYAJIAN DATA

Bab ini berisi deskripsi objek penelitian dan juga hasil uji validitas, reliabilitas, dan uji normalitas data.

BAB IV BENTUK PRAKTIK POLITIK UANG YANG TERJADI DI KELURAHAN BANCAR KABUPATEN PURBALINGGA

Bab ini memuat penjelasan apa saja bentuk praktik politik uang yang terjadi di Kelurahan Bancar.

BAB V FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI TERJADINYA POLITIK UANG DI KELURAHAN BANCAR KABUPATEN PURBALINGGA

Bab ini menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya politik uang di Kelurahan Bancar.

BAB VI PENGARUH POLITIK UANG TERHADAP PERILAKU PEMILIH DI KELURAHAN BANCAR KABUPATEN PURBALINGGA

Bab ini memaparkan bagaimana pengaruh politik uang terhadap perilaku pemilih di Kelurahan Bancar.

BAB VII PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Politik Uang

Sejak awal demokratisasi di Indonesia yaitu pada akhir 1990-an, istilah politik uang kini telah banyak digunakan untuk menggambarkan kegiatan atau aktivitas seperti yang telah disebut diatas. Meskipun istilah tersebut sudah umum digunakan, namun pengertian atas istilah tersebut belum jelas. Orang-orang memakai istilah ini dengan definisinya sendiri. politik uang dalam Bahasa Indonesia adalah suap. Arti suap dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang sogok. Politik uang adalah pertukaran uang dengan posisi/kebijakan/keputusan politik yang mengatasnamakan kepentingan rakyat tetapi sesungguhnya demi kepentingan pribadi/kelompok/partai. Menurut Thahjo Kumolo dalam Ramadhani (2016, hal. 27) politik uang adalah suatu upaya memengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual-beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih.

Politik uang dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan politik uang sebagai politik uang tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan. Tindakan itu bisa terjadi dalam jangkauan (*range*) yang lebar, dari pemilihan kepala desa sampai pemilihan umum suatu negara. Maka politik uang adalah semua tindakan yang disengaja oleh seseorang atau kelompok dengan memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu atau tidak menggunakan hak pilihnya untuk memilih kandidat tertentu atau dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak tertentu. Dengan demikian politik uang adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pemberian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang umumnya dilakukan untuk menarik simpati para pemilih dalam menentukan hak suaranya tiap pemilihan umum (2016, hal. 28)

Istilah yang sama juga dipakai untuk menggambarkan praktik *vote buying* dalam situasi kongres partai. Bahkan, istilah tersebut lebih umum digunakan untuk praktik korupsi politik juga, seperti keterlibatan anggota parlemen yang menggelapkan dana dari proyek pemerintah maupun menerima suap dari pengusaha. Tetapi, sekitar sepuluh tahun kemudian, istilah politik uang banyak dipakai untuk konteks yang lebih terbatas. Kini, istilah politik uang digunakan untuk menggambarkan kegiatan atau aktivitas yang mengacu pada distribusi uang (dalam bentuk uang tunai dan kadang-kadang dalam bentuk barang) yang diberikan oleh calon kepada pemilih selama pemilihan (Aspinall & Sukmajati, 2015, hal. 2).

Secara yuridis formal berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, pengertian politik uang adalah perbuatan yang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung pada saat kampanye, masa tenang, maupun pada hari pemungutan suara. M Abdul Kholiq berpendapat bahwa politik uang adalah tindakan pendistribusian uang maupun materi lainnya yang berasal dari milik pribadi politisi (caleg/capres dan cawapres, calon kepala daerah) maupun milik partai politik untuk mempengaruhi perolehan suara dalam pemilu. Selain itu, politik uang merupakan salah satu bentuk pemberian yang berupa uang maupun materi lainnya (contohnya sembako) maupun pemberian janji yang menjadi suatu upaya dalam mempengaruhi pemilik suara. Jadi politik uang adalah usaha mempengaruhi orang lain melalui penggunaan imbalan materi dalam proses politik dan juga kekuasaan bernama pemilu (Kholiq, 2014).

Pendapat lain mengatakan bahwa secara sederhana, politik uang dapat diartikan sebagai suatu pemberian atau janji dari para kontestan dalam pemilu kepada masyarakat pemilih agar supaya pemilih tersebut tidak menggunakan hak pilihnya atau agar ia menjatuhkan pilihannya kepada orang yang telah memberikan imbalan tertentu (berupa barang atau janji) pada saat pemilihan umum. Politik uang umumnya dilakukan untuk mendapatkan dukungan politik para pemilih dalam pemilihan umum (Chandra & Ghafur, 2020, hal. 55). Dari beberapa definisi tentang politik uang yang telah disebutkan diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa politik uang adalah perbuatan pemberian uang, barang, ataupun janji kepada para pemilih dengan tujuan untuk memengaruhi keputusan pemilih tersebut dalam suatu pemilihan umum.

Merujuk pada Aspinall, penulis menggunakan konsep patronase dan klientelisme dalam mendefinisikan politik uang. Patronase adalah pendistribusian

uang tunai, barang, jasa, maupun manfaat ekonomi lainnya (misalnya kontrak kerja atau proyek) yang diberikan oleh politisi, selain itu keuntungan ini juga diperuntukkan kepada individu (misalnya amplop yang didalamnya terdapat uang tunai) dan juga kepada kelompok/komunitas (misalnya dengan memberikan lahan kosong yang nantinya akan dijadikan lapangan sepak bola yang ditujukan untuk pemuda di suatu desa). Patronase juga bisa berbentuk pemberian uang dan juga barang yang diberikan untuk pemilih yang dananya menggunakan dana pribadi (contohnya untuk *vote buying*) atau dana dari publik (contohnya proyek *pork barrel* yang didanai oleh pemerintah) (Aspinall & Sukmajati, 2015, hal. 4). Patronase merupakan konsep kekuasaan yang lahir dari hubungan yang tidak seimbang antara patron disatu pihak dan klien di pihak yang lain. Ketidakseimbangan ini pada dasarnya berkaitan erat dengan kepemilikan yang tidak sama atas sumber daya dalam masyarakat. Karena itu, dalam fenomena seperti ini interelasi telah diikat oleh kepentingan dan dimanipulasi oleh tujuan masing-masing walaupun kedua-duanya berada dalam kedudukan yang tidak seimbang (Agustino, 2014, hal. 70).

Aspinall dan Sukmajati mendefinisikan patronase sebagai pertukaran keuntungan demi memperoleh dukungan politik yang mana unsur pertukaran dalam patronase terkadang problematik. Ketika kandidat mendistribusikan hadiah atau membayar pemilih, sebenarnya kandidat tersebut tidak yakin dengan bentuk respons balik yang akan diberikan oleh pemilih. Hal ini sebenarnya menjadi salah satu masalah utama dalam politik patronase. Pemilih akan melihat keuntungan yang mereka peroleh dengan beragam cara. Beberapa pemilih mungkin berpikir bahwa mereka terikat kewajiban untuk memberikan dukungan politik kepada si pemberi. Beberapa lainnya menganggap hal itu sebagai pemberian yang tidak mengikat, sedangkan yang lainnya justru merasa tersinggung. Salah satu upaya dari para kandidat untuk mengatasi masalah ketidakpastian ini adalah menjalankan patronase dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai kultural, misalnya membungkus pemberian sebagai amal yang mengandung sanksi religius atau sebagai kemurahan hati sosial pada situasi para tokoh kaya dan terhormat harus terlibat. Contoh lain adalah dengan cara mencoba mengaktivasi norma-norma sosial tentang ucapan terima kasih, timbal balik, dan kewajiban personal sehingga mendorong para penerima pemberian untuk membalas pemberian. Para kandidat juga berusaha membangun relasi klientelistik dengan para penerima keuntungan dari politik patronase ini secara langsung atau

melalui bantuan perantara (*broker*) yang dapat dipercaya dan yang telah memiliki relasi personal cukup dekat dengan pemilih (Aspinall & Sukmajati, 2015, hal. 22).

Klientelisme politik adalah keadaan dimana para pemilih, pegiat kampanye, maupun aktor lain memberikan dukungan elektoral kepada para politisi dengan imbalan bantuan atau keuntungan materi. Politisi ini menggunakan metode klientelistik guna memenangkan pemilihan dengan mendistribusikan bantuan, barang, maupun uang tunai kepada pemilih baik secara individu ataupun kelompok. Dengan itu mereka diharapkan bisa membalasnya dengan memberikan suara mereka bagi para politisi tersebut. Barang-barang dan bantuan tersebut bisa berwujud dalam berbagai bentuk, mulai dari amplop berisi uang tunai hingga bantuan untuk meloloskan seorang anak pemilih ke dalam program beasiswa pemerintah, dari sebuah pekerjaan sebagai pesuruh di rumah sakit hingga berupa sebuah kontrak proyek pembangunan dari pemerintah (Aspinall & Berenschot, 2019, hal. 2).

Menurut Hutchcroft dalam Aspinall (2015) patronase merujuk pada materi atau keuntungan lain yang didistribusikan oleh politisi kepada pemilih atau pendukung. Sebaliknya, klientelisme merujuk pada karakter relasi antara politisi dan pemilih atau pendukung. Klientelisme merupakan ‘relasi kekuasaan yang personalistik’, dan keuntungan material dipertukarkan dengan dukungan politik. Relasi klientelistik adalah relasi tatap muka secara langsung (*face to face*). Selanjutnya, menurut Hicken dalam Aspinall (2015) menjelaskan bahwa definisi klientelisme setidaknya mengandung tiga hal. Pertama, kontingensi atau timbal balik; ‘pemberian barang atau jasa dari satu pihak (patron atau klien merupakan respons langsung terhadap pemberian keuntungan dari pihak lain. Biasanya, sumber-sumber material dipertukarkan dengan suara atau bentuk dukungan politik lainnya. Kedua, hierarkis; ada penekanan pada relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara patron dengan klien. Ketiga, aspek pengulangan; pertukaran klientelistik berlangsung secara terus-menerus.

Elaborasi perbedaan antara patronase dengan klientelisme adalah sebagai berikut. Patronase mengacu pada materi maupun keuntungan lain yang dibagikan oleh politisi kepada para pemilih. Sebaliknya, klientelisme mengacu pada karakteristik hubungan antara politisi dengan para pemilih. Namun, tidak semua patronase disampaikan dalam relasi yang bersifat klientelistik. Sebagai contoh jika seorang kandidat yang memberikan uang atau barang kepada seorang pemilih yang belum pernah ia temui dan kemungkinan besar tidak akan pernah ia temui lagi. Relasi

semacam ini tidak bisa disebut sebagai relasi yang berulang karena relasi ini merupakan relasi satu kali. Oleh karena itu, dalam sebuah relasi, terkadang tidak terjadi timbal balik karena sang klien tidak merasa berkewajiban untuk memberikan timbal balik kepada sang patron melalui cara sang klien menggunakan hak suaranya untuk sang patron dalam pemilihan umum (Aspinall & Sukmajati, 2015, hal. 4).

B. Perilaku Pemilih

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*-nya, dan sebagainya (Budiardjo, 2015, hal. 367). Perilaku pemilih (*voting behavior*) merupakan bentuk partisipasi politik aktif sekaligus sebagai tindakan untuk memperoleh dukungan rakyat terhadap sistem politik. *Voting behavior* lebih praktis diartikan sebagai perilaku memberikan suara (*vote*), dimana individu memberikan suaranya dalam proses pemilihan (Syafhendry, 2016, hal. 8).

Firmanzah dalam Ramadhani (2016, hal. 40) mengartikan pemilih adalah semua pihak yang menjadi tujuan utama para kandidat untuk mereka pengaruhi dan yakini agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada kandidat yang bersangkutan. Dinyatakan sebagai pemilih yaitu mereka yang telah terdaftar sebagai peserta pemilih oleh petugas pendata peserta pemilih atau mereka yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT). Pemilih dalam hal ini dapat berupa konstituen maupun masyarakat pada umumnya. Konstituen adalah kelompok masyarakat yang merasa diwakilkan oleh suatu ideologi tertentu yang kemudian termanifestasikan dalam institusi politik seperti partai politik dan seorang pemimpin. Perilaku pemilih juga sarat dengan ideologi antara pemilih dengan partai politik atau kontestan pemilu. Masing-masing kontestan membawa ideologi yang saling berinteraksi. Selama periode kampanye pemilu, muncul kristalisasi dan pengelompokan antara ideologi yang dibawa oleh kandidat. Masyarakat akan mengelompokkan dirinya kepada kontestan yang memiliki ideologi sama dengan yang mereka anut sekaligus juga

menjauhkan diri dari ideologi yang berseberangan dengan mereka (Ramadhani, 2016, hal. 39)

Menurut Mujani dalam Syafhendry (2016) studi perilaku pemilih semakin mendapat tempat dan mempunyai peran penting dalam merekam opini publik, termasuk kecenderungan perilaku pemilih. Jack C Plano dalam Fadillah (2010) berpendapat bahwa perilaku pemilih adalah suatu studi yang memusatkan diri pada bidang yang menggeluti kebiasaan atau kecenderungan pilihan rakyat dalam pemilihan umum, serta latar belakang mengapa mereka melakukan pemilihan itu. Dari beberapa definisi mengenai perilaku pemilih yang sudah disebutkan diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa perilaku pemilih adalah kegiatan yang berupa pemberian suara seorang individu yang berhubungan dengan pilihan untuk memilih atau tidak memilih di dalam suatu pemilihan umum.

Terdapat beberapa pendekatan yang biasanya digunakan untuk mengkaji tentang perilaku pemilih, yaitu pendekatan struktural, pendekatan sosiologis, pendekatan ekologis, pendekatan psikologis, dan pendekatan pilihan rasional (Surbakti, 2010, hal. 186). Tetapi dalam penelitian ini penulis tidak akan menggunakan semua pendekatan diatas untuk menganalisis perilaku pemilih di Kelurahan Bancar, disini penulis hanya akan menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan psikologis, pendekatan sosiologis, dan pendekatan pilihan rasional yang merujuk pada Mujani (2012).

1. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis adalah yang terawal muncul dalam tradisi studi perilaku pemilih. Model ini berkembang di Eropa dan di Amerika pada tahun 1950-an dan dibangun dengan asumsi bahwa perilaku pemilih ditentukan oleh karakteristik sosiologis para pemilih, terutama kelas sosial, agama, dan kelompok etnik/kedaerahan/bahasa. Orang yang berpendidikan cenderung berpartisipasi dalam pemilu karena kesadaran tentang arti penting pemilu bagi kepentingan dirinya dan masyarakat banyak. Hasil pemilu akan menentukan kebijakan-kebijakan publik yang akan berkaitan dengan semua warga negara, termasuk dirinya. Orang yang punya kesadaran ini biasanya orang yang relatif berpendidikan. Oleh karena itu, dibandingkan yang kurang berpendidikan, mereka yang berpendidikan lebih mungkin untuk ikut pemilu (Mujani, Liddle, & Ambardi, 2012, hal. 6).

Dalam model sosiologis, penggerak utama partisipasi dan pilihan politik adalah perbedaan-perbedaan dalam hal jenis kelamin, usia, etnis, atau daerah tempat

tinggal, agama dan tingkat kesalehan, serta kelas sosial seperti yang diukur dari tempat tinggal di perkotaan versus pedesaan, tingkat pendidikan, penghasilan, dan jenis pekerjaan. Para cendekiawan dan politisi Indonesia telah memberikan perhatian paling besar pada agama, etnisitas, dan kelas sosial, yang semuanya dianggap penggerak utama (Mujani, Liddle, & Ambardhi, 2019, hal. 91)

Pendekatan sosiologis cenderung menempatkan kegiatan memilih dalam kaitan dengan konteks sosial. Konkretnya, pilihan seseorang dalam pemilihan umum dipengaruhi latar belakang demografi dan sosial ekonomi, seperti jenis kelamin, tempat tinggal (kota dengan desa), pekerjaan, pendidikan, kelas, pendapatan, dan agama (Surbakti, 2010, hal. 186). Penulis akan menggunakan pendekatan sosiologis untuk menganalisis perilaku pemilih ditinjau dari kategorisasi sosial contohnya adalah umur, jenis kelamin, dan agama yang dianggap memiliki peranan yang cukup penting dalam pengelompokan sosial. Hal ini adalah sesuatu yang sangat penting dalam memahami perilaku pemilih.

Faktor sosiologis lain yang dipercaya penting mempengaruhi keputusan seseorang untuk memilih partai politik atau seorang calon pejabat publik adalah agama. Partai politik atau calon pejabat publik yang punya *platform* keagamaan yang sama dengan karakteristik keberagaman pemilih, cenderung akan didukung oleh pemilih tersebut. Seorang muslim cenderung untuk memilih partai yang ber-*platform* Islam dibanding yang ber-*platform* sekular. Karena itu, perbedaan *platform* atau citra yang jelas dari sisi keagamaan antara satu partai dengan partai lainnya, atau antara satu calon dengan calon lainnya, akan mengungkapkan sejauh mana faktor agama menjadi penting bagi pemilih dilihat dari karakteristik keagamaan mereka. Dalam situasi dimana partai-partai politik atau calon-calon pejabat publik tidak menunjukkan perbedaan orientasi keagamaan yang jelas antara yang satu dengan yang lain, maka faktor agama menjadi kabur signifikansinya dalam menentukan pilihan politik bagi pemilih (Mujani, Liddle, & Ambardi, 2012, hal. 14)

2. Pendekatan Psikologis

Menurut Verba dalam Mujani (2012) pendekatan psikologis memperkenalkan apa yang disebut sebagai budaya demokrasi atau *civic culture*, dan secara lebih khusus lagi apa yang disebut sebagai budaya partisipasi politik, termasuk partisipasi dalam pemilihan umum. Menurut pendekatan ini, seorang warga berpartisipasi dalam pemilu atau pilpres bukan saja karena kondisinya lebih baik secara sosial-ekonomi, atau karena berada dalam jaringan sosial, akan tetapi karena ia tertarik dengan politik,

memiliki perasaan dekat dengan partai tertentu (identitas partai), punya informasi yang cukup untuk menentukan pilihan, merasa suaranya berarti, serta percaya bahwa pilihannya dapat ikut memperbaiki keadaan (*political efficacy*) (Mujani, Liddle, & Ambardi, 2012, hal. 22). Verba dalam Mujani (2012) berpendapat seseorang berpartisipasi dalam politik seperti memilih dalam pemilu bukan saja karena ia berada dalam jaringan sosial, terlibat dalam kegiatan *civic*, tetapi juga karena ia ingin berpartisipasi. Walaupun ia terlibat (*engaged*) dalam kehidupan *civic*, ia tidak secara otomatis berpartisipasi dalam pemilu bila ia tidak ingin berpartisipasi.

Pendekatan psikologi sosial hampir sama dengan model perilaku politik. Sebuah ide atau gagasan dalam psikologi sosial yang dipakai untuk mendefinisikan perilaku untuk memilih dalam pemilihan umum adalah identitas partai politik. Konsep ini mengacu pada opini pemilih terhadap partai yang memiliki keterikatan emosional pemilih atas partai tertentu. Secara khusus, seseorang yang secara emosional merasa memiliki kedekatan dengan suatu partai tertentu akan selalu memilih partai tersebut tanpa terpengaruh alasan lain (Surbakti, 2010, hal. 187). Penulis akan menggunakan pendekatan psikologi sosial dengan menekankan pada dua aspek, yaitu apakah partai yang dipilih saat pilkada tersebut adalah partai yang memiliki hubungan yang dekat atau mempunyai keterikatan emosional, dan orientasi kepada kandidat.

3. Pendekatan Pilihan Rasional

Pendekatan pilihan rasional menganggap kegiatan memilih sebagai aktivitas perhitungan untung dan rugi. Bukan hanya mempertimbangkan “ongkos” memilih, tetapi juga kemungkinan suaranya dapat merubah hasil yang diharapkan, dan hal ini digunakan pemilih dan calon yang sedang bersaing agar terpilih sebagai wakil rakyat maupun pejabat pemerintah (Surbakti, 2010, hal. 187). Menurut perspektif rasionalitas pemilih ini, seorang warga berperilaku rasional. Yakni menghitung bagaimana caranya mendapatkan hasil maksimal dengan ongkos minimal. Jadi, jika seorang warga ingin mendapatkan hasil yang sama dari pemilu, terlepas dari ikut pemilu ataupun tidak, maka warga tersebut seharusnya tidak ikut pemilu. Jika bisa mendapatkan barang tanpa ongkos (waktu dan tenaga), untuk apa harus mengeluarkan ongkos. Dengan kata lain, dalam persepektif pilihan rasional atau ekonomi-politik, seorang warga tidak akan ikut pemilu karena tidak ikut pemilu akan lebih menguntungkan. Mereka pun akan mendapatkan hasil tanpa keluar ongkos (Mujani, Liddle, & Ambardi, 2012, hal. 27).

Perspektif pemilih rasional juga membantu menjelaskan pilihan politik. Dalam konteks persaingan, dimana ada petahana dan oposisi yang jelas berbeda, yang merupakan prakondisi kontekstual bagi pemberian suara rasional, pilihan politik dalam pemilihan umum (Mujani, Liddle, & Ambardhi, 2019, hal. 219). Penulis akan menggunakan pendekatan pilihan rasional untuk menganalisis perilaku pemilih. Karena dalam konteks pendekatan pilihan rasional, pemilih berpikir jika mereka akan mendapatkan timbal balik, maka mereka akan memilih. Ketika seorang pemilih merasa tidak diuntungkan dengan keputusannya untuk memilih calon yang bersaing, mereka tidak akan berpartisipasi atau memilih dalam proses pemilihan/pilkada.

C. Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara terhadap permasalahan yang sedang kita hadapi. Harus kita sadari bahwa hipotesis itu sendiri merupakan penjelasan yang bersifat sementara yang membantu kita dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian, hipotesis yang disusun dan dinyatakan untuk menjadi hipotesis penelitian selalu berbentuk “kecurigaan” atau asumsi mengenai sesuatu hal. Maka dari itu, hipotesis penelitian umumnya disusun menjadi bentuk hipotesis alternatif (H_a). Dikatakan hipotesis alternatif karena isinya mencakup perkiraan tentang sesuatu hal, relasi antara variabel maupun mekanisme relasi antara variabel. Pada saat yang sama, uji statistik hipotesis alternatif (H_a) seperti yang telah disebutkan diatas menggunakan apa yang disebut sebagai hipotesis nol (H_0). Hipotesis nol (H_0) digunakan untuk uji statistik dalam konteks “praduga tidak bersalah” dengan asumsi bahwa dugaan H_a tak ada. Jadi, H_0 menguji dugaan tersebut (Syahrudin & Salim, 2012, hal. 98).

Berdasarkan uraian latar belakang dan kerangka teori yang telah diuraikan diatas, maka dapat diajukan Hipotesis Alternatif dan Hipotesis Nol sebagai jawaban sementara untuk masalah penelitian yaitu:

H_a = Ada pengaruh antara politik uang terhadap perilaku pemilih pada pilkada 2020 di Kelurahan Bancar.

H_0 = Tidak ada pengaruh antara politik uang terhadap perilaku pemilih pada pilkada 2020 di Kelurahan Bancar.

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH DAN UJI KUALITAS DATA

A. Deskripsi Singkat Objek Penelitian

1. Kondisi Geografis

Kabupaten Purbalingga termasuk Provinsi Jawa Tengah bagian barat daya yang terletak pada posisi $101^{\circ} 11'$ - $109^{\circ} 35'$ Bujur Timur dan $07^{\circ} 10'$ - $06^{\circ} 29'$ Lintang Selatan (BPS Kabupaten Purbalingga, 2021). Batas wilayah Kabupaten Purbalingga secara administratif dapat diuraikan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Pemalang
- Sebelah Selatan : Kabupaten Banyumas dan Banjarnegara
- Sebelah Timur : Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Pekalongan
- Sebelah Barat : Kabupaten Banyumas

Tabel 3. 1Jarak dari Purbalingga ke Beberapa Kota Sekitarnya

Kota	Jarak
Semarang	191 km
Purwokerto	20 km
Cilacap	60 km
Banjarnegara	45 km
Wonosobo	75 km

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga

Secara administratif Kabupaten Purbalingga terbagi menjadi 239 desa/kelurahan yang tersebar di 18 Kecamatan. Dari jumlah tersebut terdiri dari 224 Desa dan 15 Kelurahan. Untuk luasan masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

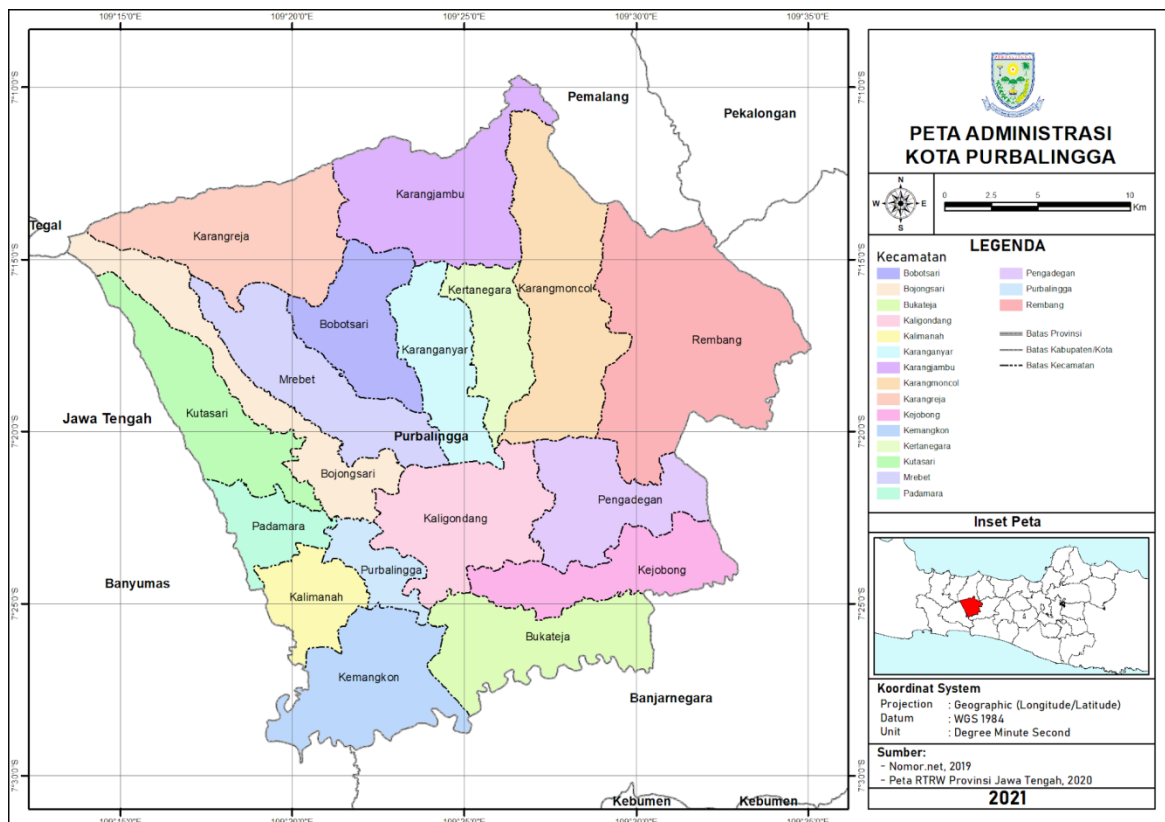
Tabel 3. 2Luas Wilayah Administrasi Purbalingga Dirinci Tiap Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Daerah (Ha)
1	Kemangkon	4.513
2	Bukateja	4.240
3	Kejobong	3.999
4	Pengadegan	4.175

5	Kaligondang	5.054
6	Purbalingga	1.472
7	Kalimanah	2.251
8	Padamara	1.727
9	Kutasari	5.290
10	Bojongsari	2.925
11	Mrebet	4.789
12	Bobotsari	3.228
13	Karangreja	7.449
14	Karangjambu	4.609
15	Karanganyar	3.055
16	Kartanegara	3.802
17	Karangmoncol	6.027
18	Rembang	9.159
Jumlah		77.764

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga

Gambar 3. 1 Peta Administrasi Purbalingga



Luas wilayah Kabupaten Purbalingga adalah 77.764.122 ha atau 2,39% dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah (3,254 ribu ha). Dari 18 Kecamatan yang ada, Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Rembang, yaitu 9.159 ha. Sedangkan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Purbalingga dengan luas 1.472 ha.

2. Topografi

Wilayah Kabupaten Purbalingga mempunyai topografi yang beranekaragam, meliputi dataran tinggi/perbukitan dan dataran rendah. Adapun pembagian bentang alamnya adalah sebagai berikut:

- a. Bagian Utara merupakan daerah dataran tinggi yang berbukit-bukit dengan kelerengan lebih dari 40%, meliputi Kecamatan Karangreja, Karangjambu, Bobotsari, Karanganyar, Kertanegara, Rembang, sebagian wilayah Kecamatan Kutasari, Bojongsari, dan Mrebet.
- b. Bagian Selatan, merupakan daerah yang relatif rendah dengan nilai faktor kemiringan berada antara 0% sampai dengan 25% meliputi wilayah Kecamatan Kalimanah, Padamara, Purbalingga, Kemangkon, Bukateja, Kejobong, Pengadegan, sebagian wilayah Kutasari, Bojongsari, dan Mrebet.

3. Demografi

Penduduk Kabupaten Purbalingga hasil sensus penduduk tahun 2020 berjumlah 998.561 jiwa yang terdiri dari penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 505.281 dan perempuan sebanyak 493.280 jiwa dengan rasio jenis kelamin 102,40. Banyaknya rumah tangga mencapai 336.598 atau rata-rata anggota per rumah tangga tiga orang. Berdasarkan kelompok umur penduduk Kabupaten Purbalingga terdiri dari 0-14 tahun sebanyak 233.273 dan 15 tahun keatas sebanyak 765.288, dengan demikian laju pertumbuhan penduduk pertahun Kabupaten Purbalingga tahun 2010-2020 dari hasil sensus penduduk 2020 sebesar 1,58% (BPS Kabupaten Purbalingga, 2021).

Tabel 3. 3 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan *Sex Ratio*

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah	<i>Sex Ratio</i>
		Laki-laki	Perempuan		
1	Kemangkon	31.915	31.707	63.622	100,66
2	Bukateja	39.257	38.857	78.114	101,03

3	Kejobong	25.465	25.273	50.738	100,76
4	Pengadegan	20.541	20.505	41.046	100,18
5	Kaligondang	32.928	32.620	65.548	100,94
6	Purbalingga	28.587	28.993	57.580	98,60
7	Kalimanah	29.028	28.639	57.667	101,36
8	Padamara	23.402	23.131	46.533	101,17
9	Kutasari	33.233	32.002	65.235	103,85
10	Bojongsari	32.146	30.949	63.095	103,87
11	Mrebet	39.559	38.310	77.869	103,26
12	Bobotsari	26.925	26.394	53.319	102,01
13	Karangreja	23.730	22.910	46.640	103,58
14	Karangjambu	14.496	13.582	28.078	106,73
15	Karanganyar	20.553	19.538	40.091	105,20
16	Kartanegara	18.831	18.095	36.926	104,07
17	Karangmoncol	30.029	28.514	58.543	105,31
18	Rembang	34.656	33.261	67.917	104,19
Total		505.281	493.280	998.561	102,40

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2020, penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja sebanyak 476.896 jiwa, sedangkan yang bukan angkatan kerja sebanyak 225.637 jiwa. Penduduk yang bekerja sebanyak 454.098 jiwa yang terdiri dari 265.829 laki-laki dan 188.269 perempuan (BPS Kabupaten Purbalingga, 2021).

Tabel 3. 4 Jumlah Penduduk Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Angkatan Kerja	298.683	201.578	500.261
Bekerja	278.310	191.438	469.748
Pengangguran Terbuka	20.373	10.140	30.513
Bukan Angkatan Kerja	52.274	163.224	215.498
Sekolah	18.923	17.800	36.723
Mengurus rumah tangga	15.678	135.007	150.685

Lainnya	17.673	10.417	28.090
---------	--------	--------	--------

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga

Kabupaten Purbalingga sebagai kota yang multikultur terdiri dari dua etnis utama sebagai komposisi penduduk Kabupaten Purbalingga, yakni etnis Jawa dan China. Selain dari kedua etnis tersebut, Kabupaten Purbalingga juga memiliki etnis-etnis lain yang tersebar hampir diseluruh wilayah Kabupaten Purbalingga. Selain etnis yang beragam, penduduk Kabupaten Purbalingga juga dapat diklasifikasikan distribusinya melalui indikator agama yang dianut. Agama Islam masih menjadi agama mayoritas yang dipeluk oleh penduduk Kabupaten Purbalingga dengan jumlah total pemeluk sebesar 981.679 jiwa. Jumlah penganut agama Kristen Katolik di sebanyak 1.913 jiwa. Jumlah penganut agama Kristen Protestan sebesar 4.587 jiwa. Hal ini diikuti oleh penduduk penganut agama Budha yang berjumlah 48 orang dan yang merupakan jumlah penganut terkecil adalah penduduk dengan keyakinan agama Hindu yakni sebanyak 24 orang. Sementara itu sebanyak 61 orang lainnya merupakan penduduk dengan penganut kepercayaan lainnya.

Tabel 3. 5Jumlah Penduduk Per Kecamatan Menurut Agama

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk					
		Islam	Katolik	Protestan	Hindu	Budha	Lainnya
1	Kemangkon	60.086	407	401	8	3	-
2	Bukateja	79.525	14	331	8	4	1
3	Kejobong	50.643	3	35	-	2	-
4	Pengadegan	43.410	38	-	-	-	-
5	Kaligondang	67.017	104	393	-	-	-
6	Purbalingga	58.144	1.091	2.101	4	32	39
7	Kalimanah	56.212	97	426	3	7	3
8	Padamara	48.166	74	153	-	-	-
9	Kutasari	63.703	20	113	-	-	-
10	Bojongsari	58.257	14	48	-	-	-
11	Mrebet	77.333	17	219	-	-	-
12	Bobotsari	52.704	-	195	1	-	-
13	Karangreja	48.079	18	127	-	-	-
14	Karangjambu	30.971	-	-	-	-	-

15	Karanganyar	40.320	3	12	-	-	-
16	Kartanegara	38.807	-	1	-	-	-
17	Karangmoncol	39.480	-	-	-	-	-
18	Rembang	68.822	13	32	-	-	18
Total		981.679	1.913	4.587	24	48	61

B. Uji Kualitas Data

1. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Data

a) Hasil Uji Validitas Data

Jumlah responden yang digunakan untuk menguji validitas berjumlah 97 dengan tingkat signifikansi 5% dan nilai r tabel sebesar 0,1996. Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk *degree of freedom* (df) = n-2 dimana n adalah jumlah sampel. Jika jumlah korelasi yang didapatkan lebih besar dari angka kritik (r hitung > r tabel) maka instrumen tersebut dapat dikatakan valid.

Berikut ini adalah hasil uji validitas data:

Tabel 3. 6 Hasil Uji Validitas Variabel X

Item Pertanyaan	<i>Pearson Correlation</i>	r tabel	Keterangan
X1	0,574	0,1996	Valid
X2	0,413	0,1996	Valid
X3	0,621	0,1996	Valid
X4	0,576	0,1996	Valid
X5	0,505	0,1996	Valid
X6	0,499	0,1996	Valid
X7	0,413	0,1996	Valid
X8	0,307	0,1996	Valid
X9	0,424	0,1996	Valid
X10	0,525	0,1996	Valid
X11	0,624	0,1996	Valid

X12	0,432	0,1996	Valid
-----	-------	--------	-------

Sumber: *Output SPSS yang diolah*

Hasil dari uji validitas variabel X dinyatakan sudah valid karena pada setiap item pertanyaan r hitung yang diperoleh lebih besar dari r tabel, dimana r tabel dalam penelitian ini adalah 0,1996 dengan jumlah responden sebanyak 97 orang dan 12 pertanyaan. Jadi, dari semua hasil r hitung semua item pertanyaan dinyatakan valid.

Tabel 3. 7 Hasil Uji Validitas Variabel Y

Item Pertanyaan	<i>Pearson Correlation</i>	r tabel	Keterangan
Y1	0,533	0,1996	Valid
Y2	0,658	0,1996	Valid
Y3	0,643	0,1996	Valid
Y4	0,617	0,1996	Valid
Y5	0,548	0,1996	Valid
Y6	0,402	0,1996	Valid
Y7	0,434	0,1996	Valid
Y8	0,389	0,1996	Valid

Sumber: *Output SPSS yang diolah*

Hasil dari uji validitas variabel Y dinyatakan sudah valid karena pada setiap item pertanyaan r hitung yang diperoleh lebih besar dari r tabel, dimana r tabel dalam penelitian ini adalah 0,1996 dengan jumlah responden sebanyak 97 orang dan 8 pertanyaan. Jadi, dari semua hasil r hitung semua item pertanyaan dinyatakan valid.

a) Hasil Uji Reliabilitas Data

Jumlah responden yang digunakan untuk menguji reliabilitas berjumlah 97 dengan menggunakan uji statistik *cronbach's alpha* untuk mengukur reliabilitas. Secara umum suatu instrumen dikatakan reliabel jika memiliki koefisien *cronbach's alpha* $> 0,6$.

Berikut ini hasil uji reliabilitas data:

Tabel 3. 8 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
X	0,712 $>$ 0,6	Reliabel

Y	0,639 > 0,6	Reliabel
---	-------------	----------

Sumber: *Output SPSS yang diolah*

Hasil uji reliabilitas dari variabel X dan Y dinyatakan reliabel atau konsisten karena nilai *cronbach's alpha* yang diperoleh lebih besar dari 0,6 dengan jumlah responden sebanyak 97 orang. Jadi, dari semua hasil *cronbach's alpha* variabel X dan Y dinyatakan reliabel atau terpercaya sebagai alat pengumpul data.

2. Hasil Uji Asumsi Klasik

a) Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh berdistribusi normal atau tidak. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak dalam uji normalitas, yaitu dengan cara analisis grafik dan analisis statistik. Uji normalitas ini akan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Dasar pengambilan keputusan dalam uji *Kolmogorov-Smirnov* adalah jika nilai signifikansi > 0,05 maka nilai residual berdistribusi normal dan jika nilai signifikansi < 0,05 maka nilai residual tidak berdistribusi normal.

Berikut ini adalah hasil uji normalitas.

Tabel 3. 9 Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		97
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.57411079
Most Extreme Differences	Absolute	.096
	Positive	.096
	Negative	-.067
Kolmogorov-Smirnov Z		.943
Asymp. Sig. (2-tailed)		.336
a. Test distribution is Normal.		

Berdasarkan hasil uji normalitas data diatas diketahui bahwa nilai signifikansi $0,336 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.

BAB IV

BENTUK PRAKTIK POLITIK UANG DI KELURAHAN BANCAR KABUPATEN PURBALINGGA

A. Praktik Politik Uang dalam Bentuk Uang

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung merupakan salah satu proses demokrasi yang ada di Indonesia yang dipandang sebagai tolak ukur untuk melihat sejauh mana daerah tersebut menerapkan demokrasi. Pemilihan kepala daerah secara langsung dilaksanakan empat tahun sekali secara serentak di berbagai daerah, dalam hal ini masyarakat bebas menentukan pilihannya kepada kandidat yang dianggap pantas untuk menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dengan harapan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang nantinya terpilih dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya serta mampu merealisasikan janji-janjinya demi mensejahterakan kehidupan masyarakat untuk empat tahun kedepan, dan tentunya juga bisa memajukan daerah tersebut.

Pada tanggal 9 Desember 2020 dilaksanakan pemilihan kepala daerah untuk masa bakti 2020-2024 yang diikuti sebanyak 270 daerah di Indonesia, dengan rincian 9 Provinsi (Gubernur dan Wakil Gubernur), 37 Kota (Walikota dan Wakil Walikota), dan 224 Kabupaten (Bupati dan Wakil Bupati) atau sekitar 53% dari total 537 jumlah Provinsi di Kabupaten/Kota di Indonesia (RI, 2021, hal. 3). Termasuk salah satunya adalah Kabupaten Purbalingga, pada pilkada 2020 Kabupaten Purbalingga mengusung dua paslon, yaitu Muhammad Sulhan Fauzi-Zaini Makarim Supriyanto dan Dyah Hayuning Pratiwi-Sudono. Para calon kandidat tersebut telah diusung oleh masing-masing partai pendukung yang tentunya memiliki basis massa pendukung yang tidak sedikit dan terdapat persaingan sehingga berbagai macam cara ditempuh oleh kedua calon kandidat tersebut sebagai upaya untuk mendapatkan suara. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan melakukan sebuah pelanggaran dalam pemilu yaitu politik uang.

Bentuk-bentuk politik uang diantaranya yaitu berupa uang. Dalam penelitian ini penulis mengkategorikannya sebagai *vote buying*. Pembelian suara atau *vote buying* dianggap sebagai sebuah fenomena yang dapat mencederai semangat dari asas pemilu itu sendiri yang berkaitan dengan asas kejujuran dan keadilan. Meski banyak kalangan yang menilai hal tersebut berdampak buruk pada proses demokrasi, pada

kenyataannya praktik pembelian suara pada level akar rumput menjelang pemilihan umum masif terjadi (Adhinata, 2019, hal. 163). *Vote buying* juga ditemukan di Kelurahan Bancar pada pilkada 2020. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut:

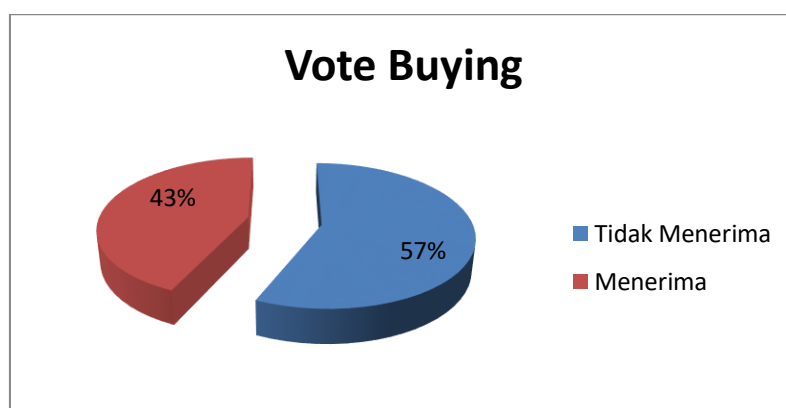
Tabel 4. 1 Statistik Deskriptif dari Vote Buying (skor 1-5)

Pernyataan Kuesioner	Nilai Minimal	Nilai Maksimal	Rata-rata	Simpangan Baku	Hasil
Saya menerima pemberian uang dari timses salah satu kandidat	1,00	5,00	2,34	0,98	Sedikit yang menerima <i>vote buying</i>

Sumber: Output SPSS yang diolah

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui dari 97 responden bahwa didapatkannilai rata-rata sebesar 2,34 dari skala 1-5 yang artinya secara umum hanya sedikit yang menerima uang dari tim sukses salah satu kandidat satu hari sebelum hari pemungutan suara. Pertanyaan kuesioner ini disertai dengan permintaan kepada responden untuk menempatkan tanggapannya pada skala 1-5, dimana angka 1 mengindikasikan bahwa mereka sangat tidak setuju untuk menerima pemberian uang tersebut. Sebaliknya, jika nilai rata-rata makin dekat dengan angka 5 maka mengindikasikan responden sangat setuju untuk menerima pemberian uang tersebut. Dari 97 responden yang mengakui bahwa mereka menerima *vote buying* adalah sebanyak 42 orang sedangkan sisanya mengakui tidak menerima hal tersebut. Hal tesebut juga dapat dilihat pada diagram lingkaran yang menampilkan persentase yang diambil berdasarkan hasil pada kuesioner yaitu sebagai berikut:

Gambar 4. 1 Vote Buying



Sebanyak 57% (55 orang) mengaku tidak menerima *vote buying* dan 43% (42 orang) lainnya mengaku menerima *vote buying*. Pemberian uang semacam ini tidak hanya terjadi pada hari menjelang pemungutan suara tetapi juga terjadi pada masa kampanye, menurut salah satu penuturan warga di Kelurahan Bancar, tim sukses salah satu kandidat mencari 5 orang per rukun tetangga (RT) kemudian orang-orang tersebut diminta untuk menghadiri acara semacam perkumpulan/pengajian disaat masa kampanye yang diselenggarakan dalam posko pemenangan salah satu kandidat yang dimana posko ini terletak di Kelurahan Bancar. Dalam acara tersebut, warga yang hadir disugahi dengan cerita-cerita serta biografi tokoh kandidat, di akhir acara warga diingatkan dengan cara yang halus untuk menggunakan hak pilih dan memilih kandidat tersebut pada saat pilkada 9 Desember 2020 lalu. Sepulang dari acara tersebut mereka diberi sebuah payung (karena saat itu sedang musim penghujan) yang ternyata di dalamnya terdapat sebuah amplop yang berisikan uang sejumlah Rp. 50.000. Hal-hal semacam ini tentu saja termasuk kedalam politik uang yang berbentuk *vote buying* sekaligus pemberian barang dalam kategori *individual gifts*, yang mana penjelasan mengenai *individual gifts* akan dibahas pada sub-bab berikutnya.

B. Praktik Politik Uang dalam Bentuk Barang

Bentuk politik uang yang selanjutnya adalah berupa barang. Dalam penelitian ini penulis mengkategorikan politik uang dalam bentuk barang ke dalam dua kategori yaitu *individual gifts* dan *club goods*.

1. Individual Gifts

Pemberian-pemberian pribadi atau *individual gifts* adalah pemberian pribadi kepada pemilih untuk mendukung pembelian suara (*vote buying*) yang lebih sistematis. Biasanya mereka melakukan praktik ini ketika bertemu dengan pemilih, baik ketika melakukan kunjungan ke rumah-rumah atau pada saat kampanye. Kadang-kadang pemberian tersebut didistribusikan oleh tim kampanye. Pemberian semacam ini biasanya terjadi dalam bentuk benda-benda kecil, misalnya kalender, gantungan kunci, payung, kaos, dan lain-lain yang disertai dengan nama kandidat. Contoh pemberian lain adalah bahan makanan atau sembako (Aspinall & Sukmajati, 2015, hal. 25).

Berikut ini adalah hasil perhitungan mengenai *individual gifts* dengan bantuan SPSS:

Tabel 4. 2 Statistik Deskriptif dari Individual Gifts

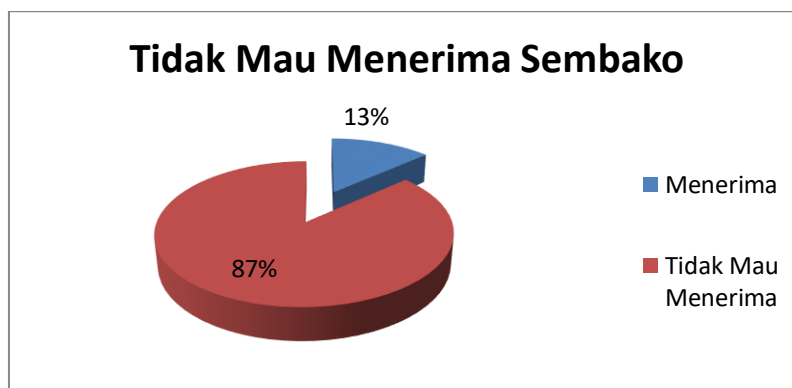
Pernyataan Kuesioner	Nilai Minimal	Nilai Maksimal	Rata-rata	Simpangan Baku	Hasil
Tidak mau menerima pemberian sembako saatkampanye	1,00	5,00	3,67	1,14	Cukup banyak yang tidak mau menerima pemberian sembako

Sumber: Output SPSS yang diolah

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui dari 97 responden bahwa didapatkan nilai rata-rata sebesar 3,67 dari skala 1-5 yang artinya secara umum cukup banyak yang menolak pemberian sembako pada saat masa kampanye. Pertanyaan kuesioner ini disertai dengan permintaan kepada responden untuk menempatkan tanggapannya pada skala 1-5, dimana angka 1 mengindikasikan bahwa mereka sangat tidak setuju untuk menolak pemberian sembako tersebut. Sebaliknya, jika nilai rata-rata makin dekat dengan angka 5 maka mengindikasikan reponden sangat setuju untuk menolak pemberian sembako tersebut. Dari 97 responden yang mengakui bahwa mereka tidak mau menerima pemberian sembako adalah sebanyak 84 orang sedangkan sisanya mengaku mau menerima hal tersebut.

Hal tersebut juga dapat dilihat pada diagram lingkaran yang menampilkan persentase yang diambil berdasarkan hasil pada kuesioner yaitu sebagai berikut:

Gambar 4. 2 Individual Gifts



Sebanyak 13% (13 orang) mengaku mau menerima sembako dan 87% (84 orang) mengaku menolak hal tersebut. Warga Kelurahan Bancar mengakui tidak mau

menerima pemberian sembako dari kandidat karena menganggap hal tersebut adalah sesuatu yang salah, warga lebih suka menerima pemberian yang bisa digunakan secara publik seperti contohnya perbaikan jalan atau yang bisa dikategorikan sebagai *club goods* yang akan dibahas pada halaman berikutnya.

Terdapat satu lagi pertanyaan mengenai *individual gifts* pada kuesioner dan adapun hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Statistik Deskriptif dari Individual Gifts (b)

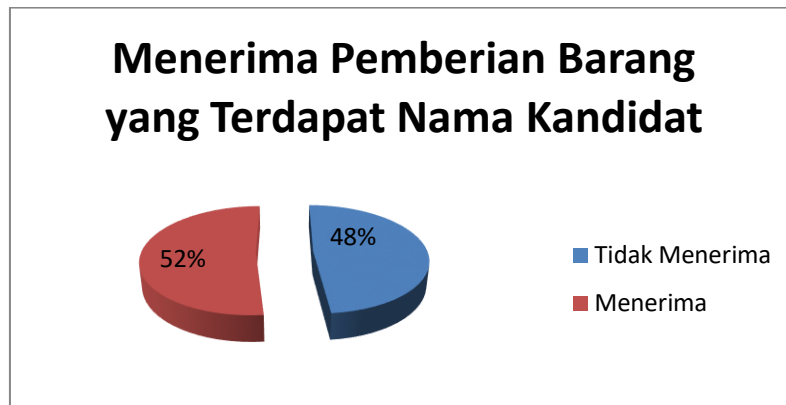
Pernyataan Kuesioner	Nilai Minimal	Nilai Maksimal	Rata-rata	Simpangan Baku	Hasil
Menerima pemberian barang (payung, kaos, dll) yang terdapat nama kandidat	1,00	5,00	2,63	0,99	Sedikit yang menerima pemberian barang yang terdapat nama kandidat.

Sumber: Output SPSS yang diolah

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui dari 97 responden bahwa didapatkan nilai rata-rata sebesar 2,63 dari skala 1-5 yang artinya secara umum sedikit yang menerima pemberian barang yang terdapat nama kandidat. Pertanyaan kuesioner ini disertai dengan permintaan kepada responden untuk menempatkan tanggapannya pada skala 1-5, dimana angka 1 mengindikasikan bahwa mereka sangat tidak setuju untuk menerima pemberian barang yang terdapat nama kandidat tersebut. Sebaliknya, jika nilai rata-rata makin dekat dengan angka 5 maka mengindikasikan reponden sangat setuju untuk menerima pemberian barang yang terdapat nama kandidat tersebut. Dari 97 responden yang mengakui bahwa mereka menerima pemberian *individual gifts* (dalam hal ini adalah payung) adalah sebanyak 50 orang sedangkan sisanya mengaku tidak menerima hal tersebut.

Hal tersebut juga dapat dilihat pada diagram lingkaran yang menampilkan persentase yang diambil berdasarkan hasil pada kuesioner yaitu sebagai berikut:

Gambar 4. 3 Individual Gifts (b)



Sebanyak 48% (47 orang) mengaku tidak menerima pemberian barang yang berupa payung yang terdapat nama kandidat dan 52% (50 orang) lainnya mengaku menerima hal tersebut. Hal semacam ini terjadi di Kelurahan Bancar, menurut salah satu penuturan warga di Kelurahan Bancar mereka mendapatkan sebuah payung yang terdapat nama kandidat. Payung ini diberikan setelah acara yang diselenggarakan oleh kandidat tersebut selesai, yang mana acaranya adalah semacam perkumpulan/pengajian untuk warga sekitar. Payung ini sangat berguna dikarenakan pada saat itu musim penghujan sedang berlangsung. Bahkan di dalam payung tersebut juga diselipkan selembar uang dengan nominal Rp. 50.000.

2. Club Goods

Setelah *individual gifts*, bentuk lain dari pemberian politik uang yang berupa barang adalah *club goods*. Barang-barang kelompok (*club goods*) merupakan praktik patronase yang diberikan lebih untuk keuntungan bersama bagi kelompok sosial tertentu ketimbang bagi keuntungan individual. Jenis barang yang dibagikan adalah perlengkapan ibadah, peralatan olahraga, alat musik, *sound system*, tenda, peralatan pertanian, dan sejenisnya (Aspinall & Sukmajati, 2015, hal. 27).

Berikut ini adalah hasil perhitungan mengenai *club goods*:

Tabel 4. 4 Statistik Deskriptif dari Club Goods

Pernyataan Kuesioner	Nilai Minimal	Nilai Maksimal	Rata-rata	Simpangan Baku	Hasil
Salah satu kandidat memberikan	1,00	5,00	3,45	1,02	Cukup banyak warga yang menerima pemberian perlengkapan ibadah untuk

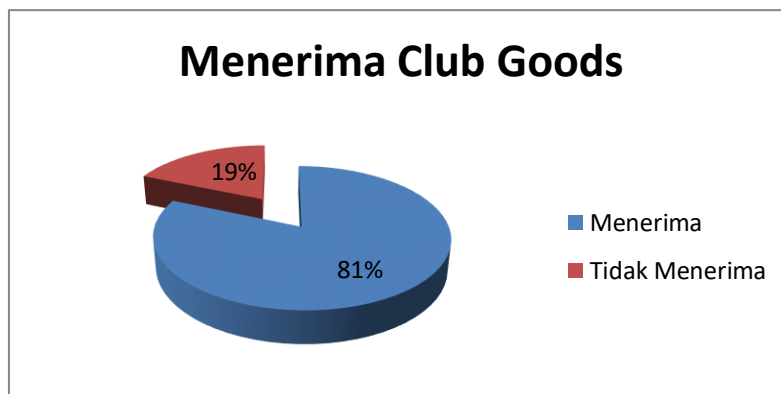
perlengkapan ibadah untuk masjid atau hal lain yang serupa					masjid atau hal lain yang serupa
--	--	--	--	--	----------------------------------

Sumber: Output SPSS yang diolah

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui dari 97 responden bahwa didapatkan nilai rata-rata 3,45 dari skala 1-5 yang artinya secara umum cukup banyak yang menerima pemberian perlengkapan ibadah untuk masjid atau hal lain yang serupa. Pertanyaan kuesioner ini disertai dengan permintaan kepada responden untuk menempatkan tanggapannya pada skala 1-5, dimana angka 1 mengindikasikan bahwa mereka sangat tidak setuju untuk menerima pemberian perlengkapan ibadah untuk masjid atau hal lain yang serupa. Sebaliknya, jika nilai rata-rata makin dekat dengan angka 5 maka mengindikasikan reponden sangat setuju untuk menerima pemberian perlengkapan ibadah untuk masjid atau hal lain yang serupa. Dari 97 responden yang mengakui mau menerima hal tersebut adalah sebanyak 79 orang sedangkan sisanya mengakui bahwa mereka tidak menerima hal tersebut.

Hal tesebut juga dapat dilihat pada diagram lingkaran yang menampilkan persentase yang diambil berdasarkan hasil pada kuesioner yaitu sebagai berikut:

Gambar 4. 4 Club Goods



Sebanyak 81% (79 orang) mengaku tidak menerima pemberian *club goods* dan 19% (18 orang) lainnya mengakui menerima hal tersebut. Warga Kelurahan Bancar mengaku lebih suka menerima pemberian yang bisa digunakan untuk kepentingan umum seperti contohnya dalam penelitian ini adalah pemberian perlengkapan ibadah untuk masjid atau hal lain yang serupa. Karena menganggap hal semacam itu bisa

sangat bermanfaat dan dapat digunakan oleh banyak orang dibandingkan seperti pemberian sembako seperti yang telah dibahas sebelumnya yang mana pemberian sembako manfaatnya cenderung hanya bisa dirasakan perindividu/keluarga alih-alih kepentingan umum. Selain itu warga Kelurahan Bancar juga lebih tertarik pada penawaran perbaikan jalan karena dianggap sangat berguna dan bisa digunakan untuk kepentingan umum juga, yang mana penawaran perbaikan jalan ini termasuk dalam politik uang dalam bentuk jasa/fasilitas yang akan dibahas pada sub-bab selanjutnya.

C. Praktik Politik Uang dalam Bentuk Jasa/Fasilitas

Bentuk politik uang yang berikutnya yaitu berupa jasa atau fasilitas. Dalam penelitian ini penulis mengkategorikan hal tersebut menjadi dua kategori yaitu *services & activities* dan juga *pork barrel projects*.

1. *Services and Activities*

Pelayanan dan aktivitas (*services and activities*) adalah suatu penyediaan atau pembiayaan beragam aktivitas dan pelayanan untuk pemilih. Bentuk aktivitas yang sangat umum adalah kampanye pada acara perayaan oleh komunitas tertentu. Di forum ini, para kandidat biasanya mempromosikan dirinya. Tidak sedikit juga kandidat yang membiayai beragam pelayanan untuk masyarakat, contohnya pelayanan kesehatan gratis (Aspinall & Sukmajati, 2015, hal. 26). Berikut adalah hasil perhitungan mengenai *services and activities* yang terjadi di Kelurahan Bancar:

Tabel 4. 5 Statistik Deskriptif dari Services & Activities

Pernyataan Kuesioner	Nilai Minimal	Nilai Maksimal	Rata-rata	Simpangan Baku	Hasil
Salah satu kandidat membiayai acara yang diselenggarakan oleh masyarakat	1,00	5,00	3,14	1,02	Cukup banyak yang menerima ketika salah satu kandidat membiayai acara yang diselenggarakan oleh masyarakat

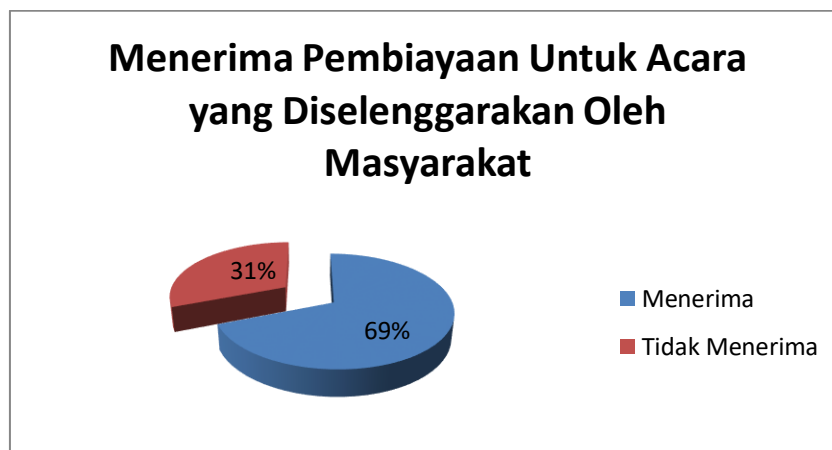
Sumber: Output SPSS yang diolah

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui dari 97 responden bahwa didapatkan nilai rata-rata sebesar 3,14 dari skala 1-5 yang artinya secara umum cukup banyak yang menerima ketika salah satu kandidat mau membiayai acara yang diselenggarakan oleh masyarakat. Pertanyaan kuesioner ini disertai dengan

permintaan kepada responden untuk menempatkan tanggapannya pada skala 1-5, dimana angka 1 mengindikasikan bahwa mereka sangat tidak setuju untuk menerima dana dari salah satu kandidat guna membiayai acara yang diselenggarakan oleh masyarakat. Sebaliknya, jika nilai rata-rata makin dekat dengan angka 5 maka mengindikasikan reponden sangat setuju untuk menerima dana dari salah satu kandidat guna membiayai acara yang diselenggarakan oleh masyarakat. Dari 97 responden yang mengakui bahwa mereka menerima hal tersebut adalah sebanyak 67 orang sedangkan sisanya mengaku tidak menerima hal tersebut.

Hal tesebut juga dapat dilihat pada diagram lingkaran yang menampilkan persentase yang diambil berdasarkan hasil pada kuesioner yaitu sebagai berikut:

Gambar 4. 5 Services & Activities



Sebanyak 69% (67 orang) mengaku menerima pembiayaan untuk acara yang diselenggarakan oleh masyarakat dan 31% (30 orang) lainnya mengaku tidak mau menerima hal tersebut. Kemudian terdapat satu lagi pertanyaan mengenai *services and activities* pada kuesioner dan adapun hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 6 Statistik Deskriptif dari Services & Activities (b)

Pernyataan Kuesioner	Nilai Minimal	Nilai Maksimal	Rata-rata	Simpangan Baku	Hasil
Salah satu kandida tmengadakan pengobatan gratis atau pelayanan	1,00	5,00	3,67	1,15	Cukup banyak yang menerima ketika salah satu kandidat mengadakan pengobatan gratis atau pelayanan umum lainnya

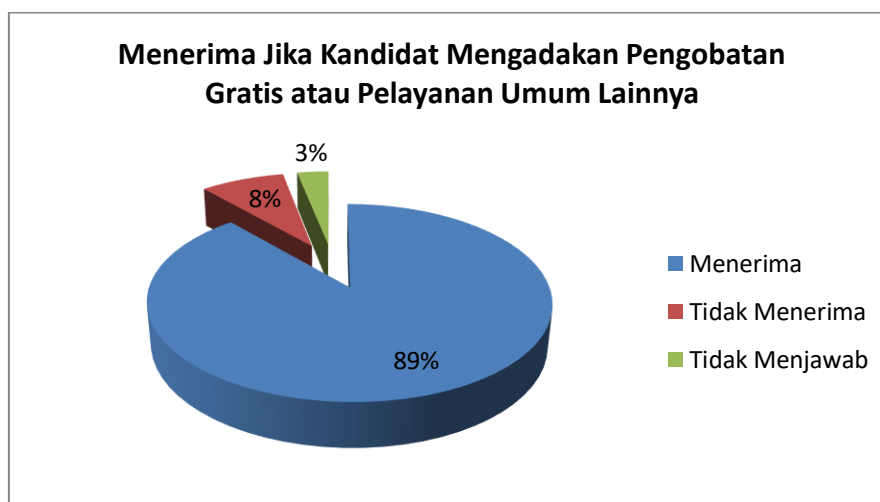
umum					
lainnya					

Sumber: Output SPSS yang diolah

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui dari 97 responden bahwa didapatkan nilai rata-rata sebesar 3,67 dari skala 1-5 yang artinya secara umum cukup banyak yang menerima ketika salah satu kandidat mengadakan pengobatan gratis atau pelayanan umum lainnya. Pertanyaan kuesioner ini disertai dengan permintaan kepada responden untuk menempatkan tanggapannya pada skala 1-5, dimana angka 1 mengindikasikan bahwa mereka sangat tidak setuju untuk menerima ketika salah satu kandidat mengadakan pengobatan gratis atau pelayanan umum lainnya. Sebaliknya, jika nilai rata-rata makin dekat dengan angka 5 maka mengindikasikan reponden sangat setuju untuk menerima ketika salah satu kandidat mengadakan pengobatan gratis atau pelayanan umum lainnya. Dari 97 responden yang mengakui bahwa mereka menerima pelayanan umum adalah sebanyak 86 orang sedangkan sisanya mengakui tidak menerima hal tersebut, dan ada pula yang tidak menjawab.

Hal tersebut juga dapat dilihat pada diagram lingkaran yang menampilkan persentase yang diambil berdasarkan hasil pada kuesioner yaitu sebagai berikut:

Gambar 4. 6 Services & Activities (b)



Sebanyak 89% (86 orang) mengaku menerima ketika salah satu kandidat mengadakan pelayanan umum, kemudian sebanyak 8% (8 orang) mengaku tidak menerima hal tersebut, dan 3% (3 orang) lainnya tidak menjawab hal tersebut. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, warga Kelurahan Bancar lebih menyukai

pemberian-pemberian yang dapat digunakan atau dirasakan oleh banyak orang atau untuk kepentingan umum jadi mereka sangat menyukai jika salah satu kandidat mengadakan pengobatan gratis atau pelayanan umum lain seperti contohnya penyediaan mobil ambulance gratis dan berbagai pelayanan umum lainnya sehingga cukup banyak warga yang mengakui mau untuk menerima hal tersebut.

2. *Pork Barrel Projects*

Setelah *services and activities*, bentuk lain politik uang yang berupa jasa atau fasilitas adalah *pork barrel projects*. *Pork barrel projects* adalah proyek-proyek pemerintah yang ditujukan untuk wilayah geografis tertentu. Karakter utama dari *pork barrel* adalah bahwa kegiatan ini ditujukan kepada publik dan didanai dengan dana publik dengan harapan publik akan memberikan dukungan politik kepada kandidat tertentu (Aspinall & Sukmajati, 2015, hal. 29). Berikut ini adalah hasil perhitungan mengenai *pork barrel projects* dengan bantuan SPSS:

Tabel 4. 7 Statistik Deskriptif dari Pork Barrel Projects

Pernyataan Kuesioner	Nilai Minimal	Nilai Maksimal	Rata-rata	Simpangan Baku	Hasil
Salah satu kandidat menjanjikan merealisasikan sebuah program untuk kesejahteraan masyarakat jika mereka menang dalam pilkada	1,00	5,00	3,64	1,02	Cukup banyak yang mengakui jika salah satu kandidat menjanjikan merealisasikan sebuah program untuk kesejahteraan masyarakat jika mereka menang dalam pilkada

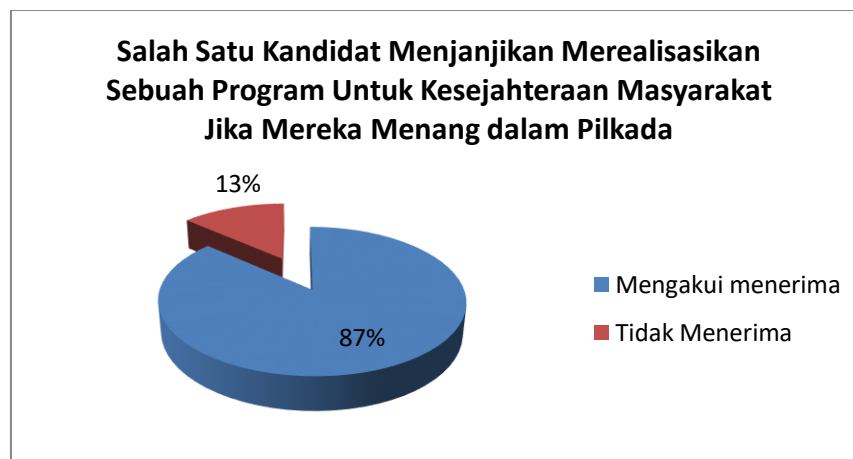
Sumber: Output SPSS yang diolah

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui dari 97 responden bahwa didapatkan nilai rata-rata sebesar 3,64 dari skala 1-5 yang artinya secara umum cukup banyak yang mengakui jika salah satu kandidat menjanjikan merealisasikan sebuah program untuk kesejahteraan masyarakat jika mereka menang dalam pilkada. Pertanyaan kuesioner ini disertai dengan permintaan kepada responden untuk menempatkan tanggapannya pada skala 1-5, dimana angka 1 mengindikasikan bahwa mereka sangat

tidak setuju untuk mengakui jika salah satu kandidat menjanjikan merealisasikan sebuah program untuk kesejahteraan masyarakat jika mereka menang dalam pilkada. Sebaliknya, jika nilai rata-rata makin dekat dengan angka 5 maka mengindikasikan reponden sangat setuju untuk mengakui jika salah satu kandidat menjanjikan merealisasikan sebuah program untuk kesejahteraan masyarakat jika mereka menang dalam pilkada. Dari 97 responden yang mengakui jika salah satu kandidat menjanjikan merealisasikan sebuah program untuk kesejahteraan masyarakat jika mereka menang dalam pilkada adalah sebanyak 84 orang sedangkan sisanya tidak mengakui hal tersebut.

Hal tersebut juga dapat dilihat pada diagram lingkaran yang menampilkan persentase yang diambil berdasarkan hasil pada kuesioner yaitu sebagai berikut:

Gambar 4. 7 Pork Barrel Projects



Sebanyak 87% (84 orang) mengaku jika salah satu kandidat menjanjikan merealisasikan sebuah program untuk kesejahteraan masyarakat jika mereka menang dalam pilkada, dan 13% (13 orang) lainnya tidak mengakui hal tersebut. Sebagian besar warga Kelurahan Bancar mengatakan bahwa janji-janji semacam ini hampir selalu ada dalam setiap pemilihan umum, tetapi tidak semua benar-benar merealisasikan janji-janjinya dan terkadang hanya menjadi janji-janji manis pada saat kampanye.

Terdapat satu lagi pertanyaan mengenai *pork barrel projects* pada kuesioner dan adapun hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 8 Statistik Deskriptif dari Pork Barrel Projects (b)

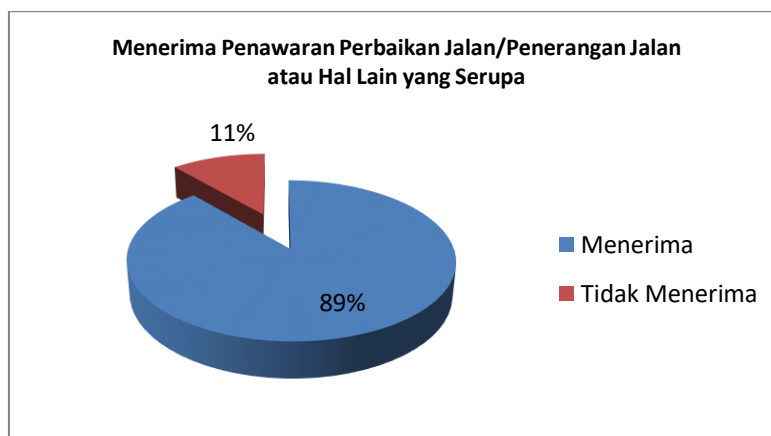
Pernyataan Kuesioner	Nilai Minimal	Nilai Maksimal	Rata-rata	Simpangan Baku	Hasil
Salah satu kandidat menawarkan perbaikan jalan/penerangan jalan atau hal lain yang serupa	1,00	5,00	3,64	0,89	Cukup banyak yang menerima penawaran tersebut

Sumber: Output SPSS yang diolah

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui dari 97 responden bahwa didapatkan nilai rata-rata sebesar 3,64 dari skala 1-5 yang artinya secara umum cukup banyak yang menerima penawaran perbaikan jalan/penerangan jalan atau hal lain yang serupa. Pertanyaan kuesioner ini disertai dengan permintaan kepada responden untuk menempatkan tanggapannya pada skala 1-5, dimana angka 1 mengindikasikan bahwa mereka sangat tidak setuju untuk menerima penawaran perbaikan jalan/penerangan jalan atau hal lain yang serupa. Sebaliknya, jika nilai rata-rata makin dekat dengan angka 5 maka mengindikasikan reponden sangat setuju untuk menerima penawaran perbaikan jalan/penerangan jalan atau hal lain yang serupa. Dari 97 responden yang mengakui menerima penawaran perbaikan jalan/penerangan jalan atau hal lain yang serupa adalah sebanyak 86 orang sedangkan sisanya mengaku tidak menerima hal tersebut.

Hal tersebut juga dapat dilihat pada diagram lingkaran yang menampilkan persentase yang diambil berdasarkan hasil pada kuesioner yaitu sebagai berikut:

Gambar 4. 8Pork Barrel Projects (b)



Sebanyak 89% (86 orang) mengaku menerima penawaran perbaikan jalan/penerangan jalan atau hal lain yang serupa, dan 11% (11 orang) lainnya mengaku tidak menerima hal tersebut. Merujuk pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, warga Kelurahan Bancar sangat menghendaki pemberian-pemberian yang ditujukan untuk kepentingan publik. Penawaran perbaikan jalan atau penerangan jalan tentunya sangat menarik antusiasme warga. Apalagi di Kelurahan Bancar banyak terdapat gang-gang kecil yang jika pada malam hari belum memiliki penerangan yang memadai.

Disisi lain, politik uang dapat dikategorikan sebagai uang sogok atau suap. Perbuatan tersebut dilarang dalam Islam, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لَتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui” (Q.S Al-Baqarah : 188).

Maksud jalan batil pada ayat diatas adalah sesuatu yang tidak adah hak, tidak dibenarkan oleh hukum, serta tidak sejalan dengan tuntutan Ilahi walaupun dilakukan atas dasar kerelaan yang berinteraksi. Dan salah satu yang dilarang tetapi sering dilakukan oleh masyarakat maupun kandidat adalah menyogok atau menyuap atau melakukan politik uang pada saat pilkada. Untuk itu kita sebagai pemilih yang baik sebaiknya menghindari praktik-praktik politik uang dikarenakan hal tersebut tidak dibenarkan oleh hukum maupun agama, melanggar peraturan dalam pemilu, serta melukai nilai demokrasi itu sendiri.

BAB V

FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI TERJADINYA POLITIK UANG DI KELURAHAN BANCAR KABUPATEN PURBALINGGA

Praktik politik uang pada pemilihan umum kini sudah menjadi fenomena yang sering terjadi. Politik uang menjadi tolak ukur dari seorang kandidat dalam meraih simpati dari masyarakat guna memenangkan pemilihan umum, namun juga tidak semua kandidat menggunakan politik uang dalam memenangkan pemilihan umum walaupun dalam hal tersebut kemungkinannya sangat kecil (Akbar, 2016, hal. 62). Beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya politik uang diantaranya:

A. Faktor Ekonomi

Penyebab terjadinya politik uang tidak terlepas dari faktor keterbatasan ekonomi yang hingga saat ini selalu memunculkan masalah-masalah baru, termasuk membuka peluang bagi terjadinya politik uang di masyarakat. Artinya bahwa kemiskinan selama ini membuat masyarakat berfikir secara rasional untuk mendapatkan sejumlah keuntungan, termasuk ketika menerima imbalan yang diberikan oleh calon atau kandidat dalam pemilihan umum. Praktik politik uang tidak akan mudah untuk dicegah dan diberhentikan jika keterbatasan ekonomi dan kemiskinan masih melanda masyarakat kita (Fitriani, Karyadi, & Chaniago, 2019, hal. 57). Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan.

Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kondisi miskin tersebut seperti memaksakan menekan sebagian masyarakat untuk segera mendapatkan uang. Politik uang pun menjadi ajang masyarakat untuk mendapatkan uang (Akbar, 2016, hal. 65). Dalam penelitian ini, penulis menggolongkan kelas sosial ekonomi berdasarkan status pekerjaan masyarakat Kelurahan Bancar. Adapun pekerjaan masyarakat Kelurahan Bancar dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 5. 1 Pekerjaan Responden

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Wiraswasta	18	18.6	18.6	18.6
Ibu Rumah Tangga	27	27.8	27.8	46.4
Karyawan Swasta	12	12.4	12.4	58.8
Pedagang	14	14.4	14.4	73.2
Pelajar/Mahasiswa	11	11.3	11.3	84.5
Lain-lain	15	15.5	15.5	100.0
Total	97	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel 5.1 pekerjaan responden diklasifikasikan menjadi enam klasifikasi. Data menunjukkan bahwa responden yang berprofesi sebagai wiraswasta sebanyak 18 orang dengan persentase 18,6%. Kemudian responden yang berstatus sebagai ibu rumah tangga berjumlah 27 orang dengan persentase 27,8%. Responden yang bekerja sebagai karyawan swasta sebanyak 12 orang dengan persentase 12,4%. Sedangkan responden yang bekerja sebagai pedagang berjumlah 14 orang dengan persentase 14,4%. Kemudian untuk responden yang berstatus sebagai pelajar atau mahasiswa sebanyak 11 orang dengan persentase 11,3%. Dan untuk pekerjaan yang lainnya berjumlah 15 orang dengan persentase 15,5%.

Arifin Noor dalam Wijianto & Ulfa (2016, hal. 195) membagi kelas sosial ekonomi kedalam tiga golongan, yaitu:

1. Kelas Atas (*Upper Class*)

Kelas atas berasal dari golongan kaya raya seperti golongan konglomerat, kelompok eksekutif, dan sebagainya. Dalam penelitian ini, penulis mengelompokkan masyarakat Kelurahan Bancar yang bekerja sebagai karyawan swasta dan juga wiraswasta kedalam ekonomi kelas atas.

2. Kelas Menengah (*Middle Class*)

Kelas menengah biasanya diidentikan oleh kaum profesional dan para pemilik toko dan bisnis yang lebih kecil. Dalam penelitian ini, penulis mengelompokkan masyarakat Kelurahan Bancar yang bekerja sebagai pedagang dan juga yang berstatus sebagai ibu rumah tangga kedalam ekonomi kelas menengah.

3. Kelas Bawah (*Lower Class*)

Kelas bawah adalah golongan yang memperoleh pendapatan atau penerimaan sebagai imbalan terhadap kerja mereka yang jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kebutuhan pokoknya. Dalam penelitian ini, penulis mengelompokkan masyarakat Kelurahan Bancar yang berstatus pekerjaan lain-lain dan juga yang berstatus mahasiswa/pelajar kedalam ekonomi kelas bawah.

Jika dilihat pada tabel 5.1 dengan menggolongkan kelas sosial ekonomi seperti yang disebutkan, maka responden di Kelurahan Bancar sebagian besar adalah masyarakat dengan status sosial ekonomi kelas menengah dengan jumlah responden terbanyak yaitu 27 orang yang berstatus sebagai ibu rumah tangga. Praktik politik uang bisa saja terjadi pada status sosial ekonomi kelas atas, menengah, ataupun bawah. Tergantung kepada masyarakatnya yang menerima atau bahkan menolak praktik tersebut. Untuk mengetahui apakah di Kelurahan Bancar faktor ekonomi ini menjadi salah satu alasan yang melatarbelakangi terjadinya politik uang, maka berikut ini adalah hasil perhitungan data kuesioner dengan menggunakan SPSS:

Tabel 5. 2 Statistik Deskriptif dari Faktor Ekonomi

Pernyataan Kuesioner	Nilai Minimal	Nilai Maksimal	Rata-rata	Simpangan Baku	Hasil
Menerima politik uang untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari	1,00	5,00	3,19	0,89	Cukup banyak yang menerima politik uang untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari

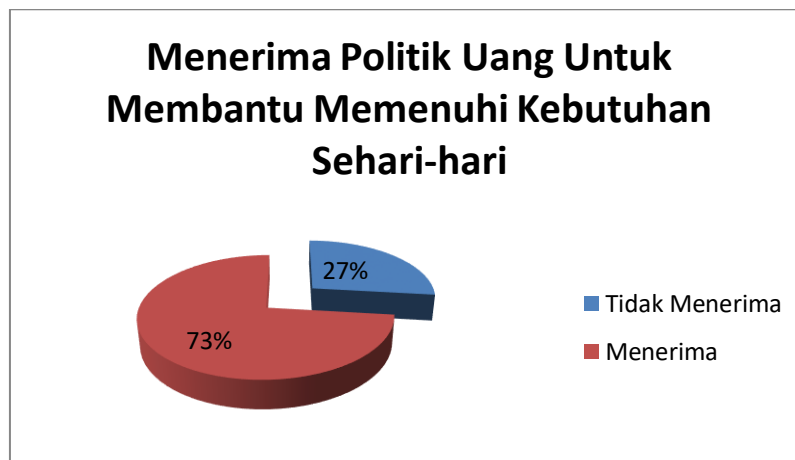
Sumber: Output SPSS yang diolah

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui dari 97 responden bahwa didapatkan nilai rata-rata sebesar 3,19 dari skala 1-5 yang artinya secara umum cukup banyak yang menerima politik uang untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pertanyaan kuesioner ini disertai dengan permintaan kepada responden untuk menempatkan tanggapannya pada skala 1-5, dimana angka 1 mengindikasikan bahwa mereka sangat tidak setuju untuk menerima politik uang untuk membantu memenuhi

kebutuhan sehari-hari. Sebaliknya, jika nilai rata-rata makin dekat dengan angka 5 maka mengindikasikan responden sangat setuju untuk menerima politik uang untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari 97 responden yang mengakui bahwa mereka menerima politik uang untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah sebanyak 71 orang sedangkan sisanya mengaku tidak menerima hal tersebut.

Hal ini juga dapat dilihat pada diagram lingkaran yang menampilkan persentase yang diambil berdasarkan hasil pada kuesioner yaitu sebagai berikut:

Gambar 5. 1 Faktor Ekonomi



Sebanyak 73% (71 orang) mengaku menerima politik uang karena faktor ekonomi dan 27% (26 orang) lainnya tidak menerima hal tersebut. Yang berarti dari 97 responden sebagian besar mau menerima hal tersebut, jadi dapat kita simpulkan bahwa faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang melatarbelakangi terjadinya politik uang di Kelurahan Bancar dengan pengaruh sebesar 73%.

B. Faktor Pengetahuan Politik

Penyebab dari rendahnya kualitas pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat tentunya tidak terlepas dari rendahnya faktor ekonomi yang membuat masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik, sehingga hal ini mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku mereka ketika melakukan sesuatu. Rendahnya kualitas pendidikan ini pada akhirnya menyebabkan masyarakat memiliki pengetahuan yang rendah terhadap politik dan pelanggaran yang terjadi dalam pemilu. Ketidaktahuan masyarakat ini mempengaruhi perilaku mereka dalam menyikapi praktik politik uang yang terjadi, hal ini terlihat dari mudahnya masyarakat dalam

menerima sejumlah imbalan yang diberikan, kemudian sangat mudah dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu untuk memilih kandidat tertentu, hingga adanya sikap pragmatis dalam diri masyarakat membuat mereka semakin memiliki ketidakpedulian terhadap pelanggaran yang terjadi, dan akhirnya berdampak pada rendahnya kesadaran politik hingga partisipasi politik yang masih sangat rendah (Fitriani, Karyadi, & Chaniago, 2019, hal. 57). Berikut ini adalah daftar pendidikan 97 responden di Kelurahan Bancar:

Tabel 5. 3 Pendidikan Terakhir Responden

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid SD	6	6.2	6.2	6.2
SMP	15	15.5	15.5	21.6
SMA/K	62	63.9	63.9	85.6
DIPLOMA	4	4.1	4.1	89.7
SARJANA	7	7.2	7.2	96.9
MAGISTER	3	3.1	3.1	100.0
Total	97	100.0	100.0	

Berdasarkan Tabel 5.3, dapat diketahui dari 97 responden bahwa yang berpendidikan SD sebanyak 6 orang (6,2%), yang berpendidikan SMP berjumlah 15 orang (15,5%), yang berpendidikan SMA sebanyak 62 orang (63,9%), yang berpendidikan Diploma berjumlah 4 orang (4,1%), yang berpendidikan Sarjana sebanyak 7 orang (7,2%), dan yang berpendidikan Magister berjumlah 3 orang (3,1%). Dari tabel diatas, dapat kita lihat jumlah responden yang terbanyak adalah responden dengan pendidikan terakhir SMA/SMK/ sederajat. Jadi dapat kita simpulkan tingkat pendidikan di Kelurahan Bancar ini tergolong cukup tinggi. Tetapi dalam penelitian ini penulis tidak ingin mengetahui apakah pendidikan formal tersebut menjadi latarbelakang terjadinya politik uang atau tidak, disini penulis ingin mengetahui apa yang menjadi latar belakang terjadinya politik uang berdasarkan faktor pengetahuan politik dari ke 97 responden.

Menurut Kantaprawira dalam Pahlevi & Amrurrobi (2020, hal. 144) pendidikan politik merupakan kegiatan atau aktivitas yang memiliki tujuan untuk membentuk nilai-nilai moral serta orientasi politik dalam individu. Pendidikan politik

mendorong masyarakat berpartisipasi sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab dalam perpolitikan negara. Kartono dalam Pahlevi & Amrurrobbi (2020, hal. 145) berpendapat bahwa sosialisasi politik berbeda dengan pendidikan politik. Sehingga masyarakat benar-benar mampu memahami nilai etis dalam perpolitikan dan mampu mempraktikannya. Pendidikan politik berbeda dengan sosialisasi politik. Tujuan pendidikan politik ialah menjadikan sebuah masyarakat berdaya dan mampu. Tidak hanya sekedar memahami, namun juga mengaplikasikan perilaku politik dalam kehidupan sehari-hari.

Alam dalam Pahlevi & Amrurrobbi (2020, hal. 145) berpendapat bahwa Pendidikan politik dapat dilakukan dengan model pre-emptif dan preventif. Pendidikan politik pre-emptif adalah upaya awal yang dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah yang tidak diinginkan oleh sekelompok masyarakat atau individu yang berdampak panjang. Maka, upaya pre-emptif ini menanamkan norma kebaikan dalam kehidupan. Sedangkan menurut Florida & Hollinger dalam Pahlevi & Amrurrobbi (2020, hal. 145) pendidikan politik dengan konsep upaya preventif biasanya dilakukan kepada pihak yang belum atau rentan terhadap suatu masalah. Preventif secara etimologi berasal dari Bahasa Latin yaitu *pravenire* yang artinya datang sebelum/antisipasi/mencegah untuk tidak terjadi sesuatu. Dalam pengertian yang luas preventif diartikan sebagai upaya yang secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi seseorang.

Tidak semua orang paham dan mengerti apa itu politik uang, bagaimana bentuknya, serta apa saja yang bisa ditimbulkan dari politik uang. Hal itu disebabkan karena kurangnya pembelajaran tentang politik secara mendalam atau masyarakat sendiri yang memang cenderung tidak peduli dengan pilkada (Akbar, 2016, hal. 67). Mereka menganggap tidak mengenal partai tidak masalah, tidak mengetahui atau mengenal calon kepala daerah tidak masalah, tidak datang ke TPS tidak masalah, bahkan menerima politik uang pun tidak masalah. Hal ini tentu membuat pilkada tidak berjalan sesuai dengan nilai demokrasi yang sesungguhnya. Masyarakat cenderung menggunakan hak pilih untuk kandidat yang memberikan imbalan sebagai gantinya, tetapi juga tidak semua masyarakat melakukan hal itu. Terdapat sebagian besar masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dan datang ke TPS atas kesadaran diri sendiri. Untuk mengetahui apakah faktor pengetahuan politik adalah faktor yang melatarbelakangi terjadinya politik uang pada saat pilkada 2020 di Kelurahan

Bancaratau tidak, berikut ini adalah hasil perhitungan data kuesioner menggunakan *software* SPSS:

Tabel 5. 4 Statistik Deskriptif dari Faktor Pengetahuan Politik

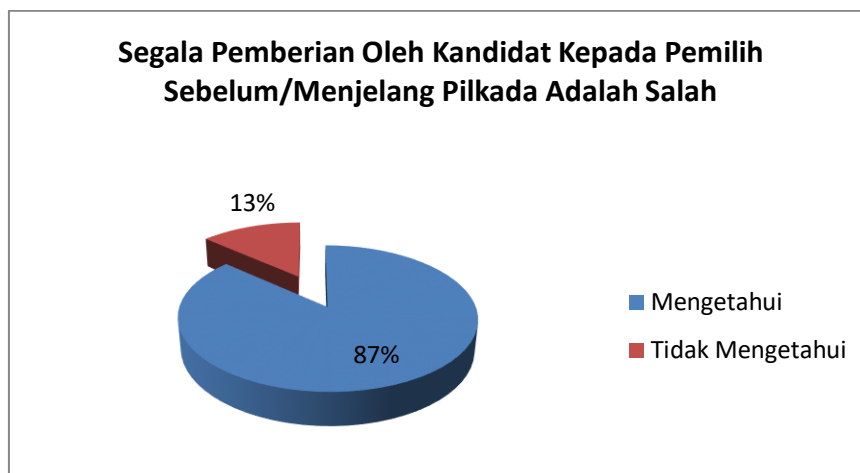
Pernyataan Kuesioner	Nilai Minimal	NilaiMaksimal	Rata-rata	Simpangan Baku	Hasil
Pemberian politik uang dalam bentuk apapun dari kandidat kepada pemilih disaat sebelum maupun menjelang pilkada adalah hal yang salah	1,00	5,00	3,67	1,14	Cukup banyak yang berpendapat bahwa hal tersebut adalah hal yang salah

Sumber: Output SPSS yang diolah

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui dari 97 responden bahwa didapatkan nilai rata-rata sebesar 3,67 secara umum cukup banyak yang mengetahui bahwa pemberian apapun yang diberikan oleh kandidat kepada pemilih disaat sebelum maupun pilkada adalah hal yang salah. Pertanyaan kuesioner ini disertai dengan permintaan kepada responden untuk menempatkan tanggapannya pada skala 1-5, dimana angka 1 mengindikasikan bahwa mereka sangat tidak mengetahui jika hal tersebut adalah hal yang salah. Sebaliknya, jika nilai rata-rata makin dekat dengan angka 5 maka mengindikasikan reponden sangat mengetahui jika pemberian politik uang dalam bentuk apapun dari kandidat kepada pemilih disaat sebelum maupun menjelang pilkada adalah hal yang salah. Dari 97 responden yang mengetahui bahwa pemberian apapun yang diberikan oleh kandidat kepada pemilih disaat sebelum maupun pilkada adalah hal yang salah sebanyak 84 orang sedangkan sisanya tidak mengetahui jika hal tersebut adalah hal yang salah.

Hal tesebut juga dapat dilihat pada diagram lingkaran yang menampilkan persentase yang diambil berdasarkan hasil pada kuesioner yaitu sebagai berikut:

Gambar 5. 2 Faktor Pengetahuan Politik



Sebanyak 87% (84 orang) mengetahui jika politik uang adalah hal yang salah, dan 13% (13 orang) lainnya tidak mengetahui hal tersebut. Dari diagram diatas dapat kita ketahui jika pengetahuan politik di Kelurahan Bancar cukup tinggi yang ditandai dengan sebagian besar responden mengetahui jika hal tersebut adalah hal yang salah karena merupakan suatu pelanggaran dalam pemilu.

Terdapat satu lagi pertanyaan mengenai faktor pengetahuan politik pada kuesioner dan adapun hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 5 Statistik Deskriptif dari Faktor Pengetahuan Politik (b)

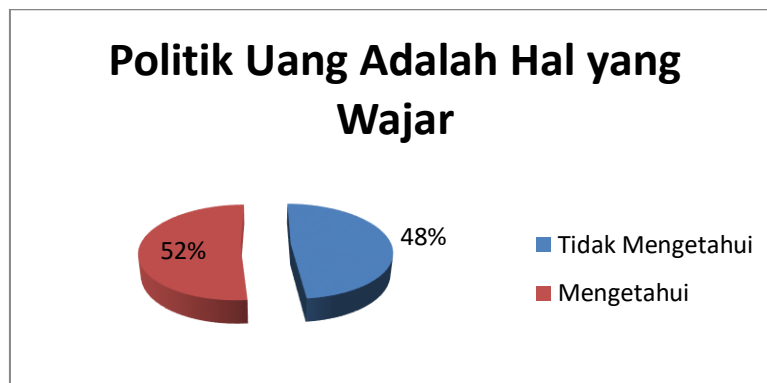
Pernyataan Kuesioner	Nilai Minimal	Nilai Maksimal	Rata-rata	Simpangan Baku	Hasil
Pemberian politik uang dalam bentuk apapun dari kandidat kepada pemilih disaat sebelum maupun menjelang pilkada adalah hal yang wajar	1,00	5,00	2,60	1,10	Sedikit yang mengetahui bahwa hal tersebut adalah hal yang wajar

Sumber: Output SPSS yang diolah

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui dari 97 responden bahwa didapatkan nilai rata-rata sebesar 2,60 dari skala 1-5 yang artinya secara umum sedikit yang mengetahui bahwa politik uang adalah hal yang wajar. Pertanyaan kuesioner ini

disertai dengan permintaan kepada responden untuk menempatkan tanggapannya pada skala 1-5, dimana angka 1 mengindikasikan bahwa mereka sangat tidak mengetahui jika hal tersebut adalah hal yang wajar. Sebaliknya, jika nilai rata-rata makin dekat dengan angka 5 maka mengindikasikan reponden sangat mengetahui jika politik uang adalah hal yang wajar. Dari 97 responden yang mengetahui jika politik uang adalah hal yang wajar sebanyak 50 orang sedangkan sisanya mengakui sebaliknya. Hal tersebut juga dapat dilihat pada diagram lingkaran yang menampilkan persentase yang diambil berdasarkan hasil pada kuesioner yaitu sebagai berikut:

Gambar 5. 3 Faktor Pengetahuan Politik (b)



Sebanyak 52% (50 orang) mengetahui jika politik uang adalah hal yang wajar, dan 48% (47 orang) lainnya berpendapat sebaliknya. Dari diagram diatas dapat kita lihat bahwa sebagian besar masyarakat Kelurahan Bancar mengetahui jika politik uang bukanlah merupakan hal yang wajar disetiap pemilihan umum, artinya masyarakat Kelurahan Bancar sudah mendapatkan pengetahuan politik dengan cukup baik. Dari kedua butir kuesioner mengenai faktor pengetahuan politik diatas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kelurahan Bancar menganggap politik uang adalah hal yang salah sekaligus bukan merupakan hal yang wajar. Jadi dari sini dapat disimpulkan bahwa faktor pengetahuan politik merupakan salah satu faktor yang melatarbelakangi terjadinya politik uang di Kelurahan Bancar pada saat pilkada 2020 dengan pengaruh sebesar 48%.

C. Faktor Kebudayaan atau Kebiasaan

Saling memberi dan jika mendapat rejeki, tidak boleh ditolak. Begitulah ungkapan yang nampaknya telah melekat dalam diri sebagian masyarakat manapun. Uang dan segala bentuk politik uang dari kandidat yang bersaing dianggap sebagai rejeki bagi masyarakat yang tidak boleh ditolak. Dan karena sudah diberi, secara

otomatis masyarakat harus memberi timbal balik untuk kandidat tersebut yaitu dengan cara memberikan suaranya, menjadi tim sukses, bahkan ikut mensukseskan politik uang demi memenangkan kandidat tersebut. Hal itu semata-mata dilakukan sebagai ungkapan terimakasih dan rasa balas budi masyarakat terhadap kandidat yang telah memberikan politik uang (Ramadhani, 2016, hal. 34).

Menurut Ismawan dalam Akbar (2016, hal. 62) kebiasaan dari masyarakat yang menjadikan pemilu adalah sebuah kondisi dimana mereka dan para kandidat saling berbagi dan bantu membantu dalam mencapai kesepakatan bersama dari keuntungan yang sama-sama pula mereka dapatkan. Situasi ini telah mendasar lama dalam sistem pola pikir masyarakat ketika terjadi pemilu dan hal tersebut diwariskan pada jaman sekarang. Akibatnya situasi ini telah menjadi kultur budaya, inilah yang menjadikan praktik politik uang dilakukan secara terang-terangan. Pengaruh kondisi yang demikian menyebabkan adanya pandangan bahwa politik uang adalah *given* atau menjadi *way of life* dalam sistem masyarakat.

Praktik politik uang yang sering terjadi ditengah masyarakat, jika terus dibiarkan akan menjadi kebiasaan terus-menerus. Dampak ini diakibatkan karena praktik politik uang yang terjadi selama ini, karena rendahnya pengawasan yang dilakukan, kurangnya pengetahuan dari masyarakat yang tidak mengetahui jika pratik politik uang adalah yang salah, serta kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Ketidaktahuan itu membuat praktik politik uang menjadi terus berulang-ulang yang kemudian menjadi kebiasaan dalam pilkada, dan membuat masyarakat berfikir bahwa hal tersebut merupakan hal yang biasa terjadi. Pola fikir masyarakat akan hal itu menyebabkan praktik politik uang menjadi sering dilakukan terutama saat masa pilkada (Fitriani, Karyadi, & Chaniago, 2019, hal. 58). Hal ini sudah bukan menjadi hal baru di Kelurahan Bancar, namun masyarakat lebih memahami politik uang jika diartikan dalam bentuk pemberian uang atau barang yang dilakukan oleh kandidat atau tim sukses untuk meminta suara mereka pada saat pilkada. Berikut ini adalah hasil perhitungan mengenai faktor kebiasaan di Kelurahan Bancar:

Tabel 5. 6 Statistik Deskriptif dari Faktor Kebiasaan/Kebudayaan

Pernyataan Kuesioner	Nilai Minimal	Nilai Maksimal	Rata-rata	Simpangan Baku	Hasil
Selalu menerima pemberian uang/barang disaat	1,00	5,00	2,26	1,05	Sedikit yang selalu menerima pemberian

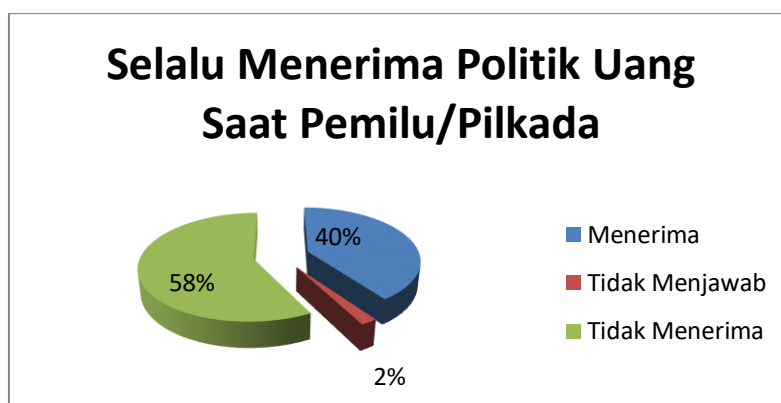
ada pemilu/pilkada					uang/barang disaat ada pemilu/pilkada
--------------------	--	--	--	--	---------------------------------------

Sumber: Output SPSS yang diolah

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui dari 97 responden bahwa didapatkan nilai rata-rata sebesar 2,26 dari skala 1-5 yang artinya secara umum sedikit yang selalu menerima pemberian uang/barang disaat ada pemilu/pilkada. Pertanyaan kuesioner ini disertai dengan permintaan kepada responden untuk menempatkan tanggapannya pada skala 1-5, dimana angka 1 mengindikasikan bahwa mereka sangat tidak setuju jika mereka selalu menerima pemberian uang/barang disaat ada pemilu/pilkada. Sebaliknya, jika nilai rata-rata makin dekat dengan angka 5 maka mengindikasikan reponden sangat setuju jika mereka selalu menerima pemberian uang/barang disaat ada pemilu/pilkada. Dari 97 responden yang mengakui bahwa mereka selalu menerima politik uang adalah sebanyak 39 orang sedangkan sisanya tidak menerima dan ada pula yang tidak menjawab.

Hal tersebut juga dapat dilihat pada diagram lingkaran yang diambil berdasarkan hasil pada kuesioner yaitu sebagai berikut:

Gambar 5. 4 Faktor Kebudayaan/Kebiasaan



Dapat kita lihat pada diagram lingkaran diatas bahwa hanya sebagian kecil masyarakat Kelurahan Bancar yang selalu menerima politik uang saat pemilu/pilkada yang mana hal tersebut lama-kelamaan menjadi kebiasaan disaat ada pemilu/pilkada. Sebanyak 58% (56 orang) mengaku tidak selalu menerima pemberian politik uang pada saat ada pemilu/pilkada, kemudian 40% (39 orang) mengaku sebaliknya, dan 2% (2 orang) lainnya tidak menjawab. Artinya, faktor kebudayaan/kebiasaan merupakan salah satu faktor yang melatarbelakangi terjadinya politik uang di Kelurahan Bancar

dengan pengaruh sebesar 40%. Masih banyak faktor-faktor lain diluar sana yang mungkin saja menjadi penyebab terjadinya politik uang di Kelurahan Bancar yang tidak diteliti dalam penelitian ini, seperti contohnya faktor kepercayaan terhadap kandidat yang maju dalam kontestasi pilkada.

BAB VI

PENGARUH POLITIK UANG TERHADAP PERILAKU PEMILIH DI KELURAHAN BANCAR KABUPATEN PURBALINGGA

A. Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

Dalam mengetahui seberapa besar pengaruh politik uang terhadap perilaku pemilih di Kelurahan Bancar pada pilkada 2020 di Kabupaten Purbalingga. Maka, penulis mengawalinya dengan membuat tabel tabulasi di masing-masing variabel, yakni variabel X yang membahas mengenai politik uang dan variabel Y yang membahas mengenai perilaku pemilih. Lebih lanjut, setelah membuat tabel tabulasi tersebut, penulis menggunakan teknik analisis regresi linear sederhana dengan bantuan SPSS.

Tabel *Coefficients* digunakan untuk menentukan model regresi. Berikut ini adalah hasil output tabel *Coefficients* menggunakan SPSS:

Tabel 6. 1 Regresi Politik Uang Terhadap Perilaku Pemilih

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	.644	.332		1.943	.055
	Politik_Uang	.724	.025	.942	28.842	.000

a. Dependent Variable: Perilaku_Pemilih

Dari hasil tersebut dapat dimasukkan dalam persamaan regresinya yaitu sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

$$Y = 0,644 + 0,724X$$

Dimana:

Y = Variabel dependen

X = Variabel independen

a = Konstanta (intersep)

b = Konstanta regresi (slop)

Langkah selanjutnya adalah menguji hipotesis penelitian dengan melakukan uji-t. Nilai t hitung merupakan hasil yang diperoleh dari tabel regresi (lihat Tabel 6.1). Kemudian nilai t hitung tersebut dibandingkan dengan t tabel. Dengan pengambilan keputusan sebagai berikut:

Jika t hitung < t tabel, maka Ha ditolak dan Ho diterima

Jika t hitung > t tabel, maka Ha diterima dan Ho ditolak

Berikut ini adalah tabel regresi yang dihasilkan dari pengolahan data melalui SPSS:

Tabel 6. 2 Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.644	.332		1.943	.055
	Politik_Uang	.724	.025	.942	28.842	.000

a. Dependent Variable: Perilaku_Pemilih

Pada tabel diatas diketahui bahwa nilai t hitung sebesar 28,842 dan nilai t tabel 1,996. Dapat diambil kesimpulan bahwa t hitung > t tabel ($28,842 > 1,996$), sehingga Ha diterima dan Ho ditolak. **Artinya ada pengaruh antara politik uang terhadap perilaku pemilih pada pilkada 2020 di Kelurahan Bancar.**

Selanjutnya adalah menentukan nilai koefisien determinasi. Adapun tabelnya adalah sebagai berikut:

Tabel 6. 3 Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.942 ^a	.888	.887	2.88351

a. Predictors: (Constant), Politik_Uang

Pada tabel diatas, diperoleh hasil R-Square sebesar 0,888. Angka ini adalah hasil pengkuadratan dari harga koefisien korelasi, atau $0,942 \times 0,942 = 0,888$. R-Square disebut juga dengan koefisien determinasi, yang berarti $0,888 \times 100 = 88\%$

variabel perilaku pemilih dipengaruhi oleh variabel politik uang, sisanya (100% - 88% = 12%) dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

B. Pengaruh Politik Uang Terhadap Perilaku Pemilih

1. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis adalah yang terawal muncul dalam tradisi studi perilaku pemilih. Model ini berkembang di Eropa dan di Amerika pada tahun 1950-an dan dibangun dengan asumsi bahwa perilaku pemilih ditentukan oleh karakteristik sosiologis para pemilih, terutama kelas sosial, agama, dan kelompok etnik/kedaerahan/bahasa. Orang yang berpendidikan cenderung berpartisipasi dalam pemilu karena kesadaran tentang arti penting pemilu bagi kepentingan dirinya dan masyarakat banyak. Hasil pemilu akan menentukan kebijakan-kebijakan publik yang akan berkaitan dengan semua warga negara, termasuk dirinya. Orang yang punya kesadaran ini biasanya orang yang relatif berpendidikan. Oleh karena itu, dibandingkan yang kurang berpendidikan, mereka yang berpendidikan lebih mungkin untuk ikut pemilu (Mujani, Liddle, & Ambardi, 2012, hal. 6).

Dalam model sosiologis, penggerak utama partisipasi dan pilihan politik adalah perbedaan-perbedaan dalam hal jenis kelamin, usia, etnis, atau daerah tempat tinggal, agama dan tingkat kesalehan, serta kelas sosial seperti yang diukur dari tempat tinggal di perkotaan versus pedesaan, tingkat pendidikan, penghasilan, dan jenis pekerjaan. Para cendekiawan dan politisi Indonesia telah memberikan perhatian paling besar pada agama, etnisitas, dan kelas sosial, yang semuanya dianggap penggerak utama (Mujani, Liddle, & Ambardhi, 2019, hal. 91).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan sosiologis untuk menganalisis perilaku pemilih berdasarkan karakteristik usia, jenis kelamin, dan juga agama.

a) Usia

Usia dipercaya memengaruhi keikutsertaan dalam pemilu. Orang-orang menganggap kandidat dengan usia lebih tua maka akan lebih matang dan berpengalaman. Berikut ini adalah daftar usia 97 responden di Kelurahan Bancar:

Tabel 6. 4 Usia Responden

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 17-21 tahun	15	15.5	15.5	15.5
22-26 tahun	10	10.3	10.3	25.8
27-31 tahun	7	7.2	7.2	33.0
32-36 tahun	15	15.5	15.5	48.5
37-41 tahun	17	17.5	17.5	66.0
> 42 tahun	33	34.0	34.0	100.0
Total	97	100.0	100.0	

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa jumlah responden terbanyak adalah responden dengan usia 42 tahun keatas yaitu sebanyak 33 orang, kemudian disusul dengan responden yang berusia 37-41 tahun sebanyak 17 orang, yang berusia 17-21 tahun dan 32-36 tahun berjumlah masing-masing 15 orang, selanjutnya usia 22-26 tahun sebanyak 10 orang, dan yang paling sedikit adalah 7 orang dengan usia 27-31 tahun. Selanjutnya untuk mengetahui apakah politik uang berpengaruh terhadap perilaku pemilih ditinjau berdasarkan usia adalah sebagai berikut:

Tabel 6. 5 Statistik Deskriptif dari Usia

Pernyataan Kuesioner	Nilai Minimal	Nilai Maksimal	Rata-rata	Simpangan Baku	Hasil
Memilih kandidat yang usianya lebih tua karena dianggap lebih berpengalaman	1,00	5,00	3,02	1,18	Faktor usia cukup berpengaruh dalam menentukan pilihan pemilih

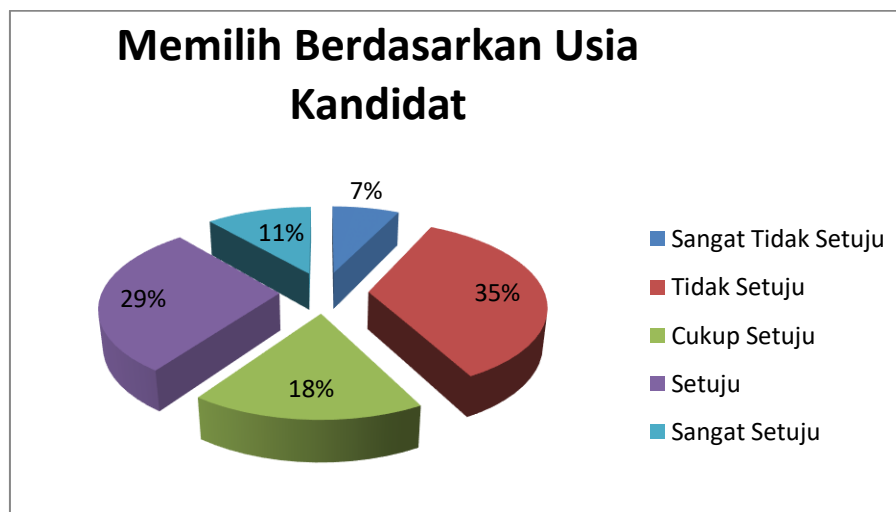
Sumber: Output SPSS yang diolah

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui dari 97 responden bahwa didapatkan nilai rata-rata sebesar 3,02 yang artinya faktor usia cukup berpengaruh dalam menentukan pilihan pemilih, tetapi tidak sedikit pula yang memandang berapapun usianya tidak mempengaruhi pilihan mereka selama

kandidat tersebut memiliki rekam jejak yang baik. Pertanyaan kuesioner ini disertai dengan permintaan kepada responden untuk menempatkan tanggapannya pada skala 1-5, dimana angka 1 mengindikasikan bahwa mereka menganggap usia sangat tidak penting dalam menentukan akan memilih kandidat yang mana. Sebaliknya, jika nilai rata-rata makin dekat dengan angka 5 maka mengindikasikan responden menganggap usia sangat penting dalam menentukan pilihan mereka.

Hal tersebut juga dapat dilihat pada diagram lingkaran yang menampilkan persentase yang diambil berdasarkan hasil pada kuesioner yaitu sebagai berikut:

Gambar 6. 1 Pendekatan Sosiologis (Usia)



Dari Gambar 6.1 diketahui bahwa responden yang sangat tidak setuju untuk memilih kandidat berdasarkan usia adalah 7% (7 orang), responden yang tidak setuju adalah 35% (34 orang), responden yang cukup setuju adalah 18% (17 orang), responden yang setuju adalah 29% (28 orang), dan yang sangat setuju adalah 11% (11 orang). Jadi dapat disimpulkan sebagian besar warga Kelurahan Bancar mempertimbangkan usia kandidat sebelum memilih, mereka memilih kandidat yang usianya lebih tua karena dianggap lebih berpengalaman. Tetapi bukan berarti kandidat yang masih berusia muda tidak memiliki pengalaman karena saat ini banyak juga kandidat-kandidat dari partai lain yang maju dalam pemilu maupun pilkada yang usianya masih muda tetapi memiliki banyak prestasi. Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa

faktor usia berpengaruh terhadap pilihan pemilih dengan pengaruh sebesar 58%.

b) Jenis Kelamin

Selain usia, jenis kelamin juga diketahui memengaruhi pilihan masyarakat. Kandidat yang berjenis kelamin laki-laki dianggap lebih mampu memimpin dibandingkan dengan kandidat perempuan. Itulah mengapa kebanyakan pemimpin kebanyakan berjenis kelamin laki-laki. Berikut ini adalah daftar jenis kelamin 97 responden di Kelurahan Bancar:

Tabel 6. 6 Jenis Kelamin Responden

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Laki-laki	45	46.4	46.4	46.4
Perempuan	52	53.6	53.6	100.0
Total	97	100.0	100.0	

Dari tabel tersebut kita ketahui bahwa responden terbanyak adalah responden perempuan yaitu berjumlah 52 orang sedangkan laki-laki hanya berjumlah 45 orang. Selanjutnya untuk mengetahui apakah politik uang berpengaruh terhadap perilaku pemilih ditinjau berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut:

Tabel 6. 7 Statistik Deskriptif dari Jenis Kelamin

Pernyataan Kuesioner	Nilai Minimal	Nilai Maksimal	Rata-rata	Simpangan Baku	Hasil
Memilihkan didat yang berjenis kelamin laki-laki	1,00	5,00	2,96	1,09	Jenis kelamin sedikit berpengaruh dalam menentukan pilihan pemilih

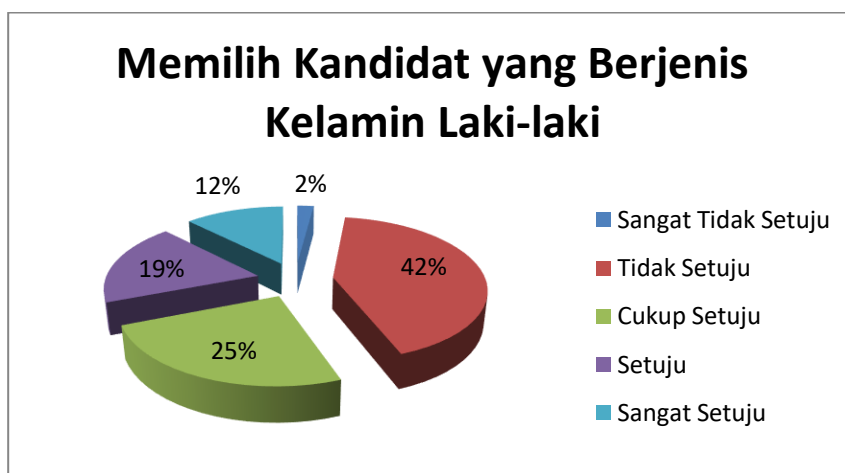
Sumber: Output SPSS yang diolah

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui dari 97 responden bahwa didapatkan nilai rata-rata sebesar 2,96 dari skala 1-5 yang artinya faktor jenis kelamin sedikit berpengaruh dalam menentukan pilihan pemilih, karena

mereka menganggap siapapun bisa menjadi pemimpin. Pertanyaan kuesioner ini disertai dengan permintaan kepada responden untuk menempatkan tanggapannya pada skala 1-5, dimana angka 1 mengindikasikan bahwa mereka menganggap jenis kelamin sangat tidak penting dalam menentukan akan memilih kandidat yang mana. Sebaliknya, jika nilai rata-rata makin dekat dengan angka 5 maka mengindikasikan reponden menganggap jenis kelamin sangat penting dalam menentukan pilihanmereka.

Hal tersebut juga dapat dilihat pada diagram lingkaran yang diambil berdasarkan hasil pada kuesioner yaitu sebagai berikut:

Gambar 6. 2 Jenis Kelamin



Dari Gambar 6.3 diketahui bahwa responden yang sangat tidak setuju untuk memilih kandidat yang berjenis kelamin laki-laki adalah 2% (2 orang), responden yang tidak setuju adalah 42% (41 orang), responden yang cukup setuju adalah 25% (24 orang), responden yang setuju adalah 19% (18 orang), dan responden yang sangat setuju adalah 12% (12 orang). Dari diagram diatas dapat kita lihat bahwa sebagian besar masyarakat Kelurahan Bancar memandang jenis kelamin dalam menentukan kandidat mana yang akan dipilih. Kandidat perempuan maupun laki-laki dianggap memiliki kemampuan yang sama. Dan kebetulan pada pilkada 2020 di Kabupaten Purbalingga ini yang memenangkan suara terbanyak adalah kandidat perempuan yaitu Dyah Hayuning Pratiwi yang saat ini menjabat sebagai Bupati Purbalingga. Jadi dapat disimpulkan faktor jenis kelamin mempengaruhi pilihan pemilih sebesar 56%.

c) Agama

Semua umat manusia baik individu maupun kelompok memiliki keyakinan keagamaan. Namun keyakinan keagamaan seseorang itu berbeda-beda, karena telah dipengaruhi oleh kondisi masyarakat. Hal ini menjadi persoalan menarik untuk dikaji sebab agama menjadi faktor yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, karena agama adalah salah satu bentuk konstruksi sosial. Bagi masyarakat yang tidak memiliki komitmen dan pemahaman keagamaan, agama bukanlah merupakan satu-satunya faktor yang menentukan dalam kehidupan mereka. Namun bagi masyarakat yang tidak memiliki komitmen dan pemahaman keagamaan, agama bukanlah merupakan satu-satunya faktor yang menentukan dalam kehidupan mereka. Namun bagi masyarakat yang memiliki pemahaman keagamaan, maka agama memiliki peran penting dalam tatanan sosial.

Faktor peran dan pengaruh agama memang menjadi hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Agama adalah refleksi atas wujud rohaniah yang ada pada diri manusia, dipandang mampu menjadi pedoman yang memberikan ketenangan hidup. Oleh karena itu, menurut Zakiah Daradjat, agama mempunyai peran penting dalam pengendalian seseorang. Untuk mengetahui apakah politik uang berpengaruh terhadap perilaku pemilih ditinjau berdasarkan agama adalah sebagai berikut:

Tabel 6. 8 Statistik Deskriptif dari Agama

Pernyataan Kuesioner	Nilai Minimal	Nilai Maksimal	Rata-rata	Simpangan Baku	Hasil
Memilih kandidat yang agamanya sama dengan pemilih	1,00	5,00	3,16	1,29	Agama cukup berpengaruh dalam menentukan pilihan pemilih

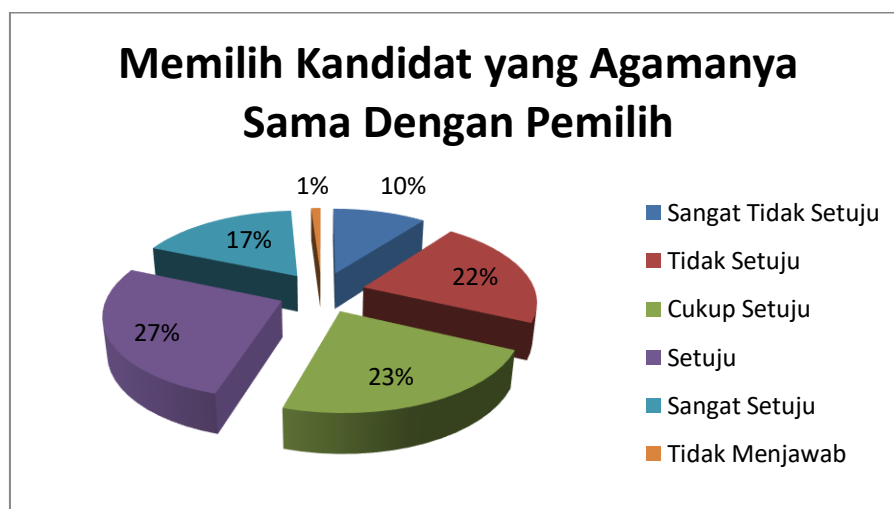
Sumber: Output SPSS yang diolah

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui dari 97 responden bahwa didapatkan nilai rata-rata sebesar 3,16 dari skala 1-5 yang artinya faktor agama cukup berpengaruh dalam menentukan pilihan pemilih, karena mereka menganggap pemimpin yang baik adalah pemimpin yang agamanya sama dengan yang dianut oleh pemilih tersebut. Pertanyaan kuesioner ini disertai

dengan permintaan kepada responden untuk menempatkan tanggapannya pada skala 1-5, dimana angka 1 mengindikasikan bahwa mereka menganggap agama sangat tidak penting dalam menentukan akan memilih kandidat yang mana. Sebaliknya, jika nilai rata-rata makin dekat dengan angka 5 maka mengindikasikan responden menganggap agama sangat penting dalam menentukan pilihan mereka.

Hal tersebut juga dapat dilihat pada diagram lingkaran yang menampilkan persentase yang diambil berdasarkan hasil pada kuesioner yaitu sebagai berikut:

Gambar 6. 3 Faktor Agama



Dari Gambar 6.4 diketahui bahwa responden yang sangat tidak setuju untuk memilih kandidat yang berasal dari agama yang sama dengan dirinya sendiri adalah 10% (10 orang), responden yang tidak setuju adalah 22% (21 orang), responden yang cukup setuju adalah 23% (22 orang), responden yang setuju adalah 27% (26 orang), responden yang sangat setuju adalah 17% (17 orang), dan responden yang tidak menjawab adalah 1% (1 orang). Dari diagram lingkaran diatas, dapat kita lihat bahwa warga Kelurahan Bancar memilih kandidat berdasarkan pertimbangan agama yang dianut oleh kandidat tersebut, karena pemilih di Kelurahan Bancar cenderung terlebih dahulu mempertimbangkan dari segi agama. Mereka tidak mau dipimpin oleh pemimpin yang agamanya berbeda dengan mereka dan sebagian warga Kelurahan Bancar pun membenarkan hal tersebut. Dapat diambil kesimpulan bahwa faktor agama berpengaruh terhadap pilihan pemilih dengan pengaruh sebesar 67%.

2. Pendekatan Psikologis

Menurut pendekatan psikologis, seorang warga berpartisipasi dalam pemilu atau pilkada bukan karena kondisinya lebih baik secara sosial-ekonomi, atau karena berada dalam jaringan sosial, akan tetapi karena ia tertarik dengan politik, punya perasaan dekat dengan partai tertentu (identitas partai), punya informasi yang cukup untuk menentukan pilihan, merasa suaranya berarti, serta percaya bahwa pilihannya dapat ikut memperbaiki keadaan (*political efficacy*) (Mujani, Liddle, & Ambardi, 2012, hal. 22). Verba dalam Mujani (2012) berpendapat seseorang berpartisipasi dalam politik seperti memilih dalam pemilu bukan saja karena ia berada dalam jaringan sosial, terlibat dalam kegiatan *civic*, tetapi juga karena ia ingin berpartisipasi. Walaupun ia terlibat (*engaged*) dalam kehidupan *civic*, ia tidak secara otomatis berpartisipasi dalam pemilu bila ia tidak ingin berpartisipasi.

Yang termasuk kedalam *political engagement* ini adalah informasi politik atau pengetahuan politik, *political interest* (tertarik politik), *internal efficacy*, dan *partisanship* (identitas partai). Price dalam Mujani (Mujani, Liddle, & Ambardi, 2012, hal. 23) mengungkapkan informasi politik adalah informasi yang dimiliki seseorang tentang hal-hal yang berkaitan dengan politik atau yang berkaitan dengan kepentingan umum. Demokrasi sebagai sebuah sistem politik menuntut partisipasi dari warga negara biasa. Partisipasi ini mencakup banyak hal, seperti ikut serta dalam pemilu, menentukan siapa yang pantas dipilih menjadi pejabat publik, menentukan kebijakan publik apa yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, dan sebagainya. Semua partisipasi ini kualitasnya sangat ditentukan oleh pengetahuan partisipan tentang masalah-masalah publik tersebut.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan psikologis untuk menganalisis perilaku pemilih berdasarkan karakteristik identifikasi partai dan orientasi kepada kandidat.

a) Identifikasi Partai

Partisanship atau identitas partai adalah komponen lain dari *political engagement* yang dipercaya punya pengaruh positif terhadap partisipasi politik. *Partisanship* adalah suatu keadaan psikologis, yakni perasaan dekat dengan, sikap mendukung atau setia pada, atau identifikasi diri dengan partai politik tertentu. *Partisanship* membentuk sebuah identitas politik seorang warga karena warga tersebut punya kemampuan psikologis untuk mengidentikan dirinya dengan sebuah partai politik. Karena itu pula, *partisanship* biasa disebut identitas partai

(*party ID*) seseorang. Seorang partisan adalah orang yang merasa dirinya bagian dari sebuah partai atau mengidentikan dirinya dengan partai tertentu, misalnya Partai Golkar atau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Orang ini bisa mengatakan kepada kita misalnya “Saya orang Golkar” atau “Saya orang PDIP” (Mujani, Liddle, & Ambardi, 2012, hal. 24). Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh identifikasi partai terhadap perilaku pemilih, berikut ini adalah hasil perhitungan analisis dari kuesioner terkait identifikasi partai:

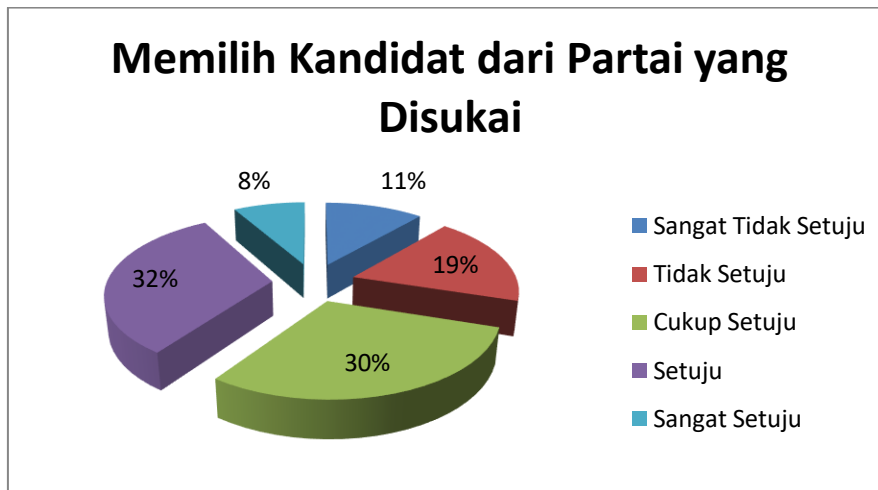
Tabel 6. 9 Statistik Deskriptif dari Identifikasi Partai

Pernyataan Kuesioner	Nilai Minimal	Nilai Maksimal	Rata-rata	Simpangan Baku	Hasil
Memilih kandidat dari partai yang saya sukai	1,00	5,00	3,07	1,13	Identifikasi partai cukup berpengaruh dalam menentukan pilihan pemilih

Sumber: Output SPSS yang diolah

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui dari 97 responden bahwa didapatkan nilai rata-rata 3,07 dari skala 1-5 yang artinya identifikasi partai cukup berpengaruh dalam menentukan pilihan pemilih, mereka berpendapat bahwa memilih kandidat yang berasal dari partai yang mereka sukai adalah keputusan terbaik sehingga mereka dengan senang hati melakukannya agar kandidat tersebut mendapat suara terbanyak. Pertanyaan kuesioner ini disertai dengan permintaan kepada responden untuk menempatkan tanggapannya pada skala 1-5, dimana angka 1 mengindikasikan bahwa mereka menganggap identifikasi partai sangat tidak penting dalam menentukan akan memilih kandidat yang mana. Sebaliknya, jika nilai rata-rata makin dekat dengan angka 5 maka mengindikasikan reponden menganggap identifikasi partai sangat penting dalam menentukan pilihan mereka. Hal tersebut juga dapat dilihat pada diagram lingkaran yang diambil berdasarkan hasil pada kuesioner yaitu sebagai berikut:

Gambar 6. 4 Identifikasi Partai



Dari Gambar 6.5 diketahui bahwa responden yang sangat tidak setuju untuk memilih kandidat dari partai yang disukai adalah 11% (11 orang), responden yang tidak setuju adalah 19% (18 orang), responden yang cukup setuju adalah 30% (29 orang), responden yang setuju adalah 32% (31 orang), dan responden yang sangat setuju adalah 8% (8 orang). Dari diagram lingkaran diatas, dapat kita ketahui bahwa sebagian besar masyarakat Kelurahan Bancar memilih kandidat dari partai yang mereka sukai. Jadi dapat disimpulkan bahwa identifikasi partai berpengaruh terhadap pilihan pemilih di Kelurahan Bancar dengan pengaruh sebesar 70%.

b) Orientasi Kandidat

Dalam konteks demokrasi baru dimana institusionalisasi partai lemah, pemimpin bisa menjadi magnet yang menarik individu-individu untuk memberi suara kepada partai dan bahkan mengidentifikasi diri dengan partai. Saat seorang pemimpin terkenal mendirikan sebuah partai dan menjadi sosok utamanya, daya tarik partai itu mungkin akan dipengaruhi sekali oleh daya tarik sang pemimpin. Maka, ada probabilitas besar bahwa kualitas kepemimpinan memainkan peran penting dalam menentukan tidak hanya suara pilihan individu, tetapi juga identitas kepartaiannya (Mujani, Liddle, & Ambardhi, 2019, hal. 260). Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh orientasi kandidat terhadap perilaku pemilih, berikut ini adalah hasil perhitungan analisis dari kuesioner terkait orientasi kandidat.

Tabel 6. 10 Statistik Deskriptif dari Orientasi Kandidat

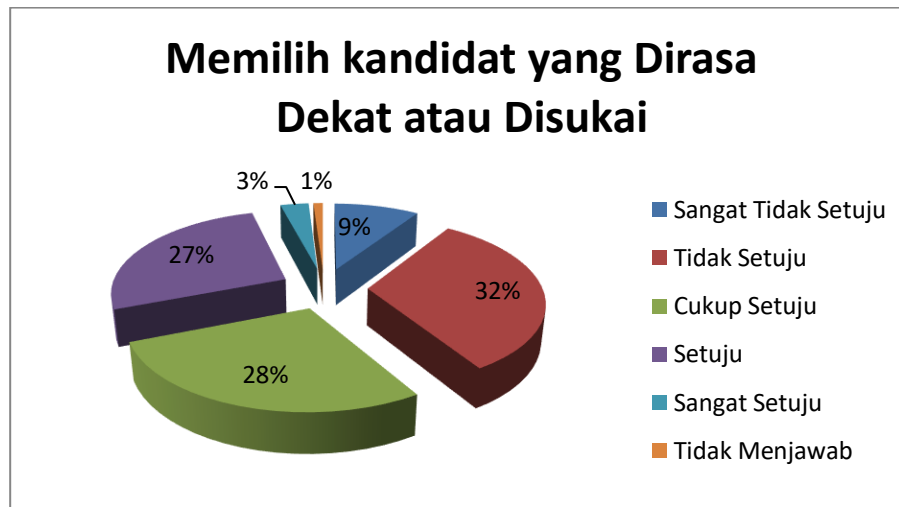
Pernyataan Kuesioner	Nilai Minimal	Nilai Maksimal	Rata-rata	Simpangan Baku	Hasil
Memilih kandidat yang disukai atau dirasa dekat	1,00	5,00	2,79	1,06	Orientasi kandidat sedikit berpengaruh dalam menentukan pilihan pemilih

Sumber: Output SPSS yang diolah

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui dari 97 responden bahwa didapatkan nilai rata-rata sebesar 2,79 dari skala 1-5 yang artinya orientasi kandidat sedikit berpengaruh dalam menentukan pilihan pemilih, mereka menganggap bahwa hal tersebut tidak adil jika mereka memilih kandidat dengan alasan mempunyai hubungan yang dekat dengan kandidat tersebut, masyarakat Kelurahan Bancar lebih suka mengakui memilih seorang kandidat dengan alasan kandidat tersebut memiliki rekam jejak yang baik. Pertanyaan kuesioner ini disertai dengan permintaan kepada responden untuk menempatkan tanggapannya pada skala 1-5, dimana angka 1 mengindikasikan bahwa mereka menganggap orientasi kandidat sangat tidak penting dalam menentukan akan memilih kandidat yang mana. Sebaliknya, jika nilai rata-rata makin dekat dengan angka 5 maka mengindikasikan responden menganggap orientasi kandidat sangat penting dalam menentukan pilihan mereka.

Hal tersebut juga dapat dilihat pada diagram lingkaran yang diambil berdasarkan hasil pada kuesioner yaitu sebagai berikut:

Gambar 6. 5 Orientasi Kandidat



Dari Gambar 6.6 diketahui bahwa responden yang sangat tidak setuju untuk memilih kandidat yang dirasa dekat atau disukai adalah 9% (9 orang), responden yang tidak setuju adalah 32% (31 orang), responden yang cukup setuju adalah 28% (27 orang), responden yang setuju adalah 27% (26 orang), responden yang sangat setuju adalah 3% (3 orang), dan responden yang tidak menjawab adalah 1% (1 orang). Dari diagram lingkaran diatas, kita ketahui bahwa sebagian besar masyarakat Kelurahan Bancar kurang setuju dengan pernyataan bahwa mereka memilih kandidat yang dirasa dekat atau disukai. Yang artinya bahwa pernyataan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi, yang berarti mereka memilih seorang kandidat bukan dari hal tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa orientasi kandidat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap pilihan pemilih di Kelurahan Bancar pada pilkada 2020 dengan pengaruh sebesar 58%.

3. Pendekatan Pilihan Rasional

Kondisi ekonomi-politik merupakan faktor lain yang merupakan inti dari pendekatan pilihan rasional. Masyarakat mungkin sudah mendapat informasi lebih baik tentang pemilu, dan ternyata ikut memilih tidak membuat nasib mereka lebih baik dibanding tidak memilih. Karena itu, mereka cenderung tidak ikut memilih, sehingga tingkat partisipasi dalam pemilu dan pilkada menurun. Menurut Oslon dalam Mujani (Mujani, Liddle, & Ambardi, 2012, hal. 29) dalam perspektif ini, hasil pemilu adalah barang publik (*public goods*), yakni siapapun yang menjadi pemimpin atau kebijakan publik apapun yang akan dibuat, tidak seorangpun yang akan

mendapat lebih banyak atau lebih sedikit secara pribadi, berapapun sumbangsuhnya bagi pembentukan barang publik tersebut.

Anggota masyarakat yang ikut pemilu ataupun tidak, hasilnya akan sama saja bagi dirinya. Artinya, tanpa bertindak apa-apa, warga tersebut akan menikmati barang publik yang kurang lebih sama dengan orang yang berbuat. Orang yang memilih ataupun tidak memilih dalam pemilu akan sama-sama memiliki pemimpin politik atau partai politik pemenang. Kalau begitu, secara rasional, mengapa harus lelah mengikuti pemilu kalau orang yang tak mengeluarkan tenaga dan waktu akan mendapatkan hasil yang sama dengan yang menggunakan tenaga dan waktunya untuk proses pemilihan tersebut. Menurut perspektif rasionalitas pemilih ini, seorang warga berperilaku rasional. Yakni, menghitung bagaimana caranya mendapatkan hasil maksimal dengan ongkos minimal. Jadi, kalau seorang warga ingin mendapatkan hasil yang sama dari pemilu, terlepas dri ikut ataupun tidak, maka warga tersebut seharusnya tidak ikut pemilu (Mujani, Liddle, & Ambardi, 2012, hal. 29).

Penulis menggunakan pendekatan pilihan rasional untuk menganalisis perilaku pemilih berdasarkan bagaimana pemilih menentukan pilihannya terhadap seorang kandidat, apakah karena diberikan uang ataupun barang oleh timses salah satu kandidat, atau karena melihat berdasarkan visi dan misi dari kandidat tersebut, ataupun karena melihat kandidat tersebut karena memiliki *track-record*/rekam jejak yang baik. Berikut ini adalah hasil perhitungan kuesioner tentang bagaimana pemilih memberikan suaranya kepada kandidat yang memberikan uang atau barang pada saat kampanye ataupun pada hari pemungutan suara atau yang biasa disebut ongkos pengganti:

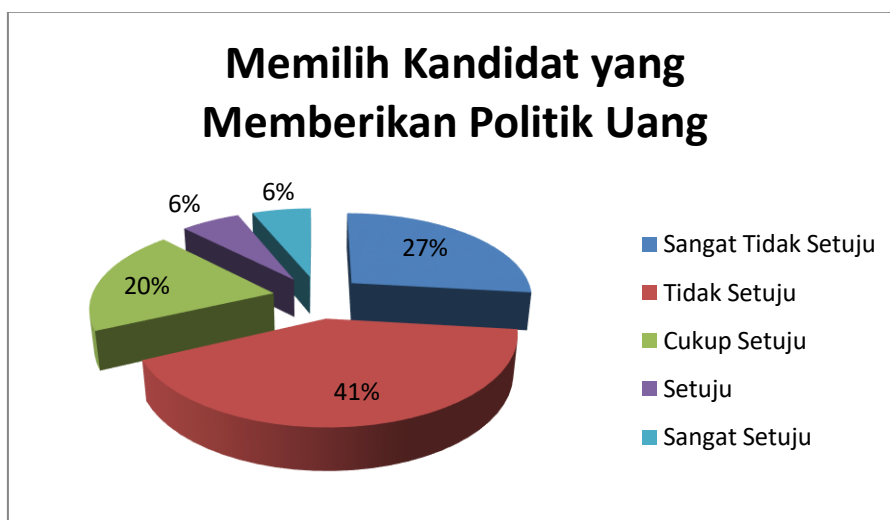
Tabel 6. 11 Statistik Deskriptif dari Pendekatan Pilihan Rasional

Pernyataan Kuesioner	Nilai Minimal	Nilai Maksimal	Rata-rata	Simpangan Baku	Hasil
Memilih kandidat yang memberikan uang/barang pada saat kampanye maupun pada hari pemungutan suara	1,00	5,00	2,23	1,10	Pemberian politik uang semacam ini sedikit berpengaruh dalam menentukan pilihan pemilih

Sumber: Output SPSS yang diolah

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui dari 97 responden bahwa didapatkan nilai rata-rata sebesar 2,23 dari skala 1-5 yang artinya pemberian politik uang sedikit berpengaruh dalam menentukan pilihan pemilih, hanya sebagian kecil warga yang menganggap hal tersebut harus mereka dapatkan jika hendak mendapatkan suara dari mereka. Pertanyaan kuesioner ini disertai dengan permintaan kepada responden untuk menempatkan tanggapannya pada skala 1-5, dimana angka 1 mengindikasikan bahwa mereka menganggap pemberian politik uang sangat tidak penting dalam menentukan akan memilih kandidat yang mana. Sebaliknya, jika nilai rata-rata makin dekat dengan angka 5 maka mengindikasikan responden menganggap pemberian politik uang sangat penting dalam menentukan pilihan mereka. Hal tersebut juga dapat dilihat pada diagram lingkaran yang diambil berdasarkan hasil pada kuesioner yaitu sebagai berikut:

Gambar 6. 6 Pemberian Politik Uang



Dari Gambar 6.7 diketahui responden yang sangat tidak setuju untuk memilih kandidat yang memberikan politik uang adalah 27% (26 orang), responden yang tidak setuju adalah 41% (40 orang), responden yang cukup setuju adalah 20% (19 orang), responden yang setuju adalah 6% (6 orang), dan responden yang sangatsetujuadalah 6% (6 orang). Dari diagram lingkaran diatas, dapat kita lihat bahwa sebagian besar masyarakat Kelurahan Bancar yang menjadi responden dalam penelitian ini, berpendapat bahwa mereka menggunakan hak suaranya pada saat hari pemungutan suara bukan karena diberikan uang atau ongkos untuk memilih tetapi lebih karena mereka sadar bahwa suara mereka penting dalam pilkada ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemberian politik uang dalam pendekatan pemilih rasional tidak merupakan

salah satu hal yang dapat mempengaruhi pilihan pemilih di Kelurahan Bancar dengan pengaruh sebesar 32%.

Hal berikutnya yang masih dalam perspektif pemilih rasional adalah bagaimana seorang pemilih memilih kandidat berdasarkan visi dan misi dari kandidat tersebut, dan berikut ini adalah hasil perhitungannya:

Tabel 6. 12 Statistik Deskriptif dari Pendekatan Pilihan Rasional (b)

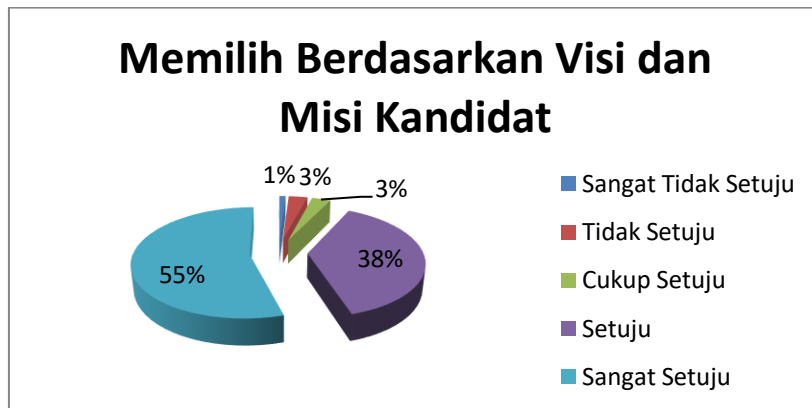
Pernyataan Kuesioner	Nilai Minimal	Nilai Maksimal	Rata-rata	Simpangan Baku	Hasil
Memilih kandidat yang memiliki visi, misi, dan program yang jelas	1,00	5,00	4,42	0,78	Hal ini berpengaruh dalam menentukan pilihan pemilih

Sumber: Output SPSS yang diolah

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui dari 97 responden bahwa didapatkan nilai rata-rata sebesar 4,42 dari skala 1-5 yang artinya visi dan misi berpengaruh dalam menentukan pilihan pemilih, sebagian besar warga menganggap hal tersebut adalah hal yang wajib mereka ketahui terlebih dahulu visi-misi dari seorang kandidat untuk melihat bagus atau tidaknya program-program yang akan diimplementasikan nantinya jika kandidat tersebut menang dalam pilkada, maka dari itu salah satu pertimbangan disaat mereka memberikan hak suaranya adalah bagaimana visi dan misi dari kandidat tersebut. Pertanyaan kuesioner ini disertai dengan permintaan kepada responden untuk menempatkan tanggapannya pada skala 1-5, dimana angka 1 mengindikasikan bahwa mereka menganggap visi dan misi kandidat sangat tidak penting dalam menentukan akan memilih kandidat yang mana. Sebaliknya, jika nilai rata-rata makin dekat dengan angka 5 maka mengindikasikan responden menganggap visi dan misi kandidat sangat penting dalam menentukan pilihan mereka.

Hal tersebut juga dapat dilihat pada diagram lingkaran yang diambil berdasarkan hasil pada kuesioner yaitu sebagai berikut:

Gambar 6. 7 Visi dan Misi Kandidat



Dari Gambar 6.9 diketahui responden yang sangat tidak setuju untuk memilih kandidat berdasarkan visi-misinya adalah 1% (1 orang), responden yang tidak setuju adalah 3% (3 orang), responden yang cukup setuju adalah 3% (3 orang), responden yang setuju adalah 38% (37 orang), dan responden yang sangat setuju 55% (53 orang). Dari diagram lingkaran diatas dapat kita ketahui bahwa sebagian besar masyarakat Kelurahan Bancar menjadikan visi dan misi kandidat sebagai bahan pertimbangan ketika mereka memilih pada saat pilkada dilaksanakan karena dari visi dan misi tersebut dapat dilihat apakah nantinya program-program yang akan dilaksanakan menguntungkan mereka atau tidak. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa visi dan misi kandidat dalam perspektif pemilih rasional ini berpengaruh terhadap pilihan pemilih.

Kemudian yang terakhir adalah bagaimana seorang pemilih memilih kandidat berdasarkan rekam jeaknya. Berikut ini adalah hasil perhitungannya:

Tabel 6. 13 Statistik Deskriptif dari Pendekatan Pilihan Rasional (c)

Pernyataan Kuesioner	Nilai Minimal	Nilai Maksimal	Rata-rata	Simpangan Baku	Hasil
Memilih kandidat yang rekam jeaknya baik	1,00	5,00	4,31	0,87	Hal ini berpengaruh dalam menentukan pilihan pemilih

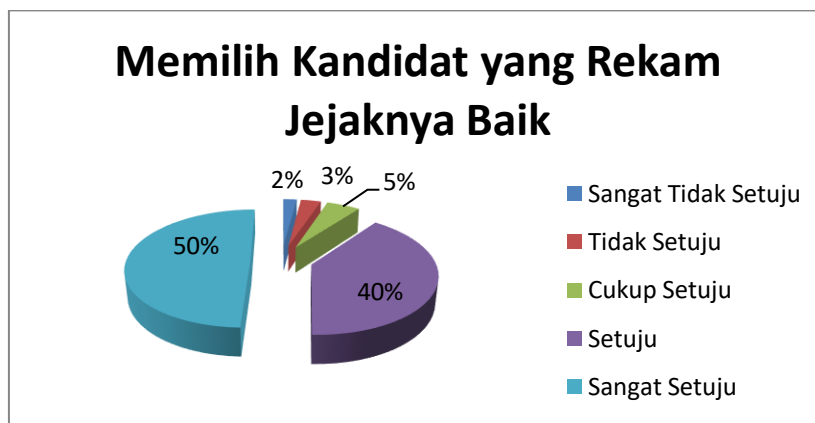
Sumber: Output SPSS yang diolah

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui dari 97 responden bahwa didapatkan nilai rata-rata sebesar 4,31 dari skala 1-5 yang artinya rekam jeak kandidat berpengaruh dalam menentukan pilihan pemilih, sebagian besar warga menganggap

hal tersebut harus dimiliki seorang pemimpin. Karena jika sebaliknya, maka warga akan ragu untuk memilih kandidat tersebut. Pertanyaan kuesioner ini disertai dengan permintaan kepada responden untuk menempatkan tanggapannya pada skala 1-5, dimana angka 1 mengindikasikan bahwa mereka menganggap rekam jejak kandidat sangat tidak penting dalam menentukan akan memilih kandidat yang mana. Sebaliknya, jika nilai rata-rata makin dekat dengan angka 5 maka mengindikasikan responden menganggap rekam jejak kandidat sangat penting dalam menentukan pilihan mereka.

Hal tersebut juga dapat dilihat pada diagram lingkaran yang diambil berdasarkan hasil pada kuesioner yaitu sebagai berikut

Gambar 6. 8 Rekam Jejak Kandidat



Dari Gambar 6.10 diketahui responden yang sangat tidak setuju untuk memilih kandidat berdasarkan rekam jejaknya adalah 2% (2 orang), responden yang tidak setuju adalah 3% (3 orang), responden yang cukup setuju adalah 5% (5 orang), responden yang setuju adalah 40% (39 orang), dan responden yang sangat setuju adalah 50% (48 orang). Berdasarkan diagram lingkaran diatas, dapat kita ketahui bahwa sebagian besar masyarakat Kelurahan Bancar memilih seorang kandidat dengan melihat rekam jejak dari kandidat tersebut, dan tentu saja seperti dibanyak tempat lainnya, mereka memilih kandidat yang memiliki rekam jejak yang baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa rekam jejak kandidat dalam pendekatan pemilihan rasional berpengaruh terhadap pilihan pemilih di Kelurahan Bancar sebesar 90%..

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian mengenai pengaruh politik uang terhadap perilaku pemilih pada pilkada 2020 di Kelurahan Bancar dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk politik uang yang ada pada masyarakat Kelurahan Bancar pada pilkada 2020 adalah berupa uang, barang, dan juga fasilitas/jasa. Untuk bentuk politik uang yang berupa uang, dalam penelitian ini dikategorikan sebagai *vote buying*. Dari 97 responden, hanya sedikit yang menerima *vote buying*. Sedangkan untuk bentuk politik uang yang berupa barang dikategorikan menjadi *individual gifts* dan *club goods*. Untuk *individual gifts* dibedakan menjadi sembako dan juga barang-barang yang terdapat nama kandidat, cukup banyak yang menerima sembako tetapi hanya sedikit yang menerima pemberian barang yang terdapat nama kandidat. Sedangkan *club goods* adalah pemberian perlengkapan ibadah untuk masjid dan hasilnya menunjukkan bahwa cukup banyak yang menerima hal tersebut. Kemudian untuk politik uang yang berupa fasilitas/jasa dikategorikan dalam bentuk *services & activities* dan *pork barrel projects*. Untuk *services & activities* dibedakan menjadi pembiayaan acara oleh kandidat untuk acara yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pengadaan pelayanan kesehatan gratis, dan hasilnya menunjukkan bahwa cukup banyak yang menerima kedua hal tersebut. Sedangkan untuk *pork barrel projects* adalah penawaran perbaikan/penerangan jalan dan juga janji-janji untuk merealisasikan program-program untuk kesejahteraan masyarakat, hasilnya menunjukkan bahwa cukup banyak juga yang menerima kedua hal tersebut.
2. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik politik uang di Kelurahan Bancar pada pilkada 2020 adalah faktor ekonomi, faktor pengetahuan politik, dan faktor kebiasaan/kebudayaan. Dari ketiga faktor tersebut, faktor yang paling berpengaruh adalah faktorekonomi.
3. Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ ($28.842 < 1,996$) sehingga H_a diterima dan H_o ditolak yang artinya ada pengaruh antara politik uang terhadap perilaku pemilih. Dimana 88% variabel perilaku pemilih

dipengaruhi oleh variabel politik uang, sisanya ($100\% - 88\% = 12\%$) dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis perilaku pemilih dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, dan pendekatan pilihan rasional. Untuk pendekatan sosiologis penulis menganalisis berdasarkan usia, jenis kelamin, dan juga agama. Hasilnya menunjukkan bahwa agama dan usia cukup berpengaruh dalam menentukan pilihan pemilih, sedangkan jenis kelamin hanya sedikit berpengaruh dalam menentukan pilihan pemilih. Kemudian untuk pendekatan psikologis penulis menganalisis berdasarkan identifikasi partai dan juga orientasi kandidat. Identifikasi partai cukup berpengaruh dalam menentukan pilihan pemilih, sedangkan orientasi kandidat hanya sedikit berpengaruh dalam menentukan pilihan pemilih. Selanjutnya untuk pendekatan pilihan rasional penulis menganalisis berdasarkan pemberian politik uang oleh kandidat sebagai pengganti ongkos, rekam jejak, dan juga visi & misi dari kandidat. Hasilnya menunjukkan bahwa pemberian ongkos pengganti memiliki pengaruh yang kecil terhadap pilihan pemilih, justru rekam jejak dan visi & misi lah yang memberikan pengaruh terhadap pilihan pemilih di Kelurahan Bancar pada pilkada 2020.

B. Saran

1. Perlu diadakan pendidikan politik atau sosialisasi tentang politik uang untuk masyarakat yang belum paham dan mengerti mengenai hal tersebut. Karena dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa masih terdapat sebagian kecil masyarakat yang belum mengerti tentang politik uang.
2. Pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mengawasi dalam pilkada harus lebih ketat lagi untuk mengawasi pilkada agar hal semacam ini tidak terulang lagi.
3. Perlu diadakan penelitian mengenai pengaruh politik uang terhadap perilaku pemilih pada pilkada namun di lokasi yang berbeda, misalnya di daerah-daerah yang mayoritas masyarakatnya miskin.
4. Perlu adanya tindakan tegas secara hukum untuk para politisi atau calon kandidat ataupun masyarakat yang melakukan politik uang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhinata, B. (2019). Vote Buying dan Perilaku Pemilih Pemula: Kasus Pemilihan Gubernur Bali 2018 di Tabanan. *POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik*, 163-178.
- Agustian. (2020, November). Skripsi: PENGARUH POLITIK UANG TERHADAP PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILU KEPALA DESA MUDUNG DARAT KECAMATAN MARO SEBO KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2019. Jambi , Jambi, Indonesia: UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
- Agustino, L. (2014). PATRONASE POLITIK ERA REFORMASI: ANALISIS PILKADA DI KABUPATEN TAKALAR DAN PROVINSI JAMBI. *JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK* , 69-85.
- Akbar, A. (2016, October). Skripsi : PENGARUH MONEY POLITICS TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PILKADA 2015 DI KABUPATEN BULUKUMBA (STUDI KASUS DESA BARUGAE KEC. BULUKUMPA). Samata, Sulawesi Selatan, Indonesia.
- Anggraini, M. (2019). PENGARUH POLITIK UANG TERHADAP TINGKAT PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT KABUPATEN DHARMASRAYA PADA PILKADA SERENTAK 2015. *Menara Ilmu*, 72-85.
- Anugrah, A. (2020, Desember 9). *Bawaslu Terima Laporan Dugaan Politik Uang Paslon Pilkada Purbalingga*. Dipetik Juni 13, 2021, dari detikNews: <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5288236/bawaslu-terima-laporan-dugaan-politik-uang-paslon-pilkada-purbalingga>
- Asadillah, M. (2020, Desember 24). *11 Laporan Politik Uang di Pilkada Purbalingga Dihentikan*. Dipetik November 4, 2021, dari Serayunews: <https://serayunews.com/11-laporan-politik-uang-di-pilkada-purbalingga-dihentikan/>
- Ashari, R. (2011). Skripsi: PENGARUH KEAHLIAN, INDEPENDENSI, DAN ETIKA TERHADAP KUALITAS AUDITOR PADA INSPEKTORAT PROVINSI MALUKU UTARA .
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy For Sale: Pemilu, Klientelisme, dan Negara di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2015). Patronase dan Klientelisme dalam Politik Elektoral di Indonesia. Dalam E. Aspinall, & M. Sukmajati, *Politik Uang di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit PolGov.
- Budiardjo, M. (2015). *Dasar-dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Chandra, M. J., & Ghafur, J. (2020). Peranan Hukum dalam Mencegah Praktik Politik Uang (Money Politics) dalam Pemilu di Indonesia: Upaya Mewujudkan Pemilu yang Berintegritas. *Wajah Hukum*, 52-56.
- Diskominfo. (2020, Desember 7). *PELAPOR POLITIK UANG DAPAT HADIAH RP. 2,5 JUTA*. Dipetik April 27, 2021, dari Pemerintah Kabupaten Purbalingga: <https://www.purbalinggakab.go.id/v1/pelapor-politik-uang-dapat-hadiah-rp-25-juta/>
- Fadillah, N. (2010). POTRET PEREMPUAN PADA PEMILUKADA PROPINSI JAMBI. *Nazharat*, 1-20.

- Farasonalia, R. (2020, Desember 11). *Bawaslu Temukan 23 Kasus Dugaan Politik Uang Saat Pilkada di Jawa Tengah*. Dipetik April 25, 2021, dari Kompas.com:
<https://regional.kompas.com/read/2020/12/11/17221471/bawaslu-temukan-23-kasus-dugaan-politik-uang-saat-pilkada-di-jawa-tengah>
- Febriani, E. (2018). ANALISIS PERILAKU MEMILIH (VOTING BEHAVIOR) PEMILIH PEMULA WILAYAH JAKARTA BARAT MENJELANG PEMILIHAN UMUM 2019. *Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik FISIP UTA'45 Jakarta*, 1-18.
- Ferdian, Asrinaldi, & Syahrizal. (2019). PERILAKU MEMILIH MASYARAKAT, MALPRAKTIK PEMILU DAN PELANGGARAN PEMILU. *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 20-31.
- Fitriani, L. U., Karyadi, L. W., & Chaniago, D. S. (2019). Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. *RESIPROKAL*, 53-61.
- Fitriyah. (2011). Fenomena Politik Uang dalam Pilkada.
- Hawing, H., Fadillah, B. N., & Parawu, H. E. (2020). Pengaruh Politik Uang Terhadap Partisipasi Pemilih Pemilukada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2018. *JSPG: Journal of Social Politics and Governance*, 192-204.
- Humaidi, Y. (2017). Politik Uang dan Perilaku Politik: Studi Terhadap Perilaku Pemilih dalam Pemilihan Umum Legislatif 2014 di Kelurahan Bangka, Jakarta Selatan. Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- J, F. Y., Zen, Z., & Darmansyah. (2018). *Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kazali, R., Rochmiatun, E., & Adytyas, N. O. (2020). Pengaruh Money Politics Terhadap Pilihan Masyarakat Pada Pilkades Serentak di Kabupaten Muara Enim Tahun 2017 (Studi Kasus di Desa Teluk Limau Kecamatan Gelumbang). *Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization*, 136-144.
- Kholiq, M. A. (2014). Perspektif Hukum Pidana tentang Fenomena Money Politics dan Korupsi Politik dalam Pemilu. *Seminar Nasional Mewujudkan Pemilu yang Demokratis*. Yogyakarta: Forum Kajian dan Penulisan Hukum (FKPH) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Liputan6.com. (2020, Desember 13). *Bawaslu Jateng Telusuri Dugaan Politik Uang di 4 Daerah, Salah Satunya Purbalingga*. Dipetik April 26, 2021, dari Liputan6.com:
<https://www.liputan6.com/regional/read/4432264/bawaslu-jateng-telusuri-dugaan-politik-uang-di-4-daerah-salah-satunya-purbalingga#>
- Monintja, C. K., Lopian, M. T., & Tulung, T. E. (2019). FAKTOR-FAKTOR PELANGGARAN POLITIK UANG BAGI PEMILIH PEMULA DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN.
- Mujani, S., Liddle, R. W., & Ambardhi, K. (2019). *Kaum Demokrat Kritis: Analisis Perilaku Pemilih Indonesia Sejak Demokrasi*. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).

- Mujani, S., Liddle, R. W., & Ambardi, K. (2012). *Kuasa Rakyat: Analisis Tentang Perilaku Memilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden*. Jakarta: Mizan.
- Nasution. (2003). *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pahlevi, M. E., & Amrurrobi, A. A. (2020). Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 141-152.
- Purbalingga, B. K. (2021). *Kabupaten Purbalingga Dalam Angka 2021*. Purbalingga: Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga.
- Purbalingga, K. K. (2020, Oktober 14). Dipetik April 14, 2021, dari <https://kab-purbalingga.kpu.go.id/index.php/17-berita-acara/121-berita-acara-dpt-pilbup-purbalingga-tahun-2020>
- Putri, D. N. (2018). Skripsi : GOODS POLITICS DALAM PEMILIHAN WALI KOTA SEMARANG TAHUN 2015 (Studi Kasus di Kelurahan Ngemplak Simongan).
- Rahman, F. N., Turtiantoro, & Utomo, S. (2011). Persepsi Pengaruh Money Politic Dan Jaringan Sosial Terhadap Perilaku Pemilih Pada Kemenangan Pasangan Calon dr. Hj. Widya Kandi Susanti, MM dan Wakilnya H. Mukh Mustamsikin, S.Ag, M.Si (YAKIN) Studi Kasus Pemilukada Kab. Kendal Tahun 2010. 1-11.
- Ramadhani, E. M. (2016). Skripsi : PENGARUH MONEY POLITIC TERHADAP PERILAKU PEMILIH PEMULA MASYARAKAT KECAMATAN CANDI DI KABUPATEN SIDOARJO DALAM PEMILIHAN PRESIDEN 2014.
- Ramli, M. (2016). Skripsi: PATRONASE POLITIK DALAM DEMOKRASI LOKAL (Analisis Terhadap Terpilihnya Hj. Marniwati Pada Pemilukades Di Desa Jojjolo Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba).
- RI, D. (2021). Belajar dari Pilkada Terakhir Tahun 2020. *Jurnal Etika dan Pemilu*, 3-9.
- Rimbing, P. J. (2015). Skripsi : MONEY POLITICS DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF DI KOTA MANADO TAHUN 2014 (Suatu Studi Di Dapil 1 Kecamatan Sario Dan Kecamatan Malalayang).
- Salabi, A. (2020, Juli 2). *Survei SPD, 60 Persen Lebih Pemilih Mau Terima Politik Uang*. Dipetik April 25, 2021, dari [Rumahpemilu.org: https://rumahpemilu.org/survei-spd-60-persen-lebih-pemilih-mau-terima-politik-uang/](https://rumahpemilu.org/survei-spd-60-persen-lebih-pemilih-mau-terima-politik-uang/)
- Sangkoy, R., Lopian, M., & Gosal, R. (2019). PERILAKU POLITIK PEMILIH PEMULA PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2016 (Studi Di Desa Ranomea Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan). *Eksekutif: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1-14.
- Sholikin, A. (2019). Mahalnya Ongkos Politik dalam Pemilu Serentak Tahun 2019. *Jurnal Transformative*, 87-108.
- Simkada. (2020, Agustus 8). *Aplikasi Pilkada 2020*. Dipetik April 8, 2021, dari Simkada: <https://www.simkada.net/blog/mengenal-lebih-jauh-pemilihan-kepala-daerah-di-indonesia/>

- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Surbakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Surbakti, R. (2010). *Partai, Pemilu, dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syafhendry. (2016). *Perilaku Pemilih Teori dan Praktek*. Riau: Alaf Riau.
- Syahrum, & Salim. (2012). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Citapustaka Media.
- Syaifuddin. (2010). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Topatimasang, R. (2011). *Menutup Pintu Masuk Politik Uang*. Jakarta: Maarif Institute.
- Usman, H., & Akbar, P. S. (2006). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Wahidah, S. N., Saifurruhaidi, & Bafadal, R. E. (t.thn.). UANG DAN KEKUASAAN POLITIK. 1-8.
- Wicaksono, A. (2021, Januari 19). *Bawaslu Sebut 96 Kasus Politik Uang di Pilkada 2020 Disetop*. Dipetik April 21, 2021, dari CNN Indonesia :
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210119195244-32-595859/bawaslu-sebut-96-kasus-politik-uang-di-pilkada-2020-disetop>
- Wijianto, & Ulfa, I. F. (2016). Pengaruh Status Sosial dan Kondisi Ekonomi Keluarga terhadap Motivasi Bekerja bagi Remaja Awal (Usia 12-16 Tahun) di Kabupaten Ponorogo. *Al Tjarah*, 190-210.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

PENGARUH POLITIK UANG TERHADAP PERILAKU PEMILIH PADA PILKADA 2020 DI KABUPATEN PURBALINGGA (STUDI KASUS KELURAHAN BANCAR KECAMATAN PURBALINGGA)

Nama :

Jenis Kelamin : 1. Pria 2. Wanita *lingkari jawaban yang benar

Usia :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Petunjuk pengisian:

1. Bacalah sejumlah pertanyaan dibawah ini dengan teliti.
2. Anda diharapkan agar memberikan jawaban sesuai dengan keadaan anda secara objektif dengan memberi tanda silang (X) pada salah satu kriteria untuk setiap pertanyaan yang dianggap paling tepat.
3. Pilihan jawaban yang telah disediakan adalah sebagai berikut:
STS : Sangat Tidak Setuju S : Setuju
TS : Tidak Setuju SS : Sangat Setuju
N : Netral
4. Dalam memberikan jawaban dimohon tidak ada pertanyaan yang terlewatkan.
5. Semua informasi yang telah anda berikan dalam kuesioner ini dilindungi kerahasiaannya dan hanya dipakai untuk keperluan penelitian.

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
	Perilaku Pemilih (Y)					
1	Saya memilih kandidat yang usianya lebih tua karena dianggap lebih berpengalaman					
2	Saya memilih kandidat yang berjenis kelamin laki-laki					
3	Saya memilih kandidat yang agamanya sama dengan					

	saya					
4	Saya memilih kandidat dari partai yang saya sukai					
5	Saya memilih kandidat yang dekat dengan saya atau yang saya sukai					
6	Saya memilih kandidat yang memiliki visi, misi, dan program yang jelas					
7	Saya memilih kandidat yang <i>track record</i> -nya baik					
8	Saya memilih kandidat yang memberikan uang/barang pada saat kampanye maupun pada hari pemungutan suara					
	Politik Uang (X)					
1	Saya menerima pemberian uang dari timses salah satu kandidat sehari sebelum hari pemungutan suara					
2	Saya tidak mau menerima pemberian sembako saat masa kampanye					
3	Saya menerima pemberian barang (payung, kaos, dll) yang terdapat nama kandidat					
4	Salah satu kandidat membiayai acara yang diselenggarakan oleh masyarakat					
5	Saya mau menerima politik uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari					
6	Salah satu kandidat memberikan perlengkapan ibadah untuk masjid atau hal lain yang serupa					
7	Pemberian uang/barang dari kandidat kepada masyarakat disaat sebelum dan menjelang pilkada adalah hal yang salah					
8	Salah satu kandidat menjanjikan merealisasikan sebuah program untuk kesejahteraan masyarakat jika mereka menang dalam pilkada					
9	Menerima pemberian uang/barang dari kandidat kepada masyarakat disaat sebelum dan menjelang pilkada adalah hal yang wajar					
10	Salah satu kandidat menawarkan perbaikan					

	jalan/penerangan jalan atau hal lain yang serupa					
11	Saya selalu menerima pemberian uang/barang disaat ada pemilu/pilkada					
12	Salah satu kandidat mengadakan pengobatan gratis atau pelayanan umum lainnya					

Lampiran 2 Surat Ijin Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Jambu Karang No. 2 Telp (0281) 893117 Purbalingga 53311

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 071/229/2021

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian;

Memperhatikan : Surat Dari Universitas Islam N Walisongo Nomor 1984/Un.10.6/K/KM.05.01/09/2021 Tanggal 09 September 2021.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga, memberikan rekomendasi kepada:

Nama : ENDING SELASIH
NIM : 1706016036
Alamat : Bancar RT02/03 Purbalingga
Untuk : Melakukan Ijin Penelitian dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Judul : *PENGARUH POLITIK UANG TERHADAP PERILAKU PEMILIH PADA PILKADA 2020 DI KABUPATEN PURBALINGGA (STUDI KASUS KELURAHAN BANCAR KECAMATAN PURBALINGGA)*
- b. Bidang Penelitian : Politik
- c. Waktu Penelitian : 10 September - 31 Desember 2021
- d. Penanggung Jawab : -
- e. Status Penelitian : Baru
- f. Anggota Peneliti : -
- g. Nama Lembaga : Universitas Islam N Walisongo

Ketentuan yang harus ditaati adalah:

- a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat / Lembaga swasta yang akan dijadikan sebagai obyek lokasi;
- b. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan;
- c. Setelah kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga;
- d. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksana kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus dilakukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;
- e. Surat rekomendasi ini dapat diubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PURBALINGGA



GATOT BUDIRAHARDJO, S.Sos

Pembina Tingkat I

NIP. 19680827 199503 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Jambu Karang No. 2 Telp (0281) 893117 Purbalingga 53311

Purbalingga, 10 September 2021

Nomor : 071/229/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **Ijin Penelitian**

Kepada
Yth. Kepala Bappelitbangda
Kabupaten Purbalingga

di-

PURBALINGGA

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan penelitian, bersama ini Terlampir Disampaikan Rekomendasi Ijin Penelitian atas nama :ENDING SELASIH dengan Nomor Surat : 071/229/2021 dengan judul : *PENGARUH POLITIK UANG TERHADAP PERILAKU PEMILIH PADA PILKADA 2020 DI KABUPATEN PURBALINGGA (STUDI KASUS KELURAHAN BANCAR KECAMATAN PURBALINGGA)* Untuk ditindaklanjuti.

Demikian untuk menjadi maklum dan terimakasih.

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PURBALINGGA



GATOT BUDIRAHARDJO, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19680827 199503 1 004

Tembusan Kepada Yth.:

1. Bupati Purbalingga
2. Sekretaris Daerah Kab. Purbalingga
3. Sdr.ENDING SELASIH



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Jl. Jambukarang No. 8 Telepon(0281) 891450 Fax (0281) 895194
PURBALINGGA - 53311

Nomor : 071/202/2021 Purbalingga, 15 September 2021
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Ijin Penelitian/ Pra Survey/Ijin Validitas Penelitian Kepada Yth.
Camat Purbalingga
Di-
Purbalingga

Menindaklanjuti surat rekomendasi Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Nomor 071/229/2021 tanggal 10 September 2021, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan hormat diberitahukan bahwa pada Instansi Bapak/Ibu akan dilaksanakan Penelitian/PraSurvey oleh :

Nama/NIM : ENDING SELASIH NIM : 1706016036
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Bancar Rt 002/ RW 003, Kec. Purbalingga, Kab. Purbalingga
Email/ No. HP : endingselasih@gmail.com/0895380013874
Lokasi : Kabupaten Purbalingga
Judul / Tujuan : *PENGARUH POLITIK UANG TERHADAP PERILAKU PEMILIH PADA PILKADA 2020 DI KABUPATEN PURBALINGGA (STUDI KASUS KELURAHAN BANCAR KECAMATAN PURBALINGGA)*
Waktu : 10 September 2021 s/d 31 Desember 2021
Catatan : Dalam melakukan Penelitian/Survey untuk menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon perkenan Bapak/Ibu agar yang bersangkutan untuk dapat kiranya difasilitasi. Setelah selesai, yang bersangkutan berkewajiban melaporkan hasil Penelitian/PraSurvey kepada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga dengan menyerahkan satu eksemplar laporan untuk didokumentasikan dan dimanfaatkan seperlunya.

Demikian untuk menjadikan maklum, atas bantuan dan kerja sama yang baik disampaikan terimakasih.

KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN PURBALINGGA

SISWANTO S. Pt. M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19720527 199803 1 005

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth

1. Kepala Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Purbalingga;
2. Dekan FISIP UIN Walisongo Semarang;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran 3 Dokumentasi Kegiatan



Mengajukan perijinan di tempat penelitian (Kelurahan Bancar) dengan Lurah Bancar
(8/9/2021)

Lampiran 4 Koefisien Korelasi Sederhana (r tabel)

Tabel r untuk df = 1 - 50					
df = (N-2)	Tingkat signifikansi untuk uji satu arah				
	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005
	Tingkat signifikansi untuk uji dua arah				
	0.1	0.05	0.02	0.01	0.001
1	0.9877	0.9969	0.9995	0.9999	1.0000
2	0.9000	0.9500	0.9800	0.9900	0.9990
3	0.8054	0.8783	0.9343	0.9587	0.9911
4	0.7293	0.8114	0.8822	0.9172	0.9741
5	0.6694	0.7545	0.8329	0.8745	0.9509
6	0.6215	0.7067	0.7887	0.8343	0.9249
7	0.5822	0.6664	0.7498	0.7977	0.8983
8	0.5494	0.6319	0.7155	0.7646	0.8721
9	0.5214	0.6021	0.6851	0.7348	0.8470
10	0.4973	0.5760	0.6581	0.7079	0.8233
11	0.4762	0.5529	0.6339	0.6835	0.8010
12	0.4575	0.5324	0.6120	0.6614	0.7800
13	0.4409	0.5140	0.5923	0.6411	0.7604
14	0.4259	0.4973	0.5742	0.6226	0.7419
15	0.4124	0.4821	0.5577	0.6055	0.7247
16	0.4000	0.4683	0.5425	0.5897	0.7084
17	0.3887	0.4555	0.5285	0.5751	0.6932
18	0.3783	0.4438	0.5155	0.5614	0.6788
19	0.3687	0.4329	0.5034	0.5487	0.6652
20	0.3598	0.4227	0.4921	0.5368	0.6524
21	0.3515	0.4132	0.4815	0.5256	0.6402
22	0.3438	0.4044	0.4716	0.5151	0.6287
23	0.3365	0.3961	0.4622	0.5052	0.6178
24	0.3297	0.3882	0.4534	0.4958	0.6074
25	0.3233	0.3809	0.4451	0.4869	0.5974
26	0.3172	0.3739	0.4372	0.4785	0.5880
27	0.3115	0.3673	0.4297	0.4705	0.5790
28	0.3061	0.3610	0.4226	0.4629	0.5703
29	0.3009	0.3550	0.4158	0.4556	0.5620
30	0.2960	0.3494	0.4093	0.4487	0.5541
31	0.2913	0.3440	0.4032	0.4421	0.5465
32	0.2869	0.3388	0.3972	0.4357	0.5392
33	0.2826	0.3338	0.3916	0.4296	0.5322
34	0.2785	0.3291	0.3862	0.4238	0.5254
35	0.2746	0.3246	0.3810	0.4182	0.5189
36	0.2709	0.3202	0.3760	0.4128	0.5126
37	0.2673	0.3160	0.3712	0.4076	0.5066
38	0.2638	0.3120	0.3665	0.4026	0.5007
39	0.2605	0.3081	0.3621	0.3978	0.4950
40	0.2573	0.3044	0.3578	0.3932	0.4896
41	0.2542	0.3008	0.3536	0.3887	0.4843
42	0.2512	0.2973	0.3496	0.3843	0.4791
43	0.2483	0.2940	0.3457	0.3801	0.4742
44	0.2455	0.2907	0.3420	0.3761	0.4694
45	0.2429	0.2876	0.3384	0.3721	0.4647
46	0.2403	0.2845	0.3348	0.3683	0.4601
47	0.2377	0.2816	0.3314	0.3646	0.4557
48	0.2353	0.2787	0.3281	0.3610	0.4514
49	0.2329	0.2759	0.3249	0.3575	0.4473
50	0.2306	0.2732	0.3218	0.3542	0.4432

lksi oleh: Junaidi (<http://junaidichaniago.wordpress.com>). 2010

Tabel r untuk df = 51 - 100					
df = (N-2)	Tingkat signifikansi untuk uji satu arah				
	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005
	Tingkat signifikansi untuk uji dua arah				
	0.1	0.05	0.02	0.01	0.001
51	0.2284	0.2706	0.3188	0.3509	0.4393
52	0.2262	0.2681	0.3158	0.3477	0.4354
53	0.2241	0.2656	0.3129	0.3445	0.4317
54	0.2221	0.2632	0.3102	0.3415	0.4280
55	0.2201	0.2609	0.3074	0.3385	0.4244
56	0.2181	0.2586	0.3048	0.3357	0.4210
57	0.2162	0.2564	0.3022	0.3328	0.4176
58	0.2144	0.2542	0.2997	0.3301	0.4143
59	0.2126	0.2521	0.2972	0.3274	0.4110
60	0.2108	0.2500	0.2948	0.3248	0.4079
61	0.2091	0.2480	0.2925	0.3223	0.4048
62	0.2075	0.2461	0.2902	0.3198	0.4018
63	0.2058	0.2441	0.2880	0.3173	0.3988
64	0.2042	0.2423	0.2858	0.3150	0.3959
65	0.2027	0.2404	0.2837	0.3126	0.3931
66	0.2012	0.2387	0.2816	0.3104	0.3903
67	0.1997	0.2369	0.2796	0.3081	0.3876
68	0.1982	0.2352	0.2776	0.3060	0.3850
69	0.1968	0.2335	0.2756	0.3038	0.3823
70	0.1954	0.2319	0.2737	0.3017	0.3798
71	0.1940	0.2303	0.2718	0.2997	0.3773
72	0.1927	0.2287	0.2700	0.2977	0.3748
73	0.1914	0.2272	0.2682	0.2957	0.3724
74	0.1901	0.2257	0.2664	0.2938	0.3701
75	0.1888	0.2242	0.2647	0.2919	0.3678
76	0.1876	0.2227	0.2630	0.2900	0.3655
77	0.1864	0.2213	0.2613	0.2882	0.3633
78	0.1852	0.2199	0.2597	0.2864	0.3611
79	0.1841	0.2185	0.2581	0.2847	0.3589
80	0.1829	0.2172	0.2565	0.2830	0.3568
81	0.1818	0.2159	0.2550	0.2813	0.3547
82	0.1807	0.2146	0.2535	0.2796	0.3527
83	0.1796	0.2133	0.2520	0.2780	0.3507
84	0.1786	0.2120	0.2505	0.2764	0.3487
85	0.1775	0.2108	0.2491	0.2748	0.3468
86	0.1765	0.2096	0.2477	0.2732	0.3449
87	0.1755	0.2084	0.2463	0.2717	0.3430
88	0.1745	0.2072	0.2449	0.2702	0.3412
89	0.1735	0.2061	0.2435	0.2687	0.3393
90	0.1726	0.2050	0.2422	0.2673	0.3375
91	0.1716	0.2039	0.2409	0.2659	0.3358
92	0.1707	0.2028	0.2396	0.2645	0.3341
93	0.1698	0.2017	0.2384	0.2631	0.3323
94	0.1689	0.2006	0.2371	0.2617	0.3307
95	0.1680	0.1996	0.2359	0.2604	0.3290
96	0.1671	0.1986	0.2347	0.2591	0.3274
97	0.1663	0.1975	0.2335	0.2578	0.3258
98	0.1654	0.1966	0.2324	0.2565	0.3242
99	0.1646	0.1956	0.2312	0.2552	0.3226
100	0.1638	0.1946	0.2301	0.2540	0.3211

lksi oleh: Junaidi (<http://junaidichaniago.wordpress.com>). 2010

Lampiran 5 Titik Persentase Distribusi (t tabel)

Titik Persentase Distribusi t (df = 1 – 40)

df	Pr 0.25 0.50	0.10 0.20	0.05 0.10	0.025 0.050	0.01 0.02	0.005 0.010	0.001 0.002
1	1.00000	3.07768	6.31375	12.70620	31.82052	63.65674	318.30884
2	0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	22.32712
3	0.76489	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.21453
4	0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	7.17318
5	0.72669	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	5.89343
6	0.71756	1.43976	1.94318	2.44691	3.14267	3.70743	5.20763
7	0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49948	4.78529
8	0.70639	1.39682	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079
9	0.70272	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24984	4.29681
10	0.69981	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.14370
11	0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.02470
12	0.69548	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	3.92963
13	0.69383	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	3.85198
14	0.69242	1.34503	1.76131	2.14479	2.62449	2.97684	3.78739
15	0.69120	1.34061	1.75305	2.13145	2.60248	2.94671	3.73283
16	0.69013	1.33676	1.74588	2.11991	2.58349	2.92078	3.68615
17	0.68920	1.33338	1.73961	2.10982	2.56693	2.89823	3.64577
18	0.68836	1.33039	1.73406	2.10092	2.55238	2.87844	3.61048
19	0.68762	1.32773	1.72913	2.09302	2.53948	2.86093	3.57940
20	0.68695	1.32534	1.72472	2.08596	2.52798	2.84534	3.55181
21	0.68635	1.32319	1.72074	2.07961	2.51765	2.83136	3.52715
22	0.68581	1.32124	1.71714	2.07387	2.50832	2.81876	3.50499
23	0.68531	1.31946	1.71387	2.06866	2.49987	2.80734	3.48496
24	0.68485	1.31784	1.71088	2.06390	2.49216	2.79694	3.46678
25	0.68443	1.31635	1.70814	2.05954	2.48511	2.78744	3.45019
26	0.68404	1.31497	1.70562	2.05553	2.47863	2.77871	3.43500
27	0.68368	1.31370	1.70329	2.05183	2.47266	2.77068	3.42103
28	0.68335	1.31253	1.70113	2.04841	2.46714	2.76326	3.40816
29	0.68304	1.31143	1.69913	2.04523	2.46202	2.75639	3.39624
30	0.68276	1.31042	1.69726	2.04227	2.45726	2.75000	3.38518
31	0.68249	1.30946	1.69552	2.03951	2.45282	2.74404	3.37490
32	0.68223	1.30857	1.69389	2.03693	2.44868	2.73848	3.36531
33	0.68200	1.30774	1.69236	2.03452	2.44479	2.73328	3.35634
34	0.68177	1.30695	1.69092	2.03224	2.44115	2.72839	3.34793
35	0.68156	1.30621	1.68957	2.03011	2.43772	2.72381	3.34005
36	0.68137	1.30551	1.68830	2.02809	2.43449	2.71948	3.33262
37	0.68118	1.30485	1.68709	2.02619	2.43145	2.71541	3.32563
38	0.68100	1.30423	1.68595	2.02439	2.42857	2.71156	3.31903
39	0.68083	1.30364	1.68488	2.02269	2.42584	2.70791	3.31279
40	0.68067	1.30308	1.68385	2.02108	2.42326	2.70446	3.30688

Catatan: Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah dalam kedua ujung

Diproduksi oleh: Junaidi (<http://junaidichaniago.wordpress.com>), 2010

Titik Persentase Distribusi t (df = 41 – 80)

df \ Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
41	0.68052	1.30254	1.68288	2.01954	2.42080	2.70118	3.30127
42	0.68038	1.30204	1.68195	2.01808	2.41847	2.69807	3.29595
43	0.68024	1.30155	1.68107	2.01669	2.41625	2.69510	3.29089
44	0.68011	1.30109	1.68023	2.01537	2.41413	2.69228	3.28607
45	0.67998	1.30065	1.67943	2.01410	2.41212	2.68959	3.28148
46	0.67986	1.30023	1.67866	2.01290	2.41019	2.68701	3.27710
47	0.67975	1.29982	1.67793	2.01174	2.40835	2.68456	3.27291
48	0.67964	1.29944	1.67722	2.01063	2.40658	2.68220	3.26891
49	0.67953	1.29907	1.67655	2.00958	2.40489	2.67995	3.26508
50	0.67943	1.29871	1.67591	2.00856	2.40327	2.67779	3.26141
51	0.67933	1.29837	1.67528	2.00758	2.40172	2.67572	3.25789
52	0.67924	1.29805	1.67469	2.00665	2.40022	2.67373	3.25451
53	0.67915	1.29773	1.67412	2.00575	2.39879	2.67182	3.25127
54	0.67906	1.29743	1.67356	2.00488	2.39741	2.66998	3.24815
55	0.67898	1.29713	1.67303	2.00404	2.39608	2.66822	3.24515
56	0.67890	1.29685	1.67252	2.00324	2.39480	2.66651	3.24226
57	0.67882	1.29658	1.67203	2.00247	2.39357	2.66487	3.23948
58	0.67874	1.29632	1.67155	2.00172	2.39238	2.66329	3.23680
59	0.67867	1.29607	1.67109	2.00100	2.39123	2.66176	3.23421
60	0.67860	1.29582	1.67065	2.00030	2.39012	2.66028	3.23171
61	0.67853	1.29558	1.67022	1.99962	2.38905	2.65886	3.22930
62	0.67847	1.29536	1.66980	1.99897	2.38801	2.65748	3.22696
63	0.67840	1.29513	1.66940	1.99834	2.38701	2.65615	3.22471
64	0.67834	1.29492	1.66901	1.99773	2.38604	2.65485	3.22253
65	0.67828	1.29471	1.66864	1.99714	2.38510	2.65360	3.22041
66	0.67823	1.29451	1.66827	1.99656	2.38419	2.65239	3.21837
67	0.67817	1.29432	1.66792	1.99601	2.38330	2.65122	3.21639
68	0.67811	1.29413	1.66757	1.99547	2.38245	2.65008	3.21446
69	0.67806	1.29394	1.66724	1.99495	2.38161	2.64898	3.21260
70	0.67801	1.29376	1.66691	1.99444	2.38081	2.64790	3.21079
71	0.67796	1.29359	1.66660	1.99394	2.38002	2.64686	3.20903
72	0.67791	1.29342	1.66629	1.99346	2.37926	2.64585	3.20733
73	0.67787	1.29326	1.66600	1.99300	2.37852	2.64487	3.20567
74	0.67782	1.29310	1.66571	1.99254	2.37780	2.64391	3.20406
75	0.67778	1.29294	1.66543	1.99210	2.37710	2.64298	3.20249
76	0.67773	1.29279	1.66515	1.99167	2.37642	2.64208	3.20096
77	0.67769	1.29264	1.66488	1.99125	2.37576	2.64120	3.19948
78	0.67765	1.29250	1.66462	1.99085	2.37511	2.64034	3.19804
79	0.67761	1.29236	1.66437	1.99045	2.37448	2.63950	3.19663
80	0.67757	1.29222	1.66412	1.99006	2.37387	2.63869	3.19526

Catatan: Probabilitas yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah dalam kedua ujung

Diproduksi oleh: Junaidi (<http://junaidichaniago.wordpress.com>), 2010

Titik Persentase Distribusi t (df = 81 –120)

df \ Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
81	0.67753	1.29209	1.66388	1.98969	2.37327	2.63790	3.19392
82	0.67749	1.29196	1.66365	1.98932	2.37269	2.63712	3.19262
83	0.67746	1.29183	1.66342	1.98896	2.37212	2.63637	3.19135
84	0.67742	1.29171	1.66320	1.98861	2.37156	2.63563	3.19011
85	0.67739	1.29159	1.66298	1.98827	2.37102	2.63491	3.18890
86	0.67735	1.29147	1.66277	1.98793	2.37049	2.63421	3.18772
87	0.67732	1.29136	1.66256	1.98761	2.36998	2.63353	3.18657
88	0.67729	1.29125	1.66235	1.98729	2.36947	2.63286	3.18544
89	0.67726	1.29114	1.66216	1.98698	2.36898	2.63220	3.18434
90	0.67723	1.29103	1.66196	1.98667	2.36850	2.63157	3.18327
91	0.67720	1.29092	1.66177	1.98638	2.36803	2.63094	3.18222
92	0.67717	1.29082	1.66159	1.98609	2.36757	2.63033	3.18119
93	0.67714	1.29072	1.66140	1.98580	2.36712	2.62973	3.18019
94	0.67711	1.29062	1.66123	1.98552	2.36667	2.62915	3.17921
95	0.67708	1.29053	1.66105	1.98525	2.36624	2.62858	3.17825
96	0.67705	1.29043	1.66088	1.98498	2.36582	2.62802	3.17731
97	0.67703	1.29034	1.66071	1.98472	2.36541	2.62747	3.17639
98	0.67700	1.29025	1.66055	1.98447	2.36500	2.62693	3.17549
99	0.67698	1.29016	1.66039	1.98422	2.36461	2.62641	3.17460
100	0.67695	1.29007	1.66023	1.98397	2.36422	2.62589	3.17374
101	0.67693	1.28999	1.66008	1.98373	2.36384	2.62539	3.17289
102	0.67690	1.28991	1.65993	1.98350	2.36346	2.62489	3.17206
103	0.67688	1.28982	1.65978	1.98326	2.36310	2.62441	3.17125
104	0.67686	1.28974	1.65964	1.98304	2.36274	2.62393	3.17045
105	0.67683	1.28967	1.65950	1.98282	2.36239	2.62347	3.16967
106	0.67681	1.28959	1.65936	1.98260	2.36204	2.62301	3.16890
107	0.67679	1.28951	1.65922	1.98238	2.36170	2.62256	3.16815
108	0.67677	1.28944	1.65909	1.98217	2.36137	2.62212	3.16741
109	0.67675	1.28937	1.65895	1.98197	2.36105	2.62169	3.16669
110	0.67673	1.28930	1.65882	1.98177	2.36073	2.62126	3.16598
111	0.67671	1.28922	1.65870	1.98157	2.36041	2.62085	3.16528
112	0.67669	1.28916	1.65857	1.98137	2.36010	2.62044	3.16460
113	0.67667	1.28909	1.65845	1.98118	2.35980	2.62004	3.16392
114	0.67665	1.28902	1.65833	1.98099	2.35950	2.61964	3.16326
115	0.67663	1.28896	1.65821	1.98081	2.35921	2.61926	3.16262
116	0.67661	1.28889	1.65810	1.98063	2.35892	2.61888	3.16198
117	0.67659	1.28883	1.65798	1.98045	2.35864	2.61850	3.16135
118	0.67657	1.28877	1.65787	1.98027	2.35837	2.61814	3.16074
119	0.67656	1.28871	1.65776	1.98010	2.35809	2.61778	3.16013
120	0.67654	1.28865	1.65765	1.97993	2.35782	2.61742	3.15954

Catatan: Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah dalam kedua ujung

Diproduksi oleh: Junaidi (<http://junaidichaniago.wordpress.com>), 2010

Lampiran 6 Tabulasi Jawaban Responden

Responden	Politik Uang												Total
	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	
1	1	1	1	1	1	1	1	5	1	5	1	5	24
2	1	5	1	3	1	3	5	3	1	3	1	3	30
3	5	5	3	5	1	5	5	5	5	5	5	5	54
4	3	5	1	3	1	2	5	4	3	4	4	5	40
5	1	5	5	1	1	1	5	5	5	5	1	5	40
6	1	3	2	2	2	3	3	3	2	3	2	2	28
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
8	1	5	1	5	1	3	5	5	3	5	1	3	38
9	1	4	1	2	2	3	4	3	4	4	3	4	35
10	3	5	3	3	3	3	5	3	3	3	3	3	40
11	1	5	4	5	1	5	5	5	1	4	2	5	43
12	2	2	2	3	3	3	2	3	3	3	3	4	33
13	2	5	2	3	1	4	5	4	2	2	1	4	35
14	1	3	3	2	1	3	3	4	3	4	3	4	34
15	2	2	2	2	2	5	2	4	2	4	2	4	33
16	1	4	1	1	1	4	4	4	2	4	1	4	31
17	4	5	4	2	4	2	5	4	4	4	4	4	46
18	4	4	4	3	4	5	4	4	3	5	4	5	49
19	1	4	3	4	1	4	4	5	3	4	3	3	39
20	1	1	1	4	1	5	1	5	1	5	1	5	31
21	3	3	3	4	3	4	3	3	3	4	3	4	40
22	3	3	3	4	3	4	3	3	4	4	2	0	36
23	1	4	2	2	2	3	4	4	2	4	1	4	33
24	2	4	2	4	2	4	4	4	2	4	1	4	37
25	4	3	3	3	3	5	3	3	4	4	3	4	42
26	2	5	2	2	2	2	5	4	5	2	2	2	35
27	2	4	2	2	2	2	4	4	5	4	2	2	35
28	2	4	2	2	2	2	4	2	2	4	2	4	32
29	2	4	2	2	2	2	4	2	2	2	2	0	26
30	1	3	3	3	2	4	3	4	3	4	3	5	38
31	3	3	3	3	2	4	3	4	3	4	3	5	40
32	2	5	2	5	1	5	5	4	2	4	2	4	41
33	2	4	2	4	3	4	4	4	3	4	3	5	42
34	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	4	39
35	3	3	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	41
36	1	1	4	4	1	4	1	1	3	3	1	4	28
37	1	4	2	4	2	5	4	2	1	4	4	5	38
38	3	3	3	4	2	4	3	2	4	4	2	4	38
39	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	47
40	1	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	32
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
42	1	4	4	4	2	4	4	4	4	4	2	4	41
43	1	1	2	5	1	5	1	5	1	4	3	5	34

44	2	3	2	4	3	4	3	2	2	4	2	4	35
45	3	5	4	5	4	5	5	5	3	5	3	5	52
46	4	5	4	5	4	5	5	5	3	5	4	5	54
47	2	4	2	2	2	4	4	5	3	5	2	5	40
48	4	4	4	2	3	3	4	1	3	2	3	3	36
49	3	3	2	4	1	2	3	1	4	2	0	1	26
50	2	4	2	3	4	4	4	3	2	3	3	0	34
51	2	2	3	3	2	3	2	3	3	3	2	3	31
52	1	4	3	3	1	3	4	4	1	3	2	3	32
53	4	3	4	5	3	4	3	5	2	4	2	4	43
54	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	40
55	2	5	3	3	3	4	5	5	2	4	2	3	41
56	2	2	2	2	2	2	2	4	2	3	2	3	28
57	2	4	2	4	2	4	4	4	3	4	3	4	40
58	1	5	3	1	1	3	5	4	1	3	1	3	31
59	1	5	1	4	1	4	5	4	1	4	1	4	35
60	1	3	2	1	2	3	3	5	3	4	2	5	34
61	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	37
62	2	5	2	4	1	4	5	4	1	4	1	5	38
63	2	4	3	3	2	3	4	3	2	3	2	3	34
64	2	5	2	4	1	4	5	4	1	4	1	5	38
65	4	3	4	3	3	4	3	2	3	4	4	4	41
66	2	1	1	2	2	3	1	3	3	3	2	3	26
67	3	3	2	3	2	3	3	4	3	3	2	3	34
68	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	46
69	4	5	4	4	3	4	5	4	4	4	5	4	50
70	3	3	2	2	3	3	3	3	2	2	2	3	31
71	2	3	4	4	3	3	3	4	2	2	2	3	35
72	3	4	4	4	3	2	4	4	4	4	3	4	43
73	2	3	4	4	3	4	3	4	3	4	3	4	41
74	1	5	1	1	1	2	5	3	1	4	1	3	28
75	1	4	1	1	1	1	4	4	5	1	2	1	26
76	1	5	5	2	1	4	5	5	2	2	1	4	37
77	2	2	2	4	2	4	2	4	1	4	3	5	35
78	1	1	1	2	1	4	1	4	1	4	1	4	25
79	2	4	4	4	2	4	4	2	2	5	0	5	38
80	1	1	1	3	1	4	1	4	2	4	1	4	27
81	1	5	1	2	1	2	5	4	1	1	1	2	26
82	2	4	2	3	1	4	4	4	2	4	3	4	37
83	3	3	3	4	3	3	3	4	4	4	3	4	41
84	3	4	2	2	1	2	4	2	3	2	2	3	30
85	2	4	2	2	2	4	4	4	2	4	2	4	36
86	2	4	2	2	2	4	4	4	2	4	2	4	36
87	2	5	1	3	2	1	5	3	2	3	2	2	31
88	2	4	2	4	2	4	4	4	2	4	2	4	38
89	1	4	2	4	2	5	4	5	5	5	1	5	43
90	2	4	3	2	2	4	4	4	2	4	2	4	37
91	3	4	2	2	2	3	4	2	2	3	1	3	31
92	2	4	3	2	2	4	4	4	2	4	2	4	37
93	1	4	4	4	5	4	4	1	4	5	5	1	42

94	1	5	2	2	1	2	5	5	2	4	2	4	35
95	1	4	1	1	1	4	4	4	1	4	1	4	30
96	2	4	2	2	2	3	4	3	2	3	3	4	34
97	1	5	2	2	1	2	5	5	2	4	2	4	35

Responden	Perilaku Pemilih								Total
	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	
1	4	5	5	5	1	5	5	5	35
2	1	5	5	4	3	5	5	5	33
3	2	5	5	1	1	5	5	5	29
4	5	5	5	5	5	5	5	5	40
5	5	5	5	1	1	5	5	1	28
6	3	3	3	3	3	4	5	2	26
7	5	5	5	5	5	5	5	5	40
8	3	5	5	5	5	5	5	1	34
9	2	4	4	2	2	4	4	1	23
10	3	4	4	3	3	4	4	3	28
11	3	5	1	1	3	5	5	1	24
12	2	2	2	3	3	5	4	2	23
13	2	2	3	3	2	5	4	2	23
14	2	2	3	3	3	5	4	2	24
15	3	2	2	2	2	5	5	2	23
16	5	5	5	5	4	5	5	1	35
17	4	2	2	2	2	5	5	4	26
18	4	3	4	3	4	5	5	3	31
19	4	5	5	1	1	5	5	1	27
20	3	3	3	3	3	5	5	2	27
21	2	3	3	2	2	4	4	3	23
22	4	4	4	4	3	4	4	3	30
23	3	2	1	1	1	5	5	1	19
24	4	2	4	2	4	5	5	2	28
25	2	4	4	3	4	3	4	2	26
26	4	2	5	1	2	5	5	1	25
27	2	4	4	4	4	4	4	2	28
28	5	4	2	2	2	5	5	2	27
29	4	4	4	4	4	4	4	2	30
30	4	2	3	1	3	5	4	2	24
31	3	2	3	3	3	5	4	2	25
32	4	2	4	1	2	4	4	2	23
33	4	2	2	2	2	2	4	2	20
34	4	3	3	3	3	4	4	3	27
35	4	3	0	3	3	5	5	3	26
36	2	1	5	2	4	5	4	1	24
37	4	5	1	2	4	5	4	1	26
38	4	3	4	4	2	4	4	3	28
39	5	5	5	5	4	4	5	4	37
40	3	3	1	3	1	4	2	1	18

41	4	3	4	3	2	5	3	3	27
42	5	4	5	4	3	5	5	1	32
43	1	3	3	1	3	5	5	1	22
44	4	3	4	4	3	5	5	2	30
45	3	3	3	3	2	4	4	2	24
46	2	2	2	4	3	4	5	4	26
47	2	2	2	2	2	4	4	2	20
48	2	2	2	3	3	4	4	3	23
49	3	2	1	3	1	3	2	1	16
50	3	3	3	4	4	4	1	3	25
51	1	3	4	4	0	5	5	2	24
52	2	2	4	4	3	4	4	2	25
53	2	2	2	2	3	2	3	2	18
54	3	3	3	2	2	2	4	3	22
55	5	4	4	4	2	5	5	2	31
56	4	3	3	3	4	5	5	3	30
57	4	4	4	4	4	4	4	2	30
58	5	3	5	3	3	5	5	1	30
59	2	2	1	2	2	5	5	1	20
60	2	2	2	4	4	5	5	2	26
61	4	4	3	3	3	4	4	2	27
62	4	2	2	4	2	4	4	2	24
63	4	4	3	3	2	4	4	2	26
64	5	2	2	4	4	5	5	2	29
65	3	4	2	4	3	4	3	3	26
66	2	2	4	3	2	5	5	2	25
67	5	3	2	2	1	5	5	2	25
68	2	2	3	4	4	5	4	3	27
69	3	2	2	4	4	5	4	4	28
70	2	3	2	3	2	3	2	3	20
71	2	2	3	3	3	4	4	3	24
72	4	3	2	4	4	4	5	2	28
73	2	2	2	4	2	4	4	3	23
74	1	2	2	1	2	5	5	1	19
75	2	3	4	4	2	4	4	2	25
76	2	4	5	4	2	5	5	1	28
77	2	3	3	3	2	4	4	2	23
78	1	2	1	1	1	5	5	1	17
79	4	2	2	2	2	5	5	2	24
80	3	4	4	3	4	5	5	2	30
81	2	2	4	4	4	5	5	1	27
82	4	4	3	4	3	5	5	2	30
83	3	2	1	3	4	5	5	3	26
84	4	2	3	4	3	5	5	2	28
85	2	2	4	4	4	4	4	4	28
86	2	2	4	4	4	4	4	4	28
87	1	1	1	3	3	4	4	1	18
88	4	2	2	4	4	4	4	2	26
89	2	2	1	2	2	4	5	1	19
90	2	2	4	4	2	4	3	2	23

91	2	2	3	2	2	5	5	1	22
92	2	2	4	4	2	4	3	2	23
93	2	2	4	2	2	1	1	5	19
94	2	4	5	5	4	5	5	1	31
95	1	3	4	3	4	4	4	1	24
96	4	3	3	3	3	4	4	3	27
97	2	4	5	5	4	5	5	1	31

Lampiran 7 Output SPSS

1. Frekuensi Responden

Jenis_Kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Laki-laki	45	46.4	46.4	46.4
Perempuan	52	53.6	53.6	100.0
Total	97	100.0	100.0	

Usia

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 17-21 tahun	15	15.5	15.5	15.5
22-26 tahun	10	10.3	10.3	25.8
27-31 tahun	7	7.2	7.2	33.0
32-36 tahun	15	15.5	15.5	48.5
37-41 tahun	17	17.5	17.5	66.0
> 42 tahun	33	34.0	34.0	100.0
Total	97	100.0	100.0	

Pendidikan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid SD	6	6.2	6.2	6.2
SMP	15	15.5	15.5	21.6
SMA/K	62	63.9	63.9	85.6
DIPLOMA	4	4.1	4.1	89.7
SARJANA	7	7.2	7.2	96.9
MAGISTER	3	3.1	3.1	100.0
Total	97	100.0	100.0	

Pekerjaan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Wiraswasta	18	18.6	18.6	18.6
	Ibu Rumah Tangga	27	27.8	27.8	46.4
	Karyawan Swasta	12	12.4	12.4	58.8
	Pedagang	14	14.4	14.4	73.2
	Pelajar/Mahasiswa	11	11.3	11.3	84.5
	Lain-lain	15	15.5	15.5	100.0
	Total	97	100.0	100.0	

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Variabel X (PolitikUang)

Correlations

		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	Total
X1	Pearson Correlation	1	.067	.439**	.316**	.562**	.147	.067	-.178	.411**	.010	.532**	.040	.574**
	Sig. (2-tailed)		.515	.000	.002	.000	.150	.515	.081	.000	.925	.000	.695	.000
	N	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97
X2	Pearson Correlation	.067	1	.105	-.006	-.055	-.103	1.000**	.185	.062	.018	.040	-.036	.413**
	Sig. (2-tailed)	.515		.304	.957	.595	.318	.000	.069	.549	.859	.701	.726	.000
	N	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97
X3	Pearson Correlation	.439**	.105	1	.324**	.504**	.227*	.105	-.037	.371**	.114	.395**	.139	.621**
	Sig. (2-tailed)	.000	.304		.001	.000	.025	.304	.722	.000	.267	.000	.175	.000
	N	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97
X4	Pearson Correlation	.316**	-.006	.324**	1	.260*	.563**	-.006	.049	.105	.305**	.288**	.211*	.576**
	Sig. (2-tailed)	.002	.957	.001		.010	.000	.957	.634	.305	.002	.004	.038	.000
	N	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97

X5	Pearson Correlation	.562**	-.055	.504**	.260*	1	.192	-.055	-.242*	.365**	.104	.604**	-.140	.505**
	Sig. (2-tailed)	.000	.595	.000	.010		.060	.595	.017	.000	.310	.000	.172	.000
	N	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97
X6	Pearson Correlation	.147	-.103	.227*	.563**	.192	1	-.103	.154	-.127	.440**	.215*	.421**	.499**
	Sig. (2-tailed)	.150	.318	.025	.000	.060		.318	.132	.215	.000	.035	.000	.000
	N	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97
X7	Pearson Correlation	.067	1.000**	.105	-.006	-.055	-.103	1	.185	.062	.018	.040	-.036	.413**
	Sig. (2-tailed)	.515	.000	.304	.957	.595	.318		.069	.549	.859	.701	.726	.000
	N	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97
X8	Pearson Correlation	-.178	.185	-.037	.049	-.242*	.154	.185	1	-.068	.379**	-.047	.432**	.307**
	Sig. (2-tailed)	.081	.069	.722	.634	.017	.132	.069		.511	.000	.646	.000	.002
	N	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97
X9	Pearson Correlation	.411**	.062	.371**	.105	.365**	-.127	.062	-.068	1	.060	.404**	-.144	.424**
	Sig. (2-tailed)	.000	.549	.000	.305	.000	.215	.549	.511		.558	.000	.161	.000
	N	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97
X10	Pearson Correlation	.010	.018	.114	.305**	.104	.440**	.018	.379**	.060	1	.179	.587**	.525**
	Sig. (2-tailed)	.925	.859	.267	.002	.310	.000	.859	.000	.558		.080	.000	.000
	N	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97
X11	Pearson Correlation	.532**	.040	.395**	.288**	.604**	.215*	.040	-.047	.404**	.179	1	.091	.624**
	Sig. (2-tailed)	.000	.701	.000	.004	.000	.035	.701	.646	.000	.080		.378	.000
	N	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97
X12	Pearson Correlation	.040	-.036	.139	.211*	-.140	.421**	-.036	.432**	-.144	.587**	.091	1	.432**
	Sig. (2-tailed)	.695	.726	.175	.038	.172	.000	.726	.000	.161	.000	.378		.000
	N	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97
Total	Pearson Correlation	.574**	.413**	.621**	.576**	.505**	.499**	.413**	.307**	.424**	.525**	.624**	.432**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.002	.000	.000	.000	.000	
	N	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Variabel Y (Perilaku Pemilih)

		Correlations								
		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Total_Y
Y1	Pearson Correlation	1	.371**	.134	.115	.127	.170	.206*	.100	.533**
	Sig. (2-tailed)		.000	.191	.262	.215	.097	.043	.331	.000
	N	97	97	97	97	97	97	97	97	97
Y2	Pearson Correlation	.371**	1	.466**	.244*	.137	.160	.218*	.135	.658**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.016	.181	.117	.032	.187	.000
	N	97	97	97	97	97	97	97	97	97
Y3	Pearson Correlation	.134	.466**	1	.338**	.198	.125	.146	.154	.643**
	Sig. (2-tailed)	.191	.000		.001	.052	.224	.153	.132	.000
	N	97	97	97	97	97	97	97	97	97
Y4	Pearson Correlation	.115	.244*	.338**	1	.491**	.035	-.023	.292**	.617**
	Sig. (2-tailed)	.262	.016	.001		.000	.732	.820	.004	.000
	N	97	97	97	97	97	97	97	97	97
Y5	Pearson Correlation	.127	.137	.198	.491**	1	.104	.105	.147	.548**
	Sig. (2-tailed)	.215	.181	.052	.000		.309	.307	.150	.000
	N	97	97	97	97	97	97	97	97	97
Y6	Pearson Correlation	.170	.160	.125	.035	.104	1	.665**	-.188	.402**
	Sig. (2-tailed)	.097	.117	.224	.732	.309		.000	.066	.000
	N	97	97	97	97	97	97	97	97	97
Y7	Pearson Correlation	.206*	.218*	.146	-.023	.105	.665**	1	-.144	.434**
	Sig. (2-tailed)	.043	.032	.153	.820	.307	.000		.159	.000
	N	97	97	97	97	97	97	97	97	97
Y8	Pearson Correlation	.100	.135	.154	.292**	.147	-.188	-.144	1	.389**
	Sig. (2-tailed)	.331	.187	.132	.004	.150	.066	.159		.000
	N	97	97	97	97	97	97	97	97	97
Total_Y	Pearson Correlation	.533**	.658**	.643**	.617**	.548**	.402**	.434**	.389**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	

N	97	97	97	97	97	97	97	97	97
---	----	----	----	----	----	----	----	----	----

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

b. Uji Reliabilitas

Variabel X (Politik Uang)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	97	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	97	100.0

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.712	12

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1	34.2887	32.541	.446	.680
X2	32.7320	34.323	.245	.709
X3	33.8660	31.867	.500	.672
X4	33.3608	32.087	.435	.680
X5	34.3299	33.828	.379	.690
X6	32.9485	33.591	.361	.692
X7	32.7320	34.323	.245	.709
X8	32.7526	36.042	.149	.720
X9	33.7938	34.290	.263	.706
X10	32.7526	33.876	.409	.687
X11	34.1340	31.805	.503	.671
X12	32.7320	34.032	.264	.706

Variabel Y (Perilaku Pemilih)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	97	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	97	100.0

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.639	8

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y1	22.9794	16.750	.310	.615
Y2	23.0309	15.718	.488	.564
Y3	22.8351	15.160	.426	.579
Y4	22.9278	15.984	.424	.581
Y5	23.2062	16.895	.353	.602
Y6	21.5773	18.851	.244	.628
Y7	21.6804	18.428	.261	.625
Y8	23.7629	18.412	.159	.654

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		97
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.57411079
Most Extreme Differences	Absolute	.096
	Positive	.096
	Negative	-.067
Kolmogorov-Smirnov Z		.943

Asymp. Sig. (2-tailed)	.336
a. Test distribution is Normal.	

4. Analisis Regresi Linear Sederhana

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.644	.332		1.943	.055
	Politik_Uang	.724	.025	.942	28.842	.000

a. Dependent Variable: Perilaku_Pemilih

5. Pengujian Hipotesis

a. Koefisien Determinasi (R-Square)

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Politik_Uang ^a		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Perilaku_Pemilih

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.942 ^a	.888	.887	2.88351

a. Predictors: (Constant), Politik_Uang

b. Uji T

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.644	.332		1.943	.055
	Politik_Uang	.724	.025	.942	28.842	.000

a. Dependent Variable: Perilaku_Pemilih

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Ending Selasih
Tempat, Tanggal Lahir : Purbalingga, 13 November 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat : Jl. Letkol Isdiman RT 002 RW 003 No.212, Kelurahan Bancar, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga
Nomor Hp/WA : 095380013874
Email : endingselasih@gmail.com
Riwayat Pendidikan :

No.	Nama Instansi	Tahun Lulus
1.	TKLarasati Jakarta	2007
2.	SD N Menteng Atas 04 Pagi Jakarta	2011
3.	SMP N 67 Jakarta	2014
4.	SMA S 17 Agustus 1945 Jakarta	2017

Pengalaman Organisasi :

No.	Organisasi	Jabatan	Tahun
1.	Himpunan Mahasiswa Jakarta, Jawa Barat, dan Banten (HMJB)	Anggota	2018-2020
2.	Dompot Dhuafa Volunteer Jawa Tengah	Anggota	2019-2020

Semarang, 13 Desember 2021

Penulis



Ending Selasih